

DINAMIKA SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NGADI
TONI SOETOPO
MASYHURI IMRON



LEUSER CITA PUSTAKA



LIPI



COREMAP-LIPI

**DINAMIKA SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Penulis :
Ngadi
Toni Soetopo
Masyhuri Imron

Layout :
Puji Hartana

Desain Cover :
Puji Hartana

ISBN :
978-602-8942-51-5



PT. LEUSER CITA PUSTAKA (Anggota IKAPI)
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 16, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
Telp. (021) 7810076, Fax: (021) 7810076

Bekerjasama dengan



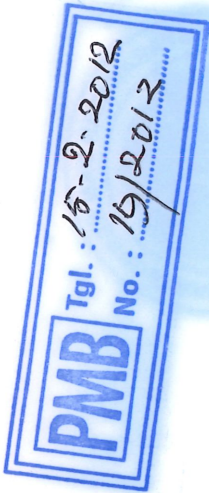
LIPI



COREMAP-LIPI

Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI dan COREMAP-LIPI
Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430
Telp. 62-21-64713850, Fax: 62-21-64711948
Website: <http://oseanografi.lipi.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KATA PENGANTAR

Buku berjudul "Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Selayar" ini merupakan hasil analisis dari data penelitian BME sosial-ekonomi Coremap yang dilakukan pada tahun 2008 di Kabupaten Kepulauan Selayar. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Dinamika sosial masyarakat pesisir di daratan pulau selayar dan pulau kecil yang diuraikan dalam buku ini meliputi aspek potensi sumber daya manusia dan kelembagaan sosial kemasyarakatan khususnya berkaitan dengan program penyelamatan terumbu karang. Sedangkan dinamika ekonomi masyarakat yang mencerminkan kesejahteraan penduduk di daratan pulau selayar dan pulau kecil dilihat dari aspek perubahan pendapatan penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Dinamika pendapatan masyarakat pesisir khususnya nelayan dapat dilihat dari aspek perubahan pendapatan dari kegiatan kenelayanan menurut musim dan tahun. Informasi tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kebijakan pengembangan masyarakat pesisir yang selama ini masih tertinggal.

Penulisan buku ini telah melibatkan berbagai pihak baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun *stakeholders* lain di pusat dan daerah. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Drs. Suko Bandiyono MSc yang telah menjadi nara sumber dalam refisi buku ini. Kepada para informan: masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di Buki, Bungaiya, Bontobulaeng dan Bontobaru kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan

terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Unit pelaksana COREMAP di Kabupaten Selayar, CRITC Kabupaten Selayar dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna meskipun tim peneliti telah berusaha sebaik mungkin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	5
2.1. Potensi Sumber Daya Alam	5
2.1.1. Keadaan Sumber Daya Alam	5
2.1.2. Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Laut	8
2.2. Potensi Sumber Daya Manusia	9
2.2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk	10
2.2.2. Mata Pencaharian Penduduk	14
BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DAN PROGRAM PENYELAMATAN TERUMBU KARANG	21
3.1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Laut	21
3.2. Program Penyelamatan Terumbu Karang	30
3.2.1. Pengelolaan dan Pelaksanaan/ Kegiatan di Tingkat Kabupaten	30
3.2.2. Pengelolaan dan Pelaksanaan di Tingkat Desa	41
3.3. Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan COREMAP	60
3.3.1. Bontomatene dan Buki	60
3.3.2. Kecamatan Pasimasunggu Timur	63

BAB IV	PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA	81
4.1.	PDRB Kabupaten Selayar	81
4.2.	Pendapatan Penduduk Di Lokasi Studi	84
4.2.1.	Pendapatan di Kawasan Daratan Pulau Besar	84
4.2.2.	Deskripsi Pendapatan di Kawasan Daratan Pulau Kecil	93
4.3.	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan	104
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	117
5.1.	Kesimpulan	117
5.2.	Rekomendasi	120
	DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas dan Produksi Tanaman Utama Perkebunan di Kabupaten Selayar Kepulauan, 2004 dan 2006	6
Tabel 2.2.	Jumlah dan Tingkat Pertambahan Penduduk di Kabupaten Selayar Menurut Kecamatan 2001-2006	11
Tabel 2.3.	Distribusi Penduduk Menurut Umur dan Kawasan, Tahun 2008	12
Tabel 2.4	Penduduk Buki Umur 7 Tahun Ke Atas Di Pasimasunggu Timur Dan Bontomatene Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Di Tamatkan, Tahun 2008	14
Tabel 2.5.	Distribusi Penduduk yang Bekerja di Kecamatan Bontomatene dan Pasimasunggu Timur Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2006 dan 2008	15
Tabel 2.6.	Pemilikan Alat Produksi Perikanan Tangkap Kawasan Pulau Kecil dan Daratan, Tahun 2006 dan 2008	18
Tabel 2.7.	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemilikan Aset di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan Kabupaten Selayar 2006 dan 2008	19
Tabel 3.1.	Pengembalian Dana Pinjaman	45
Tabel 3.2.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan COREMAP	61
Tabel 3.3.	Pengetahuan adanya Coremap	63

Tabel 3.4.	Pengetahuan adanya Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang	64
Tabel 3.5.	Pengetahuan tentang Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pentingnya Pelestarian Terumbu Karang	64
Tabel 3.6.	Keterlibatan Masyarakat dalam Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pelestarian Terumbu Karang	65
Tabel 3.7.	Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Perlindungan/Pengawasan Pesisir dan Laut	66
Tabel 3.8.	Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Pembentukan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK)	66
Tabel 3.9.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	67
Tabel 3.10.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pendampingan	68
Tabel 3.11.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pemanfaatan dan Pelestarian Terumbu Karang	69
Tabel 3.12.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Konservasi	69
Tabel 3.13.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif	70
Tabel 3.14.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Wanita/Jender	71
Tabel 3.15.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Lainnya	71
Tabel 3.16.	Jenis Kegiatan yang ingin Diikuti	72

Tabel 3.17.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pemilihan Jenis Usaha yang Tidak Merusak Terumbu Karang, serta Manfaatnya	72
Tabel 3.18.	Sumber Informasi tentang Pengetahuan mengenai Kegiatan Pemilihan Jenis Usaha yang Tidak Merusak Terumbu Karang	73
Tabel 3.19.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pemberian Dana Bergulir/Kredit untuk Mengembangkan Usaha, serta Manfaatnya	73
Tabel 3.20.	Sumber Informasi Pengetahuan tentang Pemberian Dana Bergulir/Kredit untuk Mengembangkan Usaha	74
Tabel 3.21.	Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan tentang Ketrampilan	74
Tabel 3.22.	Pengetahuan dan Keterlibatan pada Jenis Usaha Perdagangan Warung	75
Tabel 3.23.	Pengetahuan dan Keterlibatan pada Jenis Usaha Budidaya	75
Tabel 3.24.	Pengetahuan tentang Jenis Usaha Perikanan Tangkap	76
Tabel 3.25.	Pengetahuan tentang Jenis Usaha Ternak ayam/bebek/kambing dll.	76
Tabel 3.26.	Pengetahuan tentang Jenis Usaha Kegiatan Pembuatan makanan/kue/minyak kelapa	77
Tabel 3.27.	Pengetahuan dan Keterlibatan pada Jenis Usaha Pengolahan Hasil Laut/Ikan Asin	77
Tabel 3.28.	Pengetahuan tentang Jenis Usaha Kerajinan/Souvenir	78
Tabel 3.29.	Jenis Usaha Lainnya	78

Tabel 3.30.	Keadaan Ekonomi Keluarga dibandingkan Sebelum adanya Coremap Di Desa Bonto Bulaeng dan Bonto Baru	79
Tabel 3.31.	Perlu/tidaknya Kegiatan Ekonomi Coremap Dilanjutkan	80
Tabel 4.1.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Selayar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001-2005 (jutaan rupiah)	83
Tabel 4.2.	Statistik Pendapatan di Desa Buki dan Bungaiya, Kabupaten Selayar, Tahun 2006 dan 2008	86
Tabel 4.3.	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, di Desa Buki dan Bungaiya Kabupaten Selayar, 2006 dan 2008	89
Tabel 4.4.	Distribusi pendapatan rumah tangga di Desa Buki dan Bungaiya, Kabupaten Selayar, tahun 2006 dan 2008	92
Tabel 4.5.	Rata-rata Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Buki dan Bungaiya, Kabupaten Selayar, Tahun 2006 dan 2008	93
Tabel 4.6.	Statistik Pendapatan Rumah tangga di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Selayar, Tahun 2006 dan 2008	94
Tabel 4.7.	Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan KRT di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru Kabupaten Selayar 2006 dan 2008	97
Tabel 4.8.	Distribusi Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendapatan di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Selayar Tahun 2006 dan 2008	101

Tabel 4.9. Statistik Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Selayar, Tahun 2006 dan 2008

103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1.	Pendapatan Perkapita Desa Buki dan Bungaiya, dan Garis Kemiskinan	87
-------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis merupakan daerah maritim. Sebelum tahun 1965, daerah Selayar masih merupakan bagian dari Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Kepulauan Selayar berada di bagian selatan P. Sulawesi, tepatnya berada antara $5^{\circ} 42'$ - $7^{\circ} 35'$ LS dan $120^{\circ} 15'$ - $122^{\circ} 30'$ BT. Kabupaten ini berada pada lintasan antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Flores, tepatnya berada di sebelah selatan Kabupaten Bulukumba dan Laut Flores, di bagian utara Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Perairan laut di daerah tersebut dipengaruhi oleh jalur arus lintas Indonesia (ARLINDO), yang bergerak sepanjang tahun dari arah utara ke selatan (Suko Bandiyono, dkk., 2006).

Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai luas 22.885,35 km², namun 92,3 persen atau 21.138,41 km² merupakan laut dan sisanya merupakan daratan. Kabupaten ini terdiri dari, gugusan daratan yang terdiri atas 123 pulau dan hanya 20 pulau yang digunakan untuk permukiman penduduk, antara lain: P. Selayar, Jampea, Pasi Tanate, Malibu, Pasitallu, Rajuni, Lambego, Guang dan Bonerate (Pemerintah Kabupaten Selayar 2006:5). Secara administratif Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 kecamatan dan 75 desa. Kecamatan Buki dan Bontomatene merupakan dua kecamatan yang berada di P. Selayar dengan jarak dari ibu kota kabupaten sebesar 19 km untuk Buki dan 27 km untuk Bontomatene. Kecamatan Pasimasunggu Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di P. Jampea dengan jarak dari ibu kota kabupaten sebesar 96 km.

Lokasi penelitian di Kecamatan Bontomatene mudah dijangkau, karena terletak hanya 19-27 km dari Kota Benteng ke arah utara dan dilalui jalan negara lintas Pulau Selayar. Meskipun demikian, transportasi umum dari Bontomatene menuju Kota Benteng hanya ada

pada pagi dan sore hari dengan biaya 5 ribu perorang. Masyarakat di Buki dan Bungaiya, umumnya merasakan bahwa prasarana transportasi darat di daerahnya masih kurang. Oleh sebab itu sebagian besar dari mereka menggunakan sepeda motor untuk mempermudah transportasi. Hal berbeda terjadi pada sarana transportasi dari Benteng ke desa-desa di daerah selatan Pulau Selayar. Sarana transportasi ke daerah selatan Pulau Selayar (Desa Patikarya dan Bonelohe) relatif lebih banyak karena daerah selatan merupakan daerah yang subur dengan hasil pertanian tanaman pangan yang cukup melimpah.

Aksesibilitas penduduk di Buki dan Bungaiya lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat di Pulau Kecil. Alat transportasi ke Makasar dapat di tempuh dengan bus maupun sepeda motor dengan melalui Pelabuhan Pamatata. Penduduk yang ingin pergi ke Makasar atau Kota lain di seberang laut biasanya menggunakan kapal yang berangkat pada pagi hari. Oleh sebab itu mereka dapat mencapai tujuan pada waktu siang ataupun sore hari. Biaya transportasi untuk bus eksekutif dari ataupun ke Makasar berkisar 100-150 ribu rupiah. Transportasi bus dari dan ke Makasar selalu ada setiap hari sehingga penduduk dapat memilih waktu bepergian sesuai dengan kebutuhan mereka. Transportasi dari dan ke Makasar dengan pesawat terbang untuk sementara ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan tergantung pada hasil pemeriksaan KNKT.

Mata pencaharian penduduk di Buki dan Bungaiya sebagian besar adalah nelayan tradisional dengan peralatan yang sederhana. Sebagian diantara mereka mempunyai pekerjaan lain di daratan seperti beternak sapi maupun kambing, serta pertanian tanaman pangan. Jika terjadi musim gelombang kuat, sebagian dari mereka bekerja di daratan sambil melakukan perbaikan peralatan melaut yang mereka miliki. Perubahan musim baik dari musim hujan ke kemarau maupun musim gelombang kuat ke gelombang lemah berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perubahan musim biasanya juga diikuti oleh adaptasi mata pencaharian masyarakat serta perubahan tingkat pendapatan mereka.

Daerah penelitian di Pasimasunggu Timur terletak di bagian timur P. Jampea. Pulau Jampea mempunyai topografi yang relatif

datar, meskipun di bagian tengah terdapat bukit. Pasimasunggu Timur terbagi menjadi empat desa yaitu Bontoharu, Bontobulaeng, Lembang baji dan Bontomalling. Pasimasunggu Timur merupakan kecamatan yang relatif baru hasil pemekaran dari wilayah induk yaitu Kecamatan pasimasunggu. Pulau Jampea yang arealnya tidak terlalu luas yaitu 127 Km², mempunyai keterbatasan sumber air untuk pengairan. Akan tetapi Pasimasunggu Timur memiliki tanah yang relatif subur sehingga menjadi salah satu lumbung padi di Kepulauan Selayar, meskipun produksi padinya belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan beras di tingkat kabupaten, sehingga mereka harus mendatangkannya dari Makasar. Persawahan di daerah ini merupakan sawah tadah hujan, sehingga petani hanya panen 2 kali dalam setahun.

Pasimasunggu Timur juga mempunyai keterbatasan sumber air bersih, sehingga sebagian penduduk terpaksa mencari air di dusun lain yang masih satu desa, yaitu Dusun Mare. Lapisan tanah di Pasimasunggu Timur sebagian berwarna coklat kehitaman bercampur karang mati. Hutan lebat sudah tidak dijumpai di bukit yang ada di bagian tengah Pulau Jampea, akibat penebangan liar yang terjadi pada tahun 80-an dan sebagian bukit tersebut telah dijadikan kebun jambu mete (Suko Bandiyono, dkk., 2006).

Alat transportasi darat di daerah penelitian Pasimasunggu Timur lebih mengandalkan ojek, karena tidak ada mobil. Pasimasunggu Timur berada di pulau kecil, maka mempunyai keterbatasan untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM). Karena itu harga BBM di daerah ini mencapai Rp 6.500 per liter pada tahun 2006 dan Rp 8.500 pada tahun 2008. Kesulitan memperoleh BBM tidak hanya terjadi di P. Jampea saja, tetapi juga menjadi permasalahan serius di pulau-pulau lain yang lebih terisolir. Di sisi lain BBM sangat dibutuhkan nelayan untuk kegiatan di laut. Kenaikkan harga BBM telah menjadi masalah dalam kegiatan kenelayanan karena merupakan komponen utama biaya operasional melaut.

Kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh kondisi iklim. Hasil penelitian tahun 2006 menunjukkan rata-rata pendapatan perkapita di Buki dan Bungaiya

sebesar 204 ribu rupiah, sedangkan pendapatan perkapita di Pasimasunggu Timur sebesar 126 ribu rupiah. Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan juga bervariasi menurut musim. Pendapatan penduduk dari kegiatan kenelayanan di Buki dan Bungaiya pada waktu musim gelombang kuat sebesar 309 ribu rupiah, sedangkan pada waktu musim gelombang tenang mencapai 1 juta rupiah. Pendapatan dari kegiatan kenelayanan di Pasimasunggu Timur pada musim gelombang kuat adalah 136 ribu rupiah, sedangkan pada musim gelombang tenang sebesar 463 ribu rupiah.

Dinamika sosial ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh musim tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu buku ini dimaksudkan untuk membahas dinamika sosial ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2006-2008. Data yang digunakan untuk analisis merupakan data time series hasil penelitian dari kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian dilakukan di Kecamatan Buki dan Bontomatene sebagai kecamatan yang berada di daratan pulau selayar, serta Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai kecamatan yang berada di pulau kecil. Pengumpulan data menggunakan metode : observasi, survei, wawancara mendalam, diskusi kelompok, penelusuran data sekunder. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif.

BAB II

POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang terdapat di darat maupun laut. Sumber daya alam non hayati berupa bahan batuan, fosil dan mineral. Berbeda dengan sifat sumber daya alam hayati yang dapat diperbarui, sumber daya alam non hayati tidak dapat diperbarui sehingga dapat habis bila dieksploitasi oleh manusia secara berlebihan dan berdampak negatif terhadap kehidupan.

2.1.1. Keadaan Sumber Daya Alam

Kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya berada di 4 kecamatan yaitu Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu dan Pasimarannu. Luas hutan di Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur masing-masing 3.596,4 ha dan 2.942,0 ha, yang berfungsi sebagai hutan lindung, meskipun kondisinya telah rusak. Hutan konservasi hanya ada di Kecamatan Pasimarannu dengan luas 1.500 ha. Adapun hutan produksi hanya ada di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas 5.750 ha. Luas hutan produksi cenderung berkurang secara signifikan, akibat penebangan kayu oleh penduduk setempat. Luas hutan produksi di Kabupaten Kepulauan Selayar berkurang dari 7.250 ha pada tahun 2000 menjadi 5.750 pada tahun 2004.

Hutan lindung dan hutan konservasi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mengalami peningkatan luas areal. Hutan produksi telah menghasilkan kayu untuk pertukangan sebanyak 400 m³, kayu bakar

131 ribu m³, bambu 50.000 batang, rotan 210 ton, kemiri 2.100 ton dan nira sebanyak 36.000 liter. Dari sejumlah hasil hutan produksi tersebut hanya rotan yang telah memberi kontribusi pada pendapatan daerah berupa iuran hasil hutan yaitu 10,2 miliar rupiah tahun 2004 (BPS Kabupaten Selayar, 2005 : 161-162). Kebijakan pembangunan bidang kehutanan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara lestari, melalui pelibatan masyarakat dalam aspek pengelolaan dan pengawasan.

Produk perkebunan yang memberikan kontribusi pada pendapatan daerah ada 15 jenis tanaman terutama kelapa, kemiri, cengkeh, jambu mete, pala, panili dan kenari.¹ Penduduk di Kabupaten Selayar rata-rata mempunyai tanah yang tergolong sempit, sehingga tidak ada areal lahan yang khusus digunakan untuk tanaman perkebunan. Jenis tanaman tersebut umumnya tumbuh di pekarangan penduduk. Luas dan produksi tanaman perkebunan utama tahun 2004 dan 2006 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1. Luas dan Produksi Tanaman Utama Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Selayar, 2004 dan 2006

<i>Jenis Tanaman</i>	<i>Luas Tanam Th 2004 (Ha)</i>	<i>Luas Tanam Th 2006 (Ha)</i>	<i>Produksi Th 2004 (Ton)</i>	<i>Produksi Th 2006 (Ton)</i>
Kelapa	20.279	20.190	25.192	24.378
Kemiri	2.038	2.040	1.785	2.203
Cengkeh	1.058	1.061	437	471
Jambu mete	3.574	3.672	1.359	1.246
Pala	1.124	995	334	396
Panili	928	988	78	42
Kenari	225	225	256	283

Sumber : - BPS Kab Selayar Dalam Angka. 2004/2005: 151-152.

- BPS Kab. Selayar Dalam Angka 2006/2007: 195

Tanaman kelapa merupakan tanaman perkebunan rakyat yang paling dominan di Kabupaten Selayar, meskipun harga jual kopra kurang menguntungkan. Pada bulan September 2006, harga kopra di Kecamatan Bontomatene hanya mencapai Rp. 1800 per kilogram.

¹ Jenis tanaman lainnya adalah kopi, kapuk, lada, kakao, kapas, sagu, asam jawa dan aren.

Tahun 2008 harga kopra naik menjadi Rp 2000 per kilogram, sedangkan harga satu butir kelapa sekitar Rp 350-400. Hasil wawancara dengan warga pemilik kebun kelapa di Desa Buki menunjukkan secara umum mereka mengeluhkan rendahnya harga jual kelapa dan makin tingginya biaya panen. Permasalahan lain adalah banyak pohon kelapa yang sudah tua sehingga batangnya tinggi, sementara tidak ada peremajaan tenaga kerja pemanjat pohon kelapa. Generasi muda sudah tidak mau memanjat pohon kelapa yang menggunakan tali di kaki. Mereka lebih senang jenis pekerjaan yang sifatnya non pertanian seperti sebagai tukang ojek.

Luas panen jagung di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2006 mencapai 2.740 ha, dengan jumlah produksi 5.155 ton. Produksi jagung pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004 yang disebabkan oleh kurangnya volume air hujan. Hasil panen jagung sebagian dikonsumsi, dan sebagian lagi dijual untuk kemudian dibelikan beras. Berkaitan dengan tanaman pangan, kebijakan daerah telah mengarahkan tanaman pertanian pangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, antara lain dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

Kabupaten Kepulauan Selayar juga menghasilkan buah-buahan, terutama jeruk keprok dan jeruk nipis.² Jumlah tanaman jeruk keprok dan nipis pada tahun 2006 hampir sama dengan tahun 2004, yaitu masing-masing sebesar 264.554 dan 96.730 batang pohon dengan produksi masing-masing 3.373 ton dan 1.077 ton. Jeruk keprok (tangerine) Selayar telah lama terkenal karena rasanya yang enak, sehingga harga di Makassar lebih tinggi daripada harga jeruk keprok dari kabupaten lain. Puncak musim panen jeruk keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar terjadi tiap bulan Juni.

² Varitas buah-buahan yang lain yaitu pepaya, pisang, mangga, jambu, nenas, nangka dan durian.

2.1.2. Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Laut

Wilayah pengelolaan sumber daya laut mencakup wilayah perairan, tempat para nelayan melakukan penangkapan dan budidaya ikan, yang disebut *fishing ground*. Kegiatan pengelolaan laut di Selayar lebih terkonsentrasi di perairan P. Selayar, karena secara praktis perairan tersebut mudah dijangkau dari pusat pemerintahan di Benteng. Hal ini nampak dari keberadaan sarana dan prasarana kegiatan kenelayanan yang cenderung berada di P. Selayar, misalnya pelabuhan yang relative baik, ketersediaan armada laut, keberadaan pabrik es, pembangunan talut abrasi pantai dan pembangunan TPI meskipun belum selesai. Meskipun demikian di lokasi lain wilayah pengelolaan cenderung tidak jauh dari pantai dekat pusat kecamatan, meskipun pada skala yang relative kecil.

Secara umum kegiatan pengelolaan perikanan laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam kategori *small scale fisheries*, dengan armada penangkapan ikan yang berukuran kecil. Di Kabupaten Kepulauan Selayar 96 persen usaha kenelayanan dilakukan secara perorangan atau usaha keluarga. Karena itu kegiatan penangkapan ikan dilakukan tidak jauh dari pantai (sekitar 2-3 mil). Wilayah penangkapan ikan nelayan kecil umumnya berada di sekitar terumbu karang (*taka*). Kegiatan budidaya ikan bandeng dan udang juga dekat dengan pusat permukiman, sehingga memudahkan pemeliharaan.

Wilayah penangkapan ikan pada saat laut tenang lebih jauh dibandingkan dengan musim gelombang kuat dan pancaroba. Nelayan bahkan bisa melakukan penangkapan di kawasan perairan yang dekat dengan pulau lain yang dianggap banyak ikan. Akan tetapi, pada saat musim ombak besar (Desember-Februari), kegiatan melaut cenderung berkurang dan nelayan kecil tradisional akan menghindari ombak yang cukup besar dengan berlindung di balik pulau. Pada saat musim barat, nelayan di P. Selayar biasa menangkap ikan di wilayah timur pulau.

Kondisi berbeda dialami oleh nelayan yang memiliki armada kapal yang cukup besar. Karena mobilitasnya cukup tinggi, maka

wilayah tangkap mereka tidak hanya terbatas di sekitar lokasi tempat tinggalnya, melainkan di setiap kawasan perairan yang di anggap banyak ikannya. Ketergantungan mereka terhadap musim juga rendah, sehingga tidak tergantung pada ombak dan cenderung mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Sebagian nelayan di Selayar (khususnya di desa Pasitalu), melakukan penangkapan ikan di daerah lain. Pada saat musim gelombang tenang mereka melakukan penangkapan disuatu tempat yang dekat dengan kawasan terumbu karang (*taka*) yang banyak ikannya. Karena penangkapan dilakukan selama musim tenang yang berlangsung sekitar 6 bulan, maka para nelayan mengajak serta seluruh anggota keluarganya, kecuali yang sudah tua dan yang masih sekolah. Pada saat itu mereka tinggal bersama di lokasi dekat penangkapan, dengan mendirikan rumah sederhana sebagai tempat untuk berteduh dari sengatan matahari. Pada saat menjelang musim ombak, mereka kemudian kembali ke desa asalnya, dan melakukan penangkapan di perairan dekat dengan desanya.

Masyarakat memiliki pandangan bahwa laut itu milik Tuhan, sehingga siapapun boleh memanfaatkannya. Karena pandangan yang demikian maka wilayah tangkap di kawasan ini bersifat *open access*, dalam arti siapapun boleh menangkap ikan di kawasan perairan yang disukai. Sebagai wilayah yang *open access*, maka banyak nelayan dari luar daerah Selayar yang juga melakukan kegiatan penangkapan di kawasan perairan Selayar, seperti dari Bulukumba, Bantaeng, Sinjai dan Jeneponto. Nelayan dari luar kabupaten tersebut hanya memanfaatkan wilayah tangkap namun tidak terlibat dalam penyelamatan rumah ikan yaitu terumbu karang.

2.2. Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan kelautan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Sebagai contoh jumlah dan distribusi penduduk mempunyai implikasi langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi

masyarakat, antara lain menyangkut unsur pelayanan, pelaku usaha perikanan dan pelaku konservasi lingkungan.

2.2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk Kabupaten Selayar pada tahun 2001, 2004 dan 2006 masing-masing berjumlah 105.431 jiwa, 111.732 jiwa dan 116.513 jiwa. Pada kurun waktu 5 tahun jumlah penduduk Kabupaten Selayar mengalami penambahan sebesar 1,95 persen tiap tahun. Angka penambahan penduduk tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat penambahan penduduk nasional pada kurun waktu 2000-2005 sebesar 1,3 persen.

Angka penambahan penduduk di Kabupaten Selayar yang masih tinggi tersebut antara lain terjadi di Kecamatan Benteng, Pasilambena, Taka Bonerate dan Bontomanai. Tingginya tingkat penambahan penduduk mengindikasikan bahwa empat kecamatan tersebut mempunyai migrasi netto positif. Angka penambahan penduduk di Kecamatan Benteng cukup tinggi karena merupakan pusat pertumbuhan, jasa dan perdagangan. Di lima kecamatan lainnya tingkat penambahan penduduk masih di bawah angka penambahan penduduk tingkat kabupaten, bahkan di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Buki serta Pasimasunggu angka penambahan penduduknya di bawah 1 persen.

Pertambahan penduduk ditentukan oleh dua faktor penting yaitu karena penambahan alami dan migrasi. Untuk wilayah Kabupaten Selayar ke dua faktor tersebut sangat berperan terhadap penambahan penduduk. Menurut data BPS fertilitas (kelahiran) penduduk, tahun 2000 sebesar 2,27, ini berbeda dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah pada tahun 2003 dimana angka TFR sebesar 1,6.³ Angka fertilitas total tersebut jauh lebih rendah dibandingkan angka fertilitas total secara tingkat nasional sebesar 2,6. Rendahnya TFR tersebut mengindikasikan keberhasilan pengendalian kelahiran di wilayah Selayar sehingga telah memberi kontribusi rendahnya penambahan penduduk terutama di daerah Bontomatene dan Buki. Apabila

³ Jumlah wanita 15-49 sebanyak 29.788 dan jumlah anak lahir hidup 47.610.

memperhatikan rasio jenis kelamin di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Pasimaranmu masing-masing sebesar 0,85 dan 0,82, dapat mengindikasikan mereka yang melakukan migrasi keluar adalah kelompok penduduk laki-laki, sementara penduduk perempuan cenderung tinggal di perdesaan.

Tabel 2.2. Jumlah dan Tingkat Pertambahan Penduduk di Kabupaten Selayar Menurut Kecamatan 2001-2006

<i>Kecamatan</i>	<i>Tahun 2001</i>	<i>Tahun 2004</i>	<i>Tahun 2006</i>	Tingkat pertambahan Penduduk 2001-2006
Pasimaranmu	8.003	8.334	8.659	1,36
Pasilambena	4.883	6.024	6.863	7,26
Pasimasunggu	12.684	6.471 *	6.762	0,01
Taka Bonerate	9.617	10.384	11.239	2,59
Pasimasunggu Timur	*	6.216	6.416	*
Bontosikuyu	12.874	13.507	14.002	1,61
Bontoharu	10.701	11.208	11.474	1,56
Benteng	15.784	17.335	17.973	3,17
Bontomanai	14.157	15.207	15.914	2,42
Bontomatene	16.728	17.044	17.211	0,63
Buki			**	
Kabupaten Selayar	105.431	111.732	116.513	1,95

Sumber : BPS. Kabupaten Selayar dalam Angka 2004/2005 dan 2006/2007

* Pasimasunggu Timur masih bergabung dengan Pasimasunggu

** Kecamatan Buki masih menjadi bagian dari Kecamatan Bontomatene

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Selayar menunjukkan secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, dengan rasio sebesar 0,93. Hal ini berarti bahwa tiap 100 perempuan terdapat 93 laki-laki. Berdasarkan data potensi desa (podes) pada tahun 2006 desa Bontobulaeng memiliki jumlah penduduk sebanyak 563 Kepala Keluarga yang terdiri laki-laki 1.246 jiwa dan perempuan berjumlah 1.366 jiwa. Sedangkan desa Bontobaru jumlah penduduk sebanyak 2.090 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 971 jiwa dan perempuan sebanyak 1.119 jiwa yang terdiri 674 KK. Hasil penelitian PPK-LIPI 2006 di Bontomatene dan di Pasimasunggu Timur menunjukkan bahwa rata-rata dalam satu keluarga terdapat 4,4 jiwa dan 4,3 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk

laki-laki dengan rasio 0,96 untuk Bontomatene dan 0,95 untuk Pasimasunggu Timur.

Angka beban ketergantungan di Kecamatan Pasimasunggu dan Bontomatene masing-masing 49 per 100 dan 56 per 100. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang produktif di Pasimasunggu Timur akan menanggung 49 orang. Angka beban tanggungan tersebut masih lebih besar daripada angka beban tanggungan pada tingkat nasional tahun 2000 sebesar 54 per 100. Untuk masa ke depan angka beban tanggungan diperkirakan akan mengecil sampai mendekati 44 pada tahun 2025.

Di kawasan Bontomatene angka beban tanggungan lebih besar daripada di Pasimasunggu Timur. Penduduk usia produktif 15-64 tahun, secara hipotetis akan menanggung beban tanggungan bagi mereka yang berada pada umur 14 tahun ke bawah dan mereka yang berumur 65 tahun ke atas. Mereka yang masih muda, di bawah umur 15 tahun masih menjadi beban keluarga karena masih sekolah dan belum bekerja. Demikian pula diasumsikan bahwa mereka yang telah berumur 65 tahun ke atas sudah tidak mampu bekerja, sehingga menjadi tanggungan penduduk yang masuk angkatan kerja umur 15-64 tahun.

Tabel 2.3. Distribusi Penduduk Menurut Umur dan Kawasan, Tahun 2008

<i>Kel Umur</i>	<i>Pas-timur (%)</i>		<i>(N)</i>	<i>Bontomatene/Buki (%)</i>		<i>(N)</i>
	LK	P		LK	P	
0-4	56	44	27	50	50	35
5-9	44	56	46	54	46	47
10-14	39	61	49	52	48	47
15-19	51	49	57	70	30	45
20-24	45	55	45	75	25	34
25-29	42	48	34	50	50	37
30-34	34	66	47	67	33	18
35-39	44	56	60	83	17	37
40-44	48	52	40	55	45	25
45-49	54	46	43	45	55	39
50-54	48	52	23	61	39	36
55-59	58	42	21	57,1	42,9	15
60-64	55	45	20	60	40	22
65- ke atas	36	64	14	52	48	46
Total	46	54	496	59	41	483

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008.

Penduduk Kecamatan Pasimasunggu Timur pada umumnya adalah migran yang berasal dari etnis Bugis dan Makassar. Mereka berasal dari beberapa kabupaten antara lain Bulukumba, Jeneponto, Sinjai dan Takalar. Adanya etnis lain di Pasimasunggu Timur memperlihatkan adanya sejarah migrasi ke kawasan tersebut. Di desa Bungaiya beberapa keluarga migran berasal dari Maluku. Mereka datang ke desa tersebut sebagai pengungsi akibat kerusuhan di Ambon. Migrasi etnis Bugis ke Pasimasunggu semula berdagang dan menjadi ABK yang selanjutnya menikah dengan penduduk setempat yang akhirnya berdomisili di daerah tersebut. Latar belakang pekerjaan mereka selain sebagai pedagang terdapat pegawai negeri yang ditugaskan sebagai guru SD dan SLTP serta SLTA. Selain itu juga terdapat paramedis (dokter, bidan dan perawat) dan pegawai pemerintah daerah di kantor kecamatan. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir penduduk yang bermigrasi ke Pasimasunggu Timur relatif kecil. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh kegiatan ekonomi pasar belum berkembang dengan baik dibandingkan daerah lain seperti Sinjai, Bulukumba dan Makassar.

Belum berkembangnya kegiatan ekonomi karena aksesibilitas transportasi ke kawasan ini masih sangat terbatas, hanya ada akses kapal barang tiga hari atau satu minggu sekali dengan rute Selayar (Benteng)-Kayuadi-Pasimasunggu Timur dan Pasimasunggu Barat. Para pendatang yang menetap dan bermukim di Pasimasunggu Timur pada umumnya pegawai yang dimutasikan serta pendatang yang menikah dengan penduduk setempat. Selain migrasi masuk, terdapat migrasi keluar, terutama penduduk usia muda dengan tujuan mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Ketidacukupan sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi, respons orang tua yang kurang mendukung, dan kondisi geografis yang tidak menguntungkan, merupakan sebab rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Sekolah yang letaknya terisolir, jauh dari aksesibilitas pelayanan publik terutama transportasi dan komunikasi, diperkirakan mengalami masalah ketersediaan jumlah dan kualitas guru.

Tabel 2.4. Penduduk Buki Umur 7 Tahun Ke Atas Di Pasimasunggu Timur Dan Bontomatene Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Di Tamatkan, Tahun 2008

Tingkat Pendidikan Tertinggi	Kecamatan Pasimasunggu Timur	Kecamatan Bontomatene/Buki
Belum/ tidak tamat	12,2	22,4
Belum/tidak tamat SD	27,8	22,9
SD tamat	33,2	22,7
SLTP tamat	17,6	13,2
SLTA tamat ke atas	9,3	18,7
Total	100,0	100,0

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008.

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, merupakan salah satu sebab sebagian besar (73 persen) penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar hanya berpendidikan SD ke bawah. Oleh sebab itu kebijakan pendidikan Kabupaten Selayar diarahkan pada upaya mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, melalui penataan dan peningkatan peran lembaga pendidikan (Pemerintah Kabupaten Selayar. 2006 : 8).

2.2.2. Mata Pencaharian Penduduk

Peranan yang cukup tinggi sub-sektor perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja tampak di kecamatan-kecamatan sentra perikanan tangkap (Bontomatene dan Pasimasunggu Timur). Survei terhadap masyarakat di Kecamatan Bontomatene menunjukkan sebagian besar penduduk umur 10 tahun ke atas (35,1 persen) mempunyai kegiatan utama bekerja. Di antara penduduk yang bekerja tersebut sebagian besar (39,4 persen) bekerja sebagai nelayan tangkap. Saat survei ini dilakukan belum ada penduduk yang bekerja sebagai nelayan budidaya, karena belum ada teknologi yang dikenalkan kepada masyarakat.

Tabel 2.5 menunjukkan sebagian besar penduduk di Bontomatene dan Passimasunggu Timur pada tahun 2006 bekerja di lapangan pekerjaan perikanan tangkap (masing-masing 39 persen dan 31 persen). Namun pada tahun 2008, untuk daerah Bontomatene

mereka yang bekerja di perikanan tangkap tidak berubah. Adapun untuk daerah Pasimasunggu Timur justru mengalami penurunan dari 31 persen menjadi 20,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua desa mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut namun untuk Pasimasunggu telah bergeser ke pekerjaan pertanian pangan. Sistem perikanan yang ada di dua kawasan ini mempunyai kesamaan dalam hal teknologi penangkapan baik sarana maupun alat tangkap yang digunakan. Sarana penangkapan di kedua kawasan termasuk sederhana, sehingga hasil tangkapan nelayan relatif rendah. Jenis alat tangkap yang umum dipakai penduduk adalah sero, jaring, pancing, dan pukat.

Tabel 2.5. Distribusi Penduduk yang Bekerja di Kecamatan Bontomatene dan Pasimasunggu Timur Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2006 dan 2008

No	Lapangan pekerjaan	Bontomatene		Pasimasunggu Timur	
		2006	2008	2006	2008
1	Perikanan tangkap	39,4	39,2	31	20,9
2	Pertanian pangan	8,7	13,3	33,8	47,3
3	Pertanian tanaman keras	1,6	2,5	4,9	1,6
4	Industri pengolahan	0,8	2,5	0,7	3,1
5	Perdagangan	18,1	9,2	11,3	13,2
6	Jasa	15,7	14,2	8,4	6,2
7	Bangunan	5,5	5,8	5,6	0
8	Peternakan	3,1	4,2	0	0
9	Pertambangan	6,3	6,7	1,4	0
10	Lainnya	0,8	-	2,8	0
JUMLAH		100,0		100,0	

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Selain perikanan tangkap, kawasan Pasimasunggu Timur mempunyai potensi perikanan budi daya, pertanian tanaman pangan dan perkebunan tanaman keras. Perikanan Budidaya di kawasan Pasimasunggu pada umumnya berupa tambak yang lokasinya berada di pinggir laut. Berdasarkan survei jumlah penduduk yang memiliki

tambak cukup banyak sekitar 11 % dengan rata-rata pemilikan antara 0,5 Ha – 1,50 Ha. Budidaya perikanan, jenis ikan yang ada di tambak antara lain ikan banding dan udang yang dipanen satu tahun sekali. Pemilik tambak tersebut terdiri dari nelayan, petani dan sebagian pegawai negeri guru dan pegawai Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pemilik tambak produksi ikan bandeng dalam sekali panen lumayan besar rata-rata 0,5 Ha dapat menghasilkan sekitar setengah ton ikan bandeng dengan nilai Rp 2.000.000,- - Rp 3.500.000,-. Nilai ini merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya produksi dan upah membersihkan tambak. Sementara produksi udang relative kecil karena biaya produksinya tinggi, harga bibit (nener) tinggi karena harus di datangkan dari Makasar sehingga pendapatan dengan biaya produksi tidak sesuai bahkan sering merugi. Selain itu pemasaran udang relative sulit dibandingkan dengan bandeng karena terbatasnya sarana transportasi antar pulau/kota dan fasilitas penyimpanan udang yang masih terbatas.

Selain perikanan tangkap, sebagian penduduk yang lain bekerja dalam lapangan pekerjaan pertanian tanaman pangan dan keras, peternakan, perikanan, jasa, bangunan, peternakan dan pertambangan. Pertanian di Bontomatene masih dijalankan secara nomadik (berpindah-pindah tempat) dan masih cukup banyak penduduk yang bekerja di lapangan pekerjaan ini (8,7 persen). Hal ini disebabkan lahan pertanian di desa ini yang masih sangat luas namun kurang produktif karena tanahnya sangat tipis. Jenis tanaman yang umum ditanam petani adalah jagung dan setiap penduduk umumnya mampu mengerjakan 2 ha tanah karena tanahnya keras/ sulit diolah. Untuk daerah Pasimasunggu Timur pekerjaan pertanian pangan sangat dominan baik pada tahun 2006 maupun pada tahun 2008 masing-masing 33,8 persen dan 47,3 persen. Hal ini sejalan dengan saat penelitian pada bulan Mei di mana daerah tersebut baru saja melewati musim panen.

Petani di daerah ini umumnya hanya panen sekali dalam setahun yaitu bulan Maret/April, selebihnya tanaman tidak bisa berproduksi karena kekurangan air. Penanaman dimulai dengan pembabatan lahan

yang akan ditanami. Pekerjaan ini memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Tahap selanjutnya adalah pengeringan dan pembakaran daun tanaman yang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Setelah daun terbakar (tanah sudah agak subur), pekerjaan selanjutnya adalah membuat pagar batu yang rata-rata membutuhkan waktu 1 bulan. Tahap selanjutnya adalah menunggu datangnya curah hujan (biasanya bulan Januari). Jika musim hujan telah datang, petani kemudian menanam jagung dilahan yang telah mereka persiapkan. Jagung dipanen kurang lebih pada umur 70-80 hari setelah tanam. Jika pada tahun berikutnya petani akan menanam lagi, mereka harus membuka lahan baru dengan proses yang sama.

Pada tahun 2006 perdagangan menyerap sekitar 18 persen dari tenaga kerja di Bontomatene yang terdiri dari pedagang ikan, sembako, kelapa dan lainnya. Tahun 2008 penyerapan menjadi lebih rendah yaitu 9,2 persen di Bontomatene dan 13,2 persen di Pasimasunggu Timur. Rendahnya produksi barang dagangan di daerah Bontomatene menyebabkan perdagangan belum mengalami perkembangan yang berarti. Akses pedagang masih terbatas pada perdagangan tingkat kecamatan bahkan pedagang tingkat desa. Keterbatasan modal dan sumber daya manusia tampaknya menjadi faktor utama bagi sektor perdagangan sehingga rata-rata mereka mempunyai pendapatan yang rendah. Sebagian besar pedagang juga mempunyai ternak untuk menambah pendapatan mereka.

Dari survei rumah tangga tahun 2006 di kawasan Pasimasunggu Timur terdapat rumah tangga sebanyak 7 persen nelayan yang mempunyai perahu motor dalam dengan kapasitas mesin 6-18 PK dengan panjang perahu 4 m lebar 1,5 m. Pada tahun 2008 mereka yang mempunyai perahu motor dalam (*in board*) turun menjadi 3. Sementara itu nelayan yang mempunyai perahu dengan motor tempel hanya 1 orang pada tahun 2006 dengan kapasitas mesin 5,5 PK dengan panjang bodi 2 m lebar 1 m. Pada tahun 2008 pemilikan perahu *out board* naik menjadi 10 orang. Sedangkan nelayan yang mempunyai perahu tanpa motor (sampan) jumlahnya cukup banyak sekitar 36 persen nelayan dengan ukuran panjang bodi antara 1-3 meter.

Tabel 2.6. Pemilikan Alat Produksi Perikanan Tangkap Kawasan Pulau Kecil dan Daratan, Tahun 2006 dan 2008

Jenis Alat Produksi	Pasimasunggu Timur		Bontomatene/Buki	
	2006	2008	2006	2008
Perahu Mesin Dalam (<i>in board</i>)	7	3	8	12
Perahu Mesin Tempel (<i>out board</i>)	1	10	20	20
Perahu Tanpa Motor	36	24	25	22
Sero	6	-	-	-
Jaring	16	15	26	28
Pancing Rawai	14	8	4	13
Karamba.	-	-	15	1
Bubu	-	-	3	-
N	100	129	100	120

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Hasil survei (2006) luas lahan pertanian dan perkebunan 0,5 Ha dimiliki 20 % rumah tangga sebanyak 30 persen memiliki luas lahan 1 ha dan mereka yang memiliki luas lahan 1,5 Ha sebanyak 12 persen, sementara yang tidak mempunyai lahan pertanian dan perkebunan sebanyak 38 persen. Selain itu mereka pada umumnya memiliki rumah sebanyak 96 persen hanya 4 persen yang belum memiliki, mereka masih menumpang di rumah orang tuanya. Status kepemilikan dan penguasaan rumah pada umumnya merupakan rumah milik sendiri yang diperoleh dengan membeli atau warisan orang tua. Sementara itu rumah tangga juga banyak yang memiliki barang elektronik (tv, vcd, parabola) dan rumah tangga yang mempunyai barang perhiasan terutama di Kecamatan Bontomatene/Buki serta yang mempunyai kendaraan bermotor. Pada tahun 2008 di Pasimasunggu Timur yang mempunyai kendaraan bermotor naik menjadi 23 persen. Kenaikkan pemilikan kendaraan bermotor juga terjadi di Kecamatan Bontomatene/Buki.

Tabel 2.7. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemilikan Aset di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Daratan Kabupaten Selayar 2006 dan 2008

Jenis Pemilikan	PEMILIKAN ASET			
	Pasimasunggu Timur		Bontomatene/Buki	
	2006	2008	2006	2008
Tambak	11	12	-	-
Lahan pertanian	62	67	42	17
Rumah dan pekarangan	96	94	87	92
TV	32	29	48	57
VCD Player	6	9	37	39
Parabola	10	5	5	21
Perhiasan	48	59	68	72
Kendaraan Bermotor	15	23	58	67
Ternak (kerbau, kambing dan ayam)	36	32	36	38

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.





BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DAN PROGRAM PENYELAMATAN TERUMBU KARANG

3.1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah perairan laut dengan jarak di atas 12 mil adalah milik pemerintah pusat, sampai dengan 12 mil milik pemerintah provinsi, dan sepertiga dari wilayah provinsi, atau maksimal empat mil merupakan milik pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, wilayah pemerintah kabupaten/kota hanya meliputi wilayah perairan yang termasuk dalam kategori jalur penangkapan satu, dan sedikit masuk dalam jalur penangkapan dua.

Karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Pemda TK I Kabupaten Selayar hanya meliputi wilayah laut yang termasuk dalam kategori jalur satu dan sedikit jalur dua tersebut. Hal itu berbeda dengan kewenangan pemerintah provinsi yang meliputi semua jalur dua. Adapun kewenangan pemerintah pusat meliputi seluruh jalur tiga, yaitu berurusan dengan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas-batas ketentuan hukum laut internasional. Karena itu pengelolaan dan pengawasan terhadap operasionalisasi alat tangkap/perahu yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Selayar hanya terkait dengan jalur satu dan (sedikit) jalur dua.

Dalam prakteknya, pengawasan penggunaan peralatan tangkap di jalur satu dan dua itu sulit dilakukan oleh Pemda tingkat II Kabupaten Selayar. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya batas yang jelas di laut yang memisahkan antara jalur satu, dua dan seterusnya. Karena itu pelanggaran ketentuan jalur penangkapan sulit dideteksi, kecuali pelanggaran itu sudah masuk lebih dalam ke jalur satu. Untuk menindaklanjuti kebijakan pengelolaan tersebut di tingkat desa yang

menjadi lokasi Coremap di dua kecamatan penelitian (Bontomatene dan Pasimasunggu Timur) pada tahun 2005 telah dibentuk LPSTK (Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang), sebagai lembaga yang mengelola terumbu karang di sekitar desa agar tidak terjadi kerusakan terumbu karang. LPSTK ini memiliki tiga kelompok, yaitu kelompok konservasi, ekonomi dan perempuan. Meskipun demikian pada saat penelitian LPSTK belum berfungsi.

Untuk melindungi terumbu karang dan sumber daya laut yang lain dari kerusakan, masyarakat juga melarang penggunaan potasium dan pegeboman ikan. Karena itu jika mereka melihat ada penangkap sunu yang membawa kompresor masuk ke perairan dekat desa, mereka melaporkan ke kepala desa. Hal itu karena penggunaan kompresor merupakan indikasi dari penangkapan menggunakan potasium yang dilakukan sambil menyelam, dengan menggunakan kompresor tersebut. Sanksi yang diterapkan oleh desa biasanya adalah dalam bentuk pengusiran, agar tidak menggunakan kompresor di wilayah mereka.

Pemerintah Kabupaten Selayar sebetulnya tidak secara mutlak melarang penggunaan kompresor untuk alat Bantu penangkapan ikan. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemakaian Alat Bantu Tandan Alat Bantu Pengambilan Hasil Laut, khususnya dalam Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan bahwa kompresor dapat digunakan sebagai alat bantu penangkapan dan/ atau pengambilan hasil laut, setelah mendapatkan ijin dari Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Selayar. Itu berarti bahwa walaupun kompresor diperbolehkan untuk digunakan, namun harus disertai ijin terlebih dulu.

Surat Edaran Bupati Selayar Nomor 523.5/198/VI/2006/ Perikanan tanggal 5 Juni 2006 bahkan menyatakan bahwa penggunaan alat bantu kompresor sama sekali dilarang. Akan tetapi, dengan adanya Surat Edaran Nomor 70/SE/II/2007/DKP Perihal Penggunaan Kompresor untuk Pengambilan hasil laut, maka larangan itu kemudian tidak berlaku mutlak. Dalam SE Nomor 70 tersebut dinyatakan bahwa pemakaian kompresor dan slang itu diperbolehkan, tetapi hanya digunakan untuk:

1. Pengambilan teripang, mutiara, japing dan mabe
2. Penggunaan tersebut tidak boleh sebelum ada ijin dari DKP
3. DKP mengeluarkan ijin setelah sebelumnya ada rekomendasi lurah dan diketahui camat.

Selain Perda yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Selayar tersebut, untuk pengelolaan kelautan dan perikanan pemda sepenuhnya mengacu pada UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 31/2004 tersebut dinyatakan bahwa untuk mencegah sumberdaya laut dari kerusakan, karena laut merupakan habitat ikan untuk hidup dan mencari makan, maka:

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam pasal tersebut, dalam Pasal 84 Ayat (1) juga diatur sanksi pidana bagi pelanggarnya, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).”

Dalam UU Perikanan Nomor 31 tahun 2004 pasal 12 juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Adapun Pasal 13 dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan dan konservasi genetika ikan. Pengaturan tentang larangan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan untuk menangkap ikan juga dapat dilihat pada Surat Keputusan Dirjen Perikanan No. 1251/KPTS/KL420/II/1998 juga mengatur tentang Larangan Menggunakan Bahan Peledak, Racun, Obat Bius dan Bahan Kimia lainnya untuk Penangkapan Ikan.

Larangan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia dan bahan biologis, termasuk racun dan obat bius tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahan peledak, racun, obat bius dan bahan kimia yang digunakan untuk menangkap ikan dapat mengakibatkan matinya segala jenis ikan, termasuk ikan yang masih kecil-kecil. Karena itu jika tidak dilarang, dikhawatirkan dapat mengakibatkan kepunahan sumberdaya perikanan. Kedua, penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang, sebagai tempat ikan mencari makan. Jika kerusakan akibat bahan peledak berupa hancurnya terumbu karang, maka kerusakan akibat racun adalah memutihnya terumbu karang yang terkena racun, yang secara perlahan kemudian mati. Jika kerusakan yang diakibatkan oleh bahan peledak itu terjadi secara lokal, maka kerusakan yang disebabkan oleh racun itu terjadi secara meluas, karena racun terbawa oleh arus air.

Larangan penggunaan peralatan tangkap yang merusak juga mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980, tentang larangan penggunaan jaring trawl. Ada dua alasan mengapa jaring trawl itu dilarang untuk digunakan: pertama, dapat merusak lingkungan dasar laut, karena terkait besi pemberat yang diletakkan di ujung jarring; kedua, jaring trawl memiliki mata jaring yang sangat

kecil, sehingga hasilnya tidak dapat memilih obyek tangkapan. Akibatnya anak ikan yang kecil-kecil juga ikut tertangkap.

Berkaitan dengan ukuran mata jaring, Pemerintah Kabupaten Selayar juga mengacu Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor: 123/Kpts/Um/3/1975 tanggal 31 Maret tahun 1975, yaitu pemerintah melarang semua jaring yang ukuran mata jaringnya kurang dari 0,25 cm, dan *purse seine* cakalang (tuna) yang lebar mata jaringnya kurang dari 60 mm, untuk beroperasi di semua jalur.

Pemerintah Kabupaten Selayar menyadari bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi di wilayah laut mereka, sehingga mengakibatkan terdegradasinya lingkungan laut, dan mereka belum mampu mengatasinya. Menurut mereka, hal itu disebabkan keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, antara lain kurangnya tenaga lapangan yang bertugas mengawasi wilayah perairan, serta tidak adanya kapal patroli, baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun untuk mengejar pelaku pelanggaran. Tidak adanya prasarana itulah maka mereka hanya bertumpu pada penggunaan kapal tradisional untuk mengamankan wilayah laut, yaitu dengan menyewa dari nelayan, jika diperlukan.

Untuk mengatasi kendala dalam pengamanan lingkungan laut tersebut sebetulnya pemerintah pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000 telah mencanangkan dibentuknya sistem pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat (Siswasmas) melalui pembentukan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Beberapa pertimbangan penerapan Siswasmas adalah sebagai berikut. Pertama, wilayah perairan di Indonesia tergolong luas, dan permasalahan yang terjadi cukup kompleks. Kedua, keterbatasan jumlah personil yang harus melakukan pengawasan. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat pemerintah, baik dari Departemen Kelautan dan kelautan maupun dari aparat keamanan yang terkait. Tiga permasalahan tersebut menimbulkan akibat yang saling terkait, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Karena itu peran serta dari masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan pesisir sangat diperlukan.

Peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan, karena banyak masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, sehingga memungkinkan untuk mengawasi lingkungannya setiap saat. Karena itu jika mereka dilibatkan dalam pengawasan, maka terjadinya perusakan lingkungan dapat diketahui dengan lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu, mengacu pada pengalaman yang terjadi di beberapa tempat di daerah yang lain, beberapa komunitas terbukti telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan laut dan sumberdayanya secara tradisional. Sistem yang dikembangkan oleh beberapa komunitas masyarakat pesisir itu ternyata cukup bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan, dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian masyarakat pesisir merupakan potensi besar yang dapat diberdayakan untuk membantu tugas pemerintah dalam mengelola sumberdaya laut.

Walaupun Siswasmas tersebut sangat positif untuk melaksanakan pengamanan perairan laut, namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengaku bahwa sampai saat ini belum semua desa pantai sudah memiliki Pokmaswas. Itu berarti bahwa sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat itu belum diberlakukan sepenuhnya di daerah ini. Untuk melindungi sumberdaya yang ada di perairan pantai dari tangkap lebih (*over eksploitasi*), dan untuk melindungi nelayan tradisional dari persaingan penggunaan alat tangkap perikanan yang tidakimbang, pemerintah juga mengacu pada sistem zonasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392/Kpts/IK.120/4/99, yang mengatur pembagian wilayah tangkap perikanan sebagai tempat untuk mengoperasikan berbagai jenis alat tangkap yang berbeda. Dalam SK Menteri Pertanian tersebut kawasan laut dibagi menjadi tiga jalur penangkapan, yaitu:

1. Jalur penangkapan satu, meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai dengan enam mil laut. Jalur penangkapan satu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu: (1a) perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada

surut terendah sampai dengan tiga mil laut, dan (1b) perairan pantai di luar tiga mil laut sampai dengan enam mil laut;

2. Jalur penangkapan dua, meliputi jalur penangkapan di luar jalur satu sampai dengan 12 mil ke arah laut;
3. Jalur penangkapan tiga, meliputi perairan di luar jalur dua sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pada masing-masing jalur penangkapan ditentukan jenis alat tangkap yang diperbolehkan beroperasi. Pada jalur Ia misalnya, hanya boleh dioperasikan peralatan tangkap ikan yang menetap, alat tangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi, dan kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter. Pada jalur Ib, peralatan tangkap ikan yang diperbolehkan adalah: alat tangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi, kapal perikanan: tanpa motor dan/atau bermotor tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter; bermotor tempel dan bermotor dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 meter atau berukuran maksimal 5 GT; pukat cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 150 meter dan jaring insang hanyut (*drift gill net*) ukuran panjang maksimal 1000 meter. Peralatan tangkap yang boleh dioperasikan pada jalur II adalah: kapal perikanan bermotor dalam berukuran maksimal 60 GT dan kapal perikanan dengan alat tangkap: pukat (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 600 meter dengan cara pengoperasian menggunakan satu kapal yang bukan grup atau maksimal 1000 meter dengan cara pengoperasian menggunakan dua kapal ganda yang bukan grup, tuna *long line* dengan maksimal 1.200 buah mata pancing dan jaring insang hanyut (*drift gill net*) berukuran panjang maksimal 2.500 meter.

Adapun pada jalur III ketentuan pengoperasian alat tangkap adalah sebagai berikut: kapal perikanan berbendera Indonesia, berukuran maksimal 200 GT, kecuali menggunakan alat tangkap ikan *purse seine* pelagis besar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawu dilarang untuk semua ukuran. Di perairan ZEE I Selat Malaka, diperbolehkan bagi kapal perikanan berbendera

Indonesia dengan ukuran maksimal 2000 GT, kecuali menggunakan alat tangkap ikan pukat ikan (*fish net*) minimal berukuran 60 GT.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat suatu kawasan yang dijadikan taman nasional laut, yaitu Taka Bonerate, dengan luas 530.765 ha, berdasarkan Keputusan Menhut Nomor 92/KPTS-II/2001. Taman nasional ini terletak di Laut Flores, dengan pusat kegiatan berada di P.Tinabo. Di pulau ini terdapat pusat prasarana, antara lain wisma tamu, perahu Katamar dan kapal cepat dan kano. Karena Taka Bonerate mempunyai potensi untuk wisata bahari, pada saat ini sedang dibangun lapangan terbang dan pelabuhan laut. Pemerintah Daerah Selayar telah menempatkan Taman Nasional Taka Bonerate sebagai prioritas, karena pembangunan daerah ini akan banyak mendorong aktifitas ekonomi baik untuk Selayar sendiri maupun untuk Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, Pemda Selayar juga menaruh perhatian terhadap obyek wisata lain, seperti wisata Guang di Kecamatan Bontosikuyu, Gong Nekara di Kecamatan Bontoharu, air terjun Sutia di Barugayya, dan pantai Talloiya di Pamatata (Pemerintah Kabupaten Selayar. 2006 : 41).

Taman nasional laut adalah kawasan pelestarian alam laut yang mempunyai ekosistem asli, dan dikelola dengan sistem zonasi. Pemanfaatannya adalah untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi laut. Pengelolaan taman nasional laut dilakukan dengan membuat zonasi, yaitu membagi-bagi kawasan ke dalam beberapa zona, dan setiap zona hanya digunakan untuk jenis kegiatan tertentu. Tujuannya adalah agar berbagai kepentingan pemanfaatannya dapat berjalan selaras dan serasi. Secara garis besar taman nasional terdapat tiga zona, yaitu: zona inti, zona lindung dan zona pemanfaatan.

1. Zona inti: yaitu kawasan yang digunakan sebagai upaya pelestarian sumber genetik dan perlindungan proses ekologi, seperti perlindungan penyu, perlindungan ekosistem mangrove dan perlindungan ekosistem terumbu karang.
2. Zona lindung: yaitu kawasan yang digunakan untuk melindungi zona inti, karena merupakan satu kesatuan

ekosistem dengan zona inti, seperti tempat mencari makan, pembesaran dan perkembangbiakan jenis penyu. Di dalam zona ini dapat dilakukan pemanfaatan secara tidak langsung yaitu terhadap keberadaan daya tarik obyek wisata alam yang dapat dikunjungi secara terbatas. Kegiatan lain yang dapat dilakukan pada zona ini diarahkan pada kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu unsur penunjang budidaya melalui penelitian.

3. Zona pemanfaatan: yaitu kawasan yang disediakan untuk pengembangan rekreasi dan pariwisata, dan ditujukan untuk mengakomodasikan kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari. Pengembangan dan pembangunan sarana prasarana rekreasi dan pariwisata alam dapat dilakukan pada zona ini. Zona ini juga dapat digunakan untuk mendukung sosial ekonomi dan budaya masyarakat di dalam kawasan, seperti perikanan tangkap tradisional, budidaya dan sarana umum.

Dengan diterapkannya UU no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberi kewenangan pada daerah selain untuk melakukan eksplorasi juga konservasi di wilayah sejauh 4 mil atau sepertiga dari wilayah perairan laut provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Selayar juga memiliki rencana untuk membuat KKLD (Kawasan Konservasi laut Daerah). Tujuan ditetapkannya KKLD adalah untuk membangun keseragaman persepsi dan tindakan para pengambil keputusan, dalam menilai dan menetapkan areal yang dicadangkan sebagai kawasan konservasi laut daerah maupun lintas desa. Hal itu untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu agar kawasan laut yang dilindungi aman dari kerusakan, dan masyarakat masih dapat memanfaatkan sumberdaya laut di sekitarnya. Karena itu areal yang dipilih untuk dijadikan lokasi KKLD adalah areal yang memiliki daya dukung potensi sektor kelautan dan perikanan. Seperti halnya taman nasional, di dalam KKLD juga akan dibuat zonasi. Akan tetapi, saat ini KKLD itu masih dalam tahap perencanaan, bahkan draft Perdanya pun belum dibuat.

3.2. Program Penyelamatan Terumbu Karang

Program penyelamatan terumbu karang di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Project Management Unit (PMU) dengan dipimpin Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Struktur organisasi pengelolaan Coremap meliputi beberapa komponen yaitu : kesadaran masyarakat (*Public Awareness/PA*), pengelolaan berbasis masyarakat (*Community Based Management/CBM*), pengawasan (*monitoring, controlling and surveillance/MCS*) dan pusat informasi dan pelatihan (*coral reef information and training center/CRITICs*). Selain itu untuk menjalankan kegiatan pelestarian terumbu karang COREMAP juga melibatkan berbagai instansi terkait, seperti: Bappeda, Pemberdayaan Masyarakat, Kepolisian dan TNI-AL.

3.2.1. Pengelolaan dan Pelaksanaan/Kegiatan di Tingkat Kabupaten

Keberhasilan pelaksanaan program Coremap salah satunya ditentukan pemahaman pejabat dan pengelola Coremap di tingkat Kabupaten. Hal ini karena semua kebijakan yang berkaitan dengan program, termasuk kebijakan anggaran pembiayaan program tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Pemahaman tentang Coremap itu penting, karena proses, aturan dan mekanisme pelaksanaan program mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, dengan berbagai modifikasi sesuai dengan potensi sumber daya daerah dan aspirasi serta partisipasi masyarakat masing-masing daerah.

PIU/PMU di Kabupaten Selayar saat ini dipegang dan dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai *leading* kelembagaan, yang dibantu oleh pejabat di lingkungan DKP Kabupaten Selayar, yang mengendalikan komponen Coremap dalam pelaksanaan program Coremap. Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa pemahaman para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan program Coremap cukup memadai. Para pejabat di DKP, baik secara konseptual maupun terkait tujuan umum Coremap dalam penyelamatan terumbu karang, mereka menyadari bahwa wilayah

Selayar sebagian besar merupakan wilayah laut dengan potensi perikanan yang sangat besar, sehingga dirasakan penting penyelamatan terumbu karang dari usaha penggunaan bom dan potassium oleh nelayan. Hal itu karena terumbu karang merupakan tempat pemijahan ikan. Pemahaman pengelolaan terumbu karang yang berbasis masyarakat juga relatif baik. Meskipun demikian, Bupati maupun anggota DPR Daerah masih berpandangan bahwa Coremap itu sebagai “proyek” yang kelihatan (dapat diukur) hasilnya harus segera terlihat saat dana selesai dipertanggung-jawabkan. Padahal, program penyelamatan tertumbu karang hasilnya akan kelihatan setelah beberapa tahun ke depan.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, pelaksanaan Coremap masih sangat tergantung dari pemerintah pusat (DKP). Hal ini terlihat pada implementasi setiap tahapan program, yang masih menunggu turunnya dana/anggaran dari pemerintah pusat. Selain dana dari pusat, pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk implementasi Coremap melalui APBD pada Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP). Akibatnya kesibukan kegiatan Coremap terjadi pada bulan-bulan tertentu setelah turunnya dana dari pemerintah pusat dan anggaran APBD yang dikelola DKP Kabupaten Selayar. Meskipun demikian, karena ada pandangan pada beberapa pejabat di daerah bahwa pendekatan Coremap bukan program melainkan proyek, sementara hasil dari Coremap tidak selalu bisa dilihat secara fisik setiap akhir tahun anggaran, maka dana yang dialokasikan oleh daerah sebagai dana pendamping Coremap yang dari pusat yang diterima jumlahnya sangat kecil, dan dialokasikan terutama hanya untuk kegiatan yang hasilnya bisa dilihat secara fisik. Akibatnya, kegiatan-kegiatan yang tidak membawa hasil secara konkret, tidak didanai oleh daerah.

Pada saat ini Coremap di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar melingkupi 42 desa yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu: (1) Kecamatan Benteng, (2) Bontomatene, (3) Bontomanai, (4) Taka Bonerate, (5) Pasimasunggu, (6) Pasimasunggu Timur, (7) Pasimarannu, (8) Pasilambena, (9) Bontosikuyu dan (10) Kecamatan Bontoharu.

1. Penyadaran Masyarakat (*Public Awareness*)

Kegiatan penyadaran masyarakat dilakukan melalui delapan program, yaitu : (1) sosialisasi *public awareness*; (2) pembuatan poster, kaos, *billboard* dan kalender; (3) cerdas cermat untuk SMU sederajat, (4) penulisan karya ilmiah untuk SMU sederajat; (5) *jurnal writing* untuk para wartawan; (6) pelatihan penggunaan kurikulum SD – SMA yang dilakukan secara kontraktual; (7) percetakan buku muatan lokal; (8) pameran dan konas. Kegiatan sosialisasi Coremap telah dilaksanakan di semua lokasi Coremap yang berada di daratan pulau besar. Sedangkan sosialisasi di wilayah pulau-pulau kecil ditargetkan akan diselesaikan pada tahun 2008.

Sosialisasi di masyarakat sebagian dilakukan di aula desa/kantor desa dan melibatkan pokmas, LPSTK, warga masyarakat dan aparat desa. Dalam kenyataan program sosialisasi belum dirancang secara memadai sehingga hasilnya belum optimal. Salah satu kendala adalah keterbatasan dana. Sosialisasi ke pulau-pulau kecil juga mengalami kendala karena akses ke wilayah-wilayah tersebut hanya dapat dilakukan dengan perahu, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu untuk menghemat biaya pelaksanaan sosialisasi biasanya dilakukan bersama-sama dengan tim lain.

Beberapa kendala dihadapi tim sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain: keterbatasan materi sosialisasi, sementara diperlukan materi-materi baru yang menarik dan tidak membosankan. Selain itu, dalam Coremap terlalu banyak istilah-istilah asing yang sulit dimengerti, terutama oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan muatan lokal yang akan dilakukan secara kontraktual. Hal lain yang menjadi kendala yaitu kuota untuk pelatihan guru terlalu sedikit (SD=20 orang), sementara lokasi yang masuk coremap ada 42 desa. Jika satu desa diambil 1 guru saja, kuota tersebut belum mencukupi. Kendala lain adalah yang berasal dari masyarakat, yaitu rendahnya tingkat penerimaan masyarakat terhadap program yang dilakukan, terutama di pulau-pulau kecil.

2. Pengelolaan Berbasis Masyarakat (*Community Based Management*)

Pengelolaan berbasis masyarakat dilakukan agar masyarakat merasa ikut memiliki program Coremap. Dengan ikut memiliki, maka masyarakat bisa ikut berpartisipasi, sehingga dengan partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan program Coremap bisa lebih berhasil.

Agar pengelolaan berbasis masyarakat itu bisa berjalan dengan efektif, maka satu hal yang dilakukan oleh Coremap di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelamatan terumbu karang. Untuk itu maka disosialisasikan agar peralatan tangkap ikan yang digunakan masyarakat adalah peralatan tangkap yang ramah lingkungan. Dengan peralatan yang demikian maka kerusakan sumber daya (terumbu karang) dapat dicegah, sehingga diharapkan ikan yang berada di kawasan perairan itu semakin berkembang biak, sehingga dalam jangka panjang tingkat produktivitas nelayan akan semakin baik.

Pada saat penelitian dilakukan, sosialisasi oleh koordinator CBM di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilaksanakan kepada masyarakat di berbagai lokasi Coremap, yang tersebar di 42 desa. Meskipun demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh koordinator CBM kurang berjalan dengan lancar, karena SETO yang berkedudukan di kecamatan-kecamatan dan fasilitator yang ada di desa sering tidak berada di lokasi Coremap, terutama yang di pulau-pulau. Akibatnya berbagai informasi yang berkaitan dengan program Coremap tentang penyelamatan dan pelestarian terumbu karang, larangan penggunaan obat bius dan bom dan pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak sampai ke masyarakat, ataupun kalau sampai, penjelasannya tidak sampai tuntas.

Ada dua program yang dilakukan oleh Coremap di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung pengelolaan yang berbasis masyarakat, yaitu pemberian *village grant* dan matapecaharian alternatif. Semua itu dengan satu tujuan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan asumsi bahwa perusakan terumbu karang akan sulit dihindari jika kondisi

masyarakatnya masih miskin, karena dengan kemiskinan yang dialami maka masyarakat akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun dengan merusak lingkungan laut.

Village grant adalah dana yang digulirkan ke setiap desa Coremap, dengan jumlah Rp 50 juta per desa. Tujuannya adalah untuk memberi motivasi kepada masyarakat yang berada di desa-desa Coremap, agar mau berpartisipasi aktif mengawasi terumbu karang yang ada di sekitar desanya. Dana ini digulirkan hanya satu kali, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan desa, terutama yang terkait dengan prasarana fisik, seperti bangunan untuk memantau terumbu karang, pengadaan kapal patroli, termasuk untuk membangun fasilitas sosial desa dan MCK.

Pada saat penelitian dilakukan, jumlah desa Coremap yang ada di wilayah Kabupaten Selayar yang sudah mendapatkan *village grant* ada 26 desa. Jadi masih ada 16 desa yang belum mendapatkan dana ini. Meskipun demikian, karena dana yang dianggarkan untuk 44 desa, sedangkan jumlah desa Coremap semuanya ada 42 desa yang tersebar di 10 kecamatan, maka direncanakan ada 2 desa yang akan diberi dana *village grant* sebanyak dua kali, yaitu dua desa yang dianggap paling berhasil dalam melaksanakan kegiatan Coremap.

Selain *village grant*, untuk mendukung pengelolaan yang berbasis masyarakat, CBM Coremap juga memberikan dana simpan pinjam yang sifatnya dana bergulir, kepada masyarakat di lokasi Coremap, yang besarnya Rp 25 juta rupiah per tahun. Dana itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk kegiatan matapencarian alternatif. Dalam pelaksanaannya, dana itu dikelola oleh LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang dibentuk oleh masyarakat, yang statusnya di bawah koordinasi LPSTK. LKM inilah yang berhak menentukan siapa yang boleh meminjam dan bagaimana cara pengembaliannya, berdasarkan keputusan bersama dengan masyarakat. Dana pengembalian pinjaman dari masyarakat itu kemudian digulirkan lagi ke anggota masyarakat lain yang akan meminjam. Pada saat penelitian dilakukan, desa Coremap yang sudah menerima dana simpan pinjam baru sebanyak 24 desa. 18 Desa lainnya belum menerima, karena terlambat dalam mengajukan

proposal. Penyerahan dana simpan pinjam maupun *village grant* baru dilakukan oleh Coremap di wilayah Selayar pada pertengahan tahun 2008.

Untuk pengelolaan terumbu karang, CBM berusaha melibatkan masyarakat dalam membentuk DPL (daerah Perlindungan Laut), yaitu suatu kawasan perairan laut tertentu yang dilindungi, dan terdapat aturan-aturan tertentu dalam pemanfaatannya. Penentuan lokasi DPL diharapkan berasal dari masyarakat, begitu pula aturan-aturan yang mengatur pemanfaatannya, dan sanksi bagi para pelanggar aturan yang sudah disetujui bersama oleh masyarakat.

Dalam prakteknya, DPL yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, dengan difasilitasi oleh SETO dan fasilitator desa, kemudian diusulkan ke CBM, kemudian CBM memerintahkan kepada CRITIC untuk mensurvei lokasi yang diusulkan. Jika lokasi itu dianggap layak maka kemudian disetujui, kemudian oleh masyarakat dipasang rambu-rambu yang menandakan bahwa lokasi itu wilayah DPL, dan dibuat peta yang menggambarkan zonasi di wilayah DPL.

Tidak diperoleh data tentang jumlah desa Coremap yang sudah memiliki DPL. Namun yang jelas penentuan DPL saat ini mengalami kendala dalam kaitannya dengan pemasangan rambu-rambu. Hal itu karena dana yang dialokasikan oleh pusat untuk DPL itu harus disertai dengan dana pendamping dari APBD. Akan tetapi, oleh karena dana pendamping dari APBD pada tahun 2008 tidak tersedia, maka akibatnya adalah rambu-rambu untuk DPL itu tidak bisa dibuat. Sebagai solusinya pihak Coremap mengharapkan agar pengadaan rambu-rambu DPL itu dapat dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Akan tetapi, selain permasalahan dana yang tentunya juga akan memberatkan masyarakat setempat, sosialisasi bahwa rambu-rambu itu perlu dilakukan secara swadaya nampaknya belum sampai ke masyarakat, sehingga di beberapa desa, seperti di Pasimasunggu Timur, masyarakat masih setia menunggu dana dari Coremap untuk pengadaan rambu-rambu DPL.

Untuk mengefektifkan kinerja pengelolaan yang berbasis masyarakat, beberapa pelatihan telah diadakan pada tahun 2005, yaitu:

pelatihan ekologi terumbu karang, pelatihan budi daya laut dan pelatihan selam dan MPTK. Tujuan pelatihan ekologi terumbu karang adalah memberikan keterampilan kepada masyarakat agar mampu mengidentifikasi jenis-jenis karang, menyebarluaskan berbagai informasi tentang ekologi karang secara lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar mampu mengidentifikasi jenis-jenis karang, dan menyebarluaskan berbagai informasi tentang ekologi karang di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun materi yang diajarkan meliputi teknik budi daya rumput laut, teknik budidaya teripang, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan. Adapun pelatihan selam dan MPTK dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami metode penilaian terumbu karang, mengetahui teori dasar ekologi terumbu karang dan mengetahui teknik pemahaman dasar selam SCUBA.

3. Pengawasan (*Monitoring Controlling and Surveillance*)

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Coremap dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan di DPL, pengawasan dalam bentuk patroli di wilayah perairan desa-desa Coremap dan pengawasan dalam bentuk SISWASMAS (sistem pengawasan masyarakat).

Untuk kegiatan patroli, Coremap menyediakan empat kapal yang dikelola di empat UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan) yang terdapat di pulau-pulau, yaitu UPTD Pasimasunggu, UPTD Pasimasunggu Timur, UPTD Takabonerate dan UPTD Pasilambena. Kapal-kapal patroli tersebut berukuran panjang 15 meter dan lebar 2 meter, dan berkapasitas 5 GT. Selain itu kapal-kapal tersebut juga dilengkapi dengan teropong dan GPS.

Untuk biaya operasional, seperti pengadaan BBM untuk patroli, biayanya direncanakan dianggarkan dari APBD. Akan tetapi, karena biaya untuk operasional kapal-kapal tersebut pada tahun 2008 belum dianggarkan, maka biaya operasional direncanakan akan diambilkan dari dana *illegal fishing* dan *illegal logging* yang dianggarkan ke setiap desa oleh pemerintah Kabupaten, yang jumlahnya untuk masing-masing desa sebesar Rp 20 juta. Oleh karena kapal patroli

dikelola oleh UPTD yang berkedudukan di kecamatan, maka dalam satu kecamatan hanya terdapat satu kapal patroli. Satu kapal itulah yang mengawasi wilayah laut yang ada di seluruh desa Coremap yang ada di wilayah kecamatan itu, yang tentunya hal itu tidak efektif.

Di wilayah pulau-pulau yang lain di luar kecamatan tersebut tidak disediakan kapal patroli secara khusus, karena wilayah itu dianggap termasuk dalam rute pengawasan kapal patroli DKP. Untuk pengawasan di lokasi Coremap yang berada di wilayah daratan juga tidak disediakan kapal patroli khusus, melainkan patroli hanya dilakukan dengan cara menyewa kapal, yang dananya berasal dari APBD. Oleh karena itu patroli tidak dapat dilakukan secara kontinyu.

Menurut informasi dari Dinas Perikanan, kegiatan patroli hanya dilaksanakan jika diperlukan karena ada informasi dari masyarakat, atau jika sedang banyak terjadi kegiatan *illegal fishing*. Jika tidak, pengawasan umumnya hanya dilakukan satu tahun sekali, bersamaan dengan patroli yang dilakukan oleh pejabat DKP Kabupaten Kepulauan Selayar. Terbatasnya kegiatan patroli karena adanya berbagai kendala yang dihadapi, antara lain: terbatasnya anggaran, terbatasnya personil pengawasan dan terbatasnya sarana (kapal) untuk melakukan kegiatan pengawasan, sehingga PMU harus menyiasati dalam menggunakan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan di setiap lokasi Coremap. Personil yang melakukan pengawasan dibentuk dengan SK KPA /Kepala Dinas Kelautan dengan anggota 3 orang.

Untuk mengefektifkan kegiatan pengawasan sebetulnya keberadaan kapal patroli perlu diperbanyak. Berkaitan dengan itu maka pihak Coremap kabupaten menghimbau agar *village grant* yang diterima oleh desa-desa Coremap sebagian dialokasikan untuk pembuatan kapal patroli, sehingga bisa digunakan untuk melakukan pengawasan di DPL masing-masing. Akan tetapi, hal itu sifatnya hanya himbauan, karena pada dasarnya *village grant* itu bisa digunakan untuk membangun prasarana apapun yang ada di desa, tergantung keputusan masyarakat desa itu. Oleh karena itu penggunaan *village grant* ada yang digunakan untuk membuat pagar pasar desa agar sapi-sapi di Desa Bungaiya tidak dapat masuk

kompleks pasar. Karena itulah tidak semua desa Coremap mengalokasikan *village grant* yang diterima untuk membuat kapal patroli. Bagi yang tidak memiliki kapal patroli, kegiatan pengawasan lebih mengandalkan pada kapal patroli yang dimiliki oleh UPTD yang ada di kecamatan.

Selain patroli, kegiatan pengawasan juga dilakukan melalui Siswasmas (sistem pengawasan masyarakat), dengan pembentukan Pokwasmas (kelompok masyarakat pengawas). Akan tetapi, pembentukan siswasmas itu sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, karena Siswasmas ini sebenarnya bukan program Coremap melainkan program Departemen Kelautan dan Perikanan. Karena itu tidak semua lokasi Coremap terdapat Siswasmas, karena Siswasmas itu tidak dibiayai oleh Coremap ataupun DKP, melainkan biayanya berasal dari swadaya masyarakat dan desa.

Siswasmas ini dimaksudkan untuk mendukung keberadaan sistem pengelolaan terpadu yang berbasis masyarakat, yang mengacu pada program dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2000. Beberapa pertimbangan penerapan Siswasmas adalah sebagai berikut. Pertama, wilayah perairan yang tergolong luas, dan permasalahan yang terjadi cukup kompleks. Kedua, keterbatasan jumlah personil yang harus melakukan pengawasan. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat pemerintah, baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan maupun dari aparat keamanan yang terkait. Tiga permasalahan tersebut menimbulkan akibat yang saling terkait, sehingga pengawasan yang dilakukan kurang optimal. Karena itu peran serta dari masyarakat dalam melakukan pengawasan lingkungan pesisir sangat diperlukan.

Peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan, karena banyak masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, sehingga memungkinkan untuk mengawasi lingkungannya setiap saat. Karena itu jika mereka dilibatkan dalam pengawasan, maka terjadinya perusakan lingkungan dapat diketahui dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Selain itu, mengacu pada pengalaman yang terjadi di beberapa tempat di daerah yang lain, beberapa komunitas terbukti telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan laut dan sumber daya secara tradisional. Sistem yang dikembangkan oleh beberapa komunitas masyarakat pesisir itu ternyata cukup bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan, dan pengawasan terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan demikian bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, masyarakat pesisir merupakan potensi besar yang dapat diberdayakan untuk membantu tugas pemerintah dalam mengelola sumber daya laut. Dengan demikian Siswasmas dianggap perlu untuk dilakukan, dengan cara pemberdayaan masyarakat pantai untuk melakukan pengawasan sumber daya pesisir yang ada di sekitarnya. Dengan partisipasi masyarakat dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya pesisir, diharapkan beban pemerintah menjadi berkurang, dan perusakan sumber daya kelautan dapat diminimalisasi.

Sesuai dengan namanya, Siswasmas memiliki tugas untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang ada di laut, baik berupa penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penangkapan jenis sumber daya yang dilindungi, maupun pelanggaran aturan-aturan yang lain, seperti pelanggaran zonasi penangkapan dan pencurian ikan oleh nelayan asing. Kelompok pengawasan itu selain terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, juga dilengkapi dengan seksi-seksi, seperti: seksi data dan informasi, seksi pengembangan usaha dan SDM, seksi pengawasan dan keamanan dan seksi manajemen dan organisasi.

Dalam prakteknya, kelompok pengawasan itu tidak harus melakukan penjagaan kawasan pesisir secara khusus, seperti melakukan patroli laut, melainkan melakukan tindakan tertentu jika kebetulan ada yang melihat terjadinya pelanggaran. Untuk itu mereka dapat menegur langsung pelaku pelanggaran, atau melaporkannya kepada aparat terkait.

Untuk mengefektifkan kegiatan MCS, juga diadakan pelatihan yang diadakan pada tahun 2005, pelatihan "*Investigasi Destructif*

fishing” yang diikuti oleh fasilitator dan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk melakukan gerakan penekanan terhadap tindakan *destructive fishing*. Dalam pelatihan itu diajarkan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait *destructive fishing*, strategi penanganan kasus *destructive fishing*, metode pembuktian cirri-ciri fisik (organ dalam dan organ luar organisme yang ditangkap dengan menggunakan bom dan bahan kimia).

Selain pelatihan tersebut, dua jenis pelatihan lainnya juga pernah diadakan pada tahun 2005, yaitu: pelatihan operator dan perawatan kapal dan pelatihan monitoring ekosistem terumbu karang. Pelatihan operator dan perawatan kapal dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang sistem pengoperasian dan perawatan mesin kapal yang efektif dan efisien. Materi yang diajarkan adalah pengenalan GPS dan aplikasinya, serta perawatan kapal dan navigasi kelautan. Adapun pelatihan monitoring ekosistem terumbu karang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan personel yang terlibat dalam monitoring ekosistem terumbu karang di seluruh wilayah program Coremap II Kabupaten Kepulauan Selayar. Materi yang diajarkan adalah metode *reef check*, pengenalan alat dasar selam dan kondisi terumbu karang di wilayah kabupaten Selayar.

4. Coral Reef Information and Training Center (CRITC)

Kegiatan yang dilakukan CRITC berkaitan dengan penelitian dan pengkajian. Selama ini ada pembuatan data base secara berkala 1 tahun sekali yaitu pendataan karang, bentos dan ikan. Data *Creel* dilakukan setiap 19 bulan dengan cara mengambil hasil tangkapan nelayan selama 1 bulan. Pada bulan I diambil hasil tangkapan 1 bulan penuh, sedangkan pada bulan ke-2 s.d. 19 diambil tangkapan 3 kali dalam 1 bulan. Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh ombak terhadap hasil tangkapan, apakah ada pengaruh kegiatan sosial (pesta, dll) terhadap hasil tangkapan nelayan. Data diambil dari ikan yang mendarat di desa. Kelemahan dari metode ini

adalah jika ada masyarakat yang menjual hasil tangkapannya ke kota/luar desa, maka tidak dapat terdata.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah pelatihan MPTK (metode penelitian terumbu karang), pemantauan terumbu karang berbasis masyarakat, metode penilaian terumbu karang di luar *lead*, dan pelatihan selam. MPTK dilakukan pada tahun 2006 dan 2007 sebanyak 2 kali dengan peserta pelatihan dari PMU 3 orang, CRITIC 1 orang dan staf pendukung 2 orang. Pemateri berasal dari LIPI dan universitas di Makasar. Pelatihan metode penilaian terumbu karang belum dilakukan, dan direncanakan akan dilakukan pada tahun 2008. Pelatihan akan dilakukan dengan menggunakan metode RRA, dengan peserta 2 orang anggota LPSTK dari setiap desa Coremap.

3.2.2. Pengelolaan dan Pelaksanaan di Tingkat Desa

Untuk keberhasilan program Coremap, pemerintah melakukan pendekatan partisipatif, yang berarti melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Coremap. Berkaitan dengan itu, di tingkat desa dibentuk Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK), yang kemudian membentuk 3 Pokmas, yaitu: Pokmas Koservasi/perlindungan terumbu karang, Pokmas Jender (Perempuan) dan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Untuk mencapai keberhasilan program tersebut LPSTK dibantu oleh SETO, fasilitator dan motivator.

Kelembagaan di lokasi

1. LPSTK

Di Desa Bontobulaeng dan Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu pembentukan LPSTK dilakukan pada tahun 2005. Untuk membentuk LPSTK sebelumnya diadakan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang dan pentingnya LPSTK, yang dilakukan oleh Coremap. Ketua dan pengurus LPSTK dipilih melalui rapat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti tetua desa, pemerintah desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang diprakarsai oleh fasilitator. Ketua LPSTK dipilih oleh masyarakat yang hadir

dalam rapat. Karena tidak semua warga diikutsertakan hadir dalam rapat, maka bisa dikatakan bahwa penentuan pengurus LPSTK itu kurang mencerminkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pengurus LPSTK terdiri dari tiga komponen, yaitu unsur pemerintah desa, unsur masyarakat dan unsur Coremap, yang diwakili oleh fasilitator. Untuk meningkatkan kemampuan pengurus LPSTK, ketua LPSTK telah dikirim mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan terumbu karang dan pentingnya melestarikan terumbu karang, yang diadakan oleh DKP dan diikuti oleh seluruh ketua LPSTK yang ada di Kabupaten Selayar.

LPSTK di dua desa dengan bimbingan fasilitator telah mengembangkan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), yaitu menentukan daerah perlindungan laut (DPL) dan rencana pengelolaan yang dilakukan. Walaupun RPTK sudah dibentuk, namun belum disahkan melalui peraturan desa (perdes), karena masih menunggu diperiksa oleh Coremap di Kabupaten. DPL di desa Bontobulaeng di timur Pulau Batu, yaitu di Ujung Pandang, dan DPL desa Bontobaru di sebelah barat pulau batu yaitu di *taka* "Bakka". Walaupun DPL sudah ditentukan, namun peta DPL serta tanda batas DPL di masing-masing desa belum dibuat. Menurut pengurus LPSTK, mereka masih menunggu bantuan dana untuk pembuatan batas dan pembuatan peta dari Coremap kabupaten. Padahal, menurut informasi dari pihak kabupaten, Pemerintah Kabupaten Selayar tidak menyediakan dana pendamping untuk pembuatan DPL, sehingga pembuatan tanda batas dan peta itu harus dilakukan secara swasembada oleh masyarakat. Masalahnya kemudian adalah informasi seperti itu ternyata tidak pernah diketahui oleh pengurus LPSTK, sehingga mereka tetap menunggu datangnya bantuan dari Coremap. Jika demikian, yang terjadi kemudian adalah saling menunggu, sehingga dikhawatirkan pemasangan tanda batas DPL dan peta DPL itu tidak akan pernah terwujud.

Selain permasalahan tersebut, sebetulnya apa yang dimaksud dengan DPL oleh pengurus LPSTK dari dua desa itu belum pernah disurvei oleh CRITC Coremap. Padahal, prosedurnya adalah usulan masyarakat itu kemudian disurvei oleh CRITICs, dan jika dianggap

layak, maka kemudian CRITIC merekomendasikan untuk dibuatkan Perdes. Sebaliknya jika dianggap tidak layak, maka CRITICs akan merekomendasikan lokasi lain untuk DPL, supaya bisa dimintakan persetujuan dengan masyarakat. Dengan demikian apa yang disebut sebagai kawasan DPL oleh Desa Bonto Baru dan Bonto Bulaeng itu sebetulnya masih dalam perencanaan, dan masih membutuhkan waktu yang lama untuk terealisasi menjadi DPL yang sebenarnya.

Pada saat ini LPSTK di dua desa telah mendapatkan bantuan dana dari Coremap, yaitu masing-masing sebesar Rp 10 juta untuk pembuatan pondok informasi, dan dana “*village grant*” masing-masing sebesar Rp 50 juta.

Dengan bantuan dana Rp 10 juta itu maka LPSTK menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membangun pondok informasi, yang dibangun pada tahun 2006. Pondok informasi Coremap di masing-masing desa menempati sebagian dari kantor Desa, dengan membuat sekat dari ruangan yang sudah ada. Dengan demikian pondok informasi itu seperti bangunan yang tak terpisahkan dari kantor desa. Permasalahannya adalah pondok informasi itu tidak hanya digunakan untuk kantor Coremap, tetapi sekaligus digunakan sebagai bagian dari kantor desa. Di Bonto Bulaeng misalnya, oleh karena sekretaris Desa sekaligus merangkap sebagai sekretaris Coremap, maka kegiatan sebagai sekretaris desa juga dilakukan di pondok informasi, sehingga di pondok informasi tidak hanya terdapat dokumen Coremap, tetapi sekaligus juga dokumen -dokumen desa. Dokumen yang ada di pondok informasi saat ini tidak lengkap, hanya berupa alat peraga dan beberapa buku Coremap. Perabotan kerja yang ada di setiap pondok informasi sangat terbatas, yaitu hanya satu meja, beberapa kursi dan satu almari.

Dana “*village grant*” yang telah diterima oleh LPSTK desa Bontobaru dan Bonto Bulaeng masing-masing sebesar Rp 50 juta, yang diterima pada bulan Desember 2007. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, dana *village grant* di Bonto Baru digunakan untuk mengembangkan fasilitas TPA (tempat pendidikan Al-Qur’an) sebesar Rp 22 juta, pembuatan turap (penangkal ombak) sebesar Rp 25 juta dan pembuatan pipa air minum sebesar Rp 3 juta. Adapun dana *village*

grant di Desa Bonto Bulaeng sebesar Rp 25 juta digunakan untuk pembuatan 5 buah MCK yang tersebar di empat dusun (masing-masing 1 di Dusun Mare Utara, Dusun Ujung dan Dusun Pandang, serta 2 di Dusun Mare Selatan), dan pembuatan drainase sepanjang 205 m dan 50 meter sebesar Rp 25 juta. Pembuatan drainase dilakukan di dusun Pandang, dengan maksud agar air hujan dapat dialirkan menuju sungai, yang selanjutnya mengalir ke laut. Adapun pembuatan MCK karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di dusun-dusun tersebut belum memiliki MCK, sehingga sebagian besar penduduk di wilayah itu membuang air besar di pinggir pantai atau di kebun.

Di Desa Bonto Baru, selain dana *village grant* juga sudah menerima dana “simpan pinjam” sebesar Rp 25 juta. Adapun di Desa Bontobulaeng dana simpan pinjam belum diterima, karena LPSTK terlambat mengajukan proposal. Karena itu sampai saat penelitian dilakukan di Desa Bonto Bulaeng tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan simpan pinjam. Di Desa Bonto Baru, dana “simpan pinjam” (*seed fund*) yang sudah diterima oleh LPSTK itu dikelola oleh LKM (lembaga keuangan mikro) yang dibentuk oleh LPSTK. Dengan demikian pertanggungjawaban dana bergulir itu langsung kepada ketua LPSTK. Oleh LKM dana simpan pinjam itu kemudian digulirkan kepada anggota Pokmas yang membutuhkan, dengan jumlah pinjaman maksimum sebesar Rp 1 juta. Berdasarkan kesepakatan dengan para anggota Pokmas, ditentukan bahwa setiap peminjam harus memberikan jaminan, baik berupa emas atau barang lainnya. Jaminan itu tidak diserahkan ke pengurus LKM, namun tetap disimpan oleh peminjam. Jika sewaktu-waktu peminjam tidak bisa membayar hutangnya, maka barang yang dijaminan itu harus diserahkan kepada LKM. Menurut informasi, jaminan terbanyak umumnya adalah berupa emas.

Aturan yang disepakati bersama juga menentukan bahwa pinjaman harus dibayar lunas dalam waktu 10 bulan, dengan bunga pinjaman sebesar 2,5% per bulan, dan dihitung secara menurun. Dengan demikian jika seorang anggota pokmas meminjam uang Rp 1 juta, maka setiap bulannya harus mengangsur Rp 100 ribu, ditambah

dengan bunganya. Karena bunga yang dibebankan adalah bunga berdasarkan sisa pinjaman, maka jika pada angsuran pertama bunga yang harus dibayar sebesar Rp 25 ribu, bulan selanjutnya berturut-turut bunganya berkurang Rp 2.500,- per bulan. Gambaran tentang sistem pengembalian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Pengembalian Dana Pinjaman

<i>Besar Pinjaman (Rp)</i>	<i>Angsuran ke</i>	<i>Angsuran per bulan (Rp)</i>	<i>Bunga yang harus dibayar per bulan (Rp)</i>	<i>Jumlah yang harus dibayar per bulan (Rp)</i>
1000.000,-	1	100.000,-	25.000,-	125.000,-
	2	100.000,-	22.500,-	122.500,-
	3	100.000,-	20.000,-	120.000,-
	4	100.000,-	17.500,-	117.500,-
	5	100.000,-	15.000,-	115.000,-
	6	100.000,-	12.500,-	112.500,-
	7	100.000,-	10.000,-	110.000,-
	8	100.000,-	7.500,-	107.500,-
	9	100.000,-	5.000,-	105.000,-
	10	100.000,-	2.500,-	102.500,-
Jumlah		1.000.000,-	137.500,-	1.137.500,-

Kegiatan simpan pinjam di desa Bontobaru pada umumnya digunakan untuk membeli alat tangkap (jaring) dan kegiatan produktif yang berkaitan dengan kenelayanan. Karena jumlah dana yang terbatas, maka tidak semua anggota pokmas bisa memperoleh pinjaman. Prioritas pinjaman diberikan pada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pengurus.

Dalam pelaksanaan program Coremap di setiap desa, kegiatan masih didominasi pengurus LPSTK, terutama oleh Ketua LPSTK dan Sekretaris, sehingga lembaga ini menjadi sangat sentralistik, dan sebagian pengurus dan pokmas yang ada tidak pernah dilibatkan. Selain itu, transparansi bantuan kegiatan (kegiatan fisik) juga tidak jelas. Proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh ketua kepada Pokmas-Pokmas dan masyarakat masih sangat kurang. Kurangnya komunikasi dalam menyampaikan informasi program dan kegiatan Coremap seringkali menimbulkan kecurigaan kepada ketua Coremap tentang adanya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran Coremap.

Pada saat ini LPSTK bisa dikatakan tidak ada kegiatan. Rapat-rapat anggota LPSTK sama sekali tidak pernah dilakukan, kecuali pada saat akan mendistribusikan bantuan. Menurut pengurusnya, hal itu karena mereka tidak memiliki dana untuk melakukan kegiatan operasional. Padahal, menurut mereka, dana itu sangat dibutuhkan, baik untuk keperluan beli makanan dan minuman untuk rapat maupun untuk membeli peralatan tulis. Ketiadaan dana operasional itu terjadi karena dari Coremap tidak dianggarkan dana untuk LPSTK. Selain itu, pasifnya LPSTK mengadakan rapat adalah karena fasilitator dan SETO jarang ada di wilayah mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dibicarakan, apalagi tidak semua Ketua LPSTK adalah nelayan.

Ketidakhadiran Seto, fasilitator, kurang berjalannya LPSTK dan pokmas-pokmas, tidak efektifnya memanfaatkan pondok informasi, dan tidak berjalannya motivator perlu mendapat perhatian para pengelola Coremap di tingkat Kabupaten. Para pengurus LPSTK dan pokmas di lokasi (Bontobulaeng dan Bontobaru) serta tokoh masyarakat banyak yang tidak puas dengan kinerja fasilitator, karena itu banyak para pengurus pokmas dan masyarakat yang menginginkan adanya penggantian Seto dan fasilitator agar program Coremap dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan.

Program Coremap yang utama adalah menyelamatkan terumbu karang, mengurangi penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan menciptakan pendapatan alternatif. Untuk menyelamatkan terumbu karang dan *illegal fishing* diperlukan sarana bantu, yaitu kapal untuk patroli. Pada saat penelitian dilakukan, kapal patroli itu belum ada.

Menurut informasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Pasimasunggu Timur dan Ketua LPSTK Desa Bontobulaeng, saat ini kapal untuk keperluan pengawasan pelestarian terumbu karang dan *illegal fishing* di kawasan Pasimasunggu Timur sudah diberikan Coremap dan dikelola oleh UPTD Perikanan. Akan tetapi, kapal itu belum dapat dioperasionalkan, karena masih dalam tahap penyelesaian. Anggaran untuk pembuatan kapal itu dikeluarkan oleh Coremap, sebesar Rp 80 juta yang dikerjakan oleh H. Rauf,

pembuat kapal (*jolor*) di desa Bontobaru. Oleh karena dari Coremap tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk mengoperasikan kapal, maka belum ada kepastian anggaran operasional kapal. Akan tetapi, direncanakan anggaran itu akan diambilkan dari dana *illegal fishing* dan *illegal logging* yang diberikan kepada setiap desa, yang jumlahnya masing-masing desa sebesar Rp. 20 juta. Oleh karena dalam satu kecamatan kapal untuk patroli itu hanya satu, dan dikelola oleh UPTD, maka dalam prakteknya pengoperasian kapal dapat disesuaikan dengan keperluan masing-masing desa Coremap.

Pembentukan LPSTK di dua desa (Desa Bungaiya dan Desa Buki) dilakukan sekitar tiga tahun yang lalu, tepatnya tahun 2005.⁴ Kegiatan coremap baru aktif dilakukan selama 3 bulan sebelum penelitian ini dilakukan, sehingga sebelum kegiatan tersebut hampir semua LPSTK tidak ada kegiatan. Masyarakat bahkan mulai tidak percaya lagi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Coremap. Pada dasarnya pembentukan LPSTK di dua kecamatan ini sama dengan yang dilakukan di pulau kecil. Ketua, pengurus dan staf LPSTK dipilih oleh seto, pokmas, tokoh-tokoh masyarakat seperti tetua desa, pemerintah desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) yang difasilitasi oleh fasilitator. Musyawarah dipimpin oleh Kades kemudian masyarakat mengajukan calon untuk dipilih. Calon yang mempunyai suara terbanyak akhirnya menjadi ketua LPSTK.

Setelah terbentuk, LPSTK kemudian mempunyai tugas untuk membuat rencana pengelolaan sumber daya terumbu karang. Ketua LPSTK membuat forum-forum musyawarah menampung usulan masyarakat untuk pembuatan RPTK. Usulan tersebut kemudian diserahkan ke fasilitator untuk disusun dan dimusyawarahkan kembali. Pembahasan ulang dilakukan dengan dihadiri oleh SETO, fasilitator, kades, Kadus dan Pokmas. Usulan RPTK pada waktu itu telah terbentuk dan disetujui bersama. Desa Bungaiya mengusulkan

⁴ Kecamatan Buki pada awalnya merupakan salah satu desa di Kecamatan Bontomatene, tetapi pada tahun 2007 Desa Buki menjadi kecamatan sendiri, yaitu Kecamatan Buki yang terdiri dari 5 desa. LPSTK dua kecamatan ini berada di desa Buki (Kecamatan Buki) dan Desa Bungaiya (Kecamatan Bontomatene).

rehab balai pertemuan, rehab masjid dan pembuatan pagar pasar desa. Usulan yang disetujui adalah pembuatan pagar pasar dan pembuatan WC umum sebanyak 5 unit. Desa Buki usulan yang diterima adalah pembuatan monumen, WC keluarga dan jolor. Selain itu dalam RPTK juga disetujui lokasi DPL yang akan dibuat, meskipun sampai saat ini belum ada yang terealisasi. Hanya saja pemahaman ketua LPSTK di kedua desa terhadap RPTK yang telah disetujui masih rendah bahkan terkesan kurang mengerti. Saat ini kedua LPSTK kurang dapat berfungsi karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ketua LPSTK di Buki bahkan telah mengundurkan diri mulai tahun 2007. Ketua LPSTK Bungaiya sibuk dengan kegiatan dagang tembakau di pasar.

Pondok informasi Coremap di Buki dan Bungaiya juga diadakan pada tahun 2006 dan masing-masing menempati gedung milik desa. Pembentukan pondok informasi di Bungaiya memerlukan biaya sekitar 10 juta yang digunakan untuk rehab bangunan dan kontrak selama 10 tahun. Pondok informasi di Buki juga menempati bangunan milik desa yang lokasinya dekat dengan pantai. Dana yang digunakan untuk rehab bangunan ini mencapai Rp 10 juta. Kedua bangunan kurang berfungsi sebagai pusat informasi karena minimnya materi yang ada di pondok informasi. Materi dan alat peraga yang tersedia di Buki tampak lebih lengkap dibandingkan dengan di Bungaiya. Meskipun demikian, kedua pondok tampaknya masih sedikit yang mendatangi karena keterbatasan informasi yang tersedia dan kurangnya minat masyarakat terhadap pondok informasi. Pengurus pondok informasi juga tidak mempunyai program kegiatan dan sasaran khalayak informasi. Pos pengawasan di kedua desa juga belum dibangun karena selama ini kegiatan pengawasan memang belum dapat berjalan secara optimal.

LPSTK di desa Bungaiya telah menerima dana *village grant* sebesar Rp 50 juta yang digunakan untuk pembangunan lunit pagar desa dan 5 unit WC umum. Pagar pasar desa dimaksudkan untuk melindungi pasar dari hewan ternak yang dilepas oleh masyarakat setempat. Secara umum manfaat pagar bagi warga sebenarnya kurang besar, tetapi usulan tersebut tetap dilakukan karena sudah menjadi

kesepakatan masyarakat. Perlindungan pada ternak semestinya juga melibatkan peternak sebagai pemilik sehingga tidak merugikan orang lain. Dana tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang lebih bermanfaat. WC umum juga menjadi usulan warga mengingat selama ini sebagian besar warga masih belum memiliki tempat untuk membuang air besar. Akan tetapi pemanfaatan WC sendiri ternyata juga kurang karena tidak tersedia air yang cukup dan terletak di depan rumah salah satu warga. Pemanfaat WC biasanya hanya terbatas pada warga terdekat bahkan hanya pemilik kebun sendiri.

Desa Buki juga menerima *village grant* sebesar Rp 50 juta yang digunakan untuk pembuatan 1 unit kapal *jolor*, rehab 4 unit masjid dan 20 unit WC keluarga. Rumah tangga yang mendapat bantuan pembuatan WC sebanyak 40 KK, masing-masing diberikan dalam bentuk material (3 sak semen, 0,5 kubik pasir dan 100 batako). Senilai Rp 500 ribu. Masing-masing KK diwajibkan melengkapi bahan-bahan yang masing kurang sesuai dengan WC yang diinginkan. Saat ini 90 persen penerima telah menyelesaikan pembuatan WC tersebut. Bantuan akan dipindahkan ke warga lain jika penerima tidak menyelesaikan pembangunan WC sesuai yang dijanjikan sebelumnya. *Jolor* dibuat sendiri oleh tukang di desa, sehingga kapal tersebut mempunyai kekuatan yang tidak diragukan lagi. Saat penelitian sedang dilakukan, *jolor* masih dalam proses pembuatan. Pengurus desa merencanakan untuk menggunakan *jolor* sebagai salah satu alat pemantauan dan pengawasan penyelamatan terumbu karang.

Pengurus LPSTK di kedua lokasi tampaknya tidak dapat menjalankan kegiatan secara aktif karena secara substansi mereka tidak menguasai materi, karena bukan nelayan. Selain itu, pengurus LPSTK merupakan orang-orang yang banyak memiliki kegiatan ekonomi rumah tangga masing-masing. Waktu yang tersedia untuk kegiatan Coremap hampir tidak ada, bahkan saat ini ketua LPSTK di Buki telah mengundurkan diri dengan alasan tertentu terkait pelaksanaan pembuatan WC. Pelaksanaan program Coremap yang berjalan sangat lambat tampaknya juga berpengaruh pada semangat para pengurus di tingkat desa. Selama 2 tahun setelah terbentuk,

hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Coremap di tingkat desa sampai akhirnya turun dana *village grant* dan *seed fund*. Selama waktu menunggu tersebut banyak masyarakat dan pengurus desa yang telah melupakan program coremap. Ketidakaktifan pengurus coremap di tingkat desa tidak hanya terjadi pada pengurus LPSTK tetapi juga pada motivator desa. Minimnya pengetahuan dan kegiatan di tingkat desa mengakibatkan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Kegiatan sosialisasi yang semestinya dapat dilakukan secara informal juga belum dapat dilakukan secara optimal karena pengetahuan masyarakat terhadap program Coremap masih rendah.

Peran aparat desa yang cukup kuat tampaknya juga menjadi kendala bagi pelaksanaan Coremap, terutama di Desa Bungaiya. Seorang fasilitator desa terpaksa harus dipindahtugaskan ke desa lain, karena beda pendapat dengan aparat desa. Pemerintah desa belum sepenuhnya dapat menjadi mitra kerja Coremap di tingkat desa, karena dana Rp 20 juta dari kabupaten yang rencananya untuk menunjang kegiatan pengawasan belum digunakan sebagaimana mestinya.

2. Pokmas

Kelembagaan lain yang sudah ada di Desa Bonto Bulaeng dan Bonto Baru adalah pokmas, yang di masing-masing desa terdiri dari pokmas konservasi, pokmas ekonomi produktif dan pokmas perempuan. Di desa Bonto Baru masing-masing pokmas terdiri dari dua kelompok, sehingga ada dua pokmas konservasi, dua pokmas ekonomi produktif dan dua pokmas perempuan. Seluruh pokmas tersebut berada di bawah LPSTK, dan pembentukannya dilakukan oleh LPSTK dengan dibantu oleh fasilitator. Pokmas yang dibentuk itu kemudian ditetapkan oleh pemerintah desa dan diusulkan keberadaannya kepada Coremap Kabupaten Selayar.

Perekrutan anggota Pokmas di dua desa dilakukan melalui penunjukan yang dilakukan oleh pengurus LPSTK dan fasilitator. Sesudah seseorang ditunjuk menjadi anggota pokmas, yang

bersangkutan kemudian diberi tahu keanggotaannya, dan dalam kelompok apa menjadi anggota; walaupun yang bersangkutan bisa menolak untuk dijadikan anggota, atau mau menjadi anggota namun minta dimasukkan dalam pokmas yang lain. Jika orang yang ditunjuk menolak, maka digantikan oleh orang lain.

Kebijakan yang diambil di dua desa dalam perekrutan anggota pokmas adalah sebagai berikut. Anggota pokmas konservasi diambilkan dari para nelayan, karena nelayan dianggap yang paling berkepentingan terhadap masalah konservasi terumbu karang. Anggota pokmas ekonomi produktif diambilkan dari para pedagang kecil, karena latar belakang sebagai pedagang kecil dianggap sangat berkepentingan terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif. Adapun pokmas perempuan anggotanya diambilkan dari ibu-ibu rumah tangga.

Keberhasilan Pokmas sebetulnya sangat tergantung dari pemahaman tentang tujuan program Coremap. Masalahnya kemudian adalah pemahaman terhadap program dan tujuan Coremap oleh anggota pokmas itu masih sangat terbatas, sama halnya dengan masyarakat umum, yang tidak mengetahui tujuan dan kegiatan Coremap di desanya, kecuali hanya tahu bahwa di desanya ada Coremap. Hal ini karena sosialisasi tentang tujuan Coremap kurang berjalan dengan baik.

Pokmas-Pokmas yang berada di dua desa tersebut sampai sekarang belum memiliki program untuk kelompoknya. Hal itu disebabkan anggota Pokmas pada umumnya tidak mengetahui secara jelas tujuan dibentuknya pokmas, sehingga belum tahu apa yang harus dilakukan. Hal itu diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari fasilitator terhadap pokmas. Umumnya masyarakat mau menjadi anggota pokmas karena mengharapkan bisa mendapatkan bantuan dana dari Coremap. Meskipun demikian, sampai kajian dilakukan, ternyata bantuan kepada pokmas belum turun, sehingga pokmas belum melakukan kegiatan, terutama kegiatan ekonomi produktif seperti yang dijanjikan Coremap.

Sama halnya di Pasimasunggu Timur, pokmas di Buki dan Bungaiya telah terbentuk sejak tahun 2005. Di desa Bungaiya pada awalnya terbentuk 6 pokmas yaitu usaha produktif 5 pokmas dan gender 1 pokmas. Masing-masing pokmas beranggotakan 13 orang. Pokmas di Buki terdiri dari 4 pokmas yang masing-masing beranggotakan 10-11 orang. Pembentukan pokmas difasilitasi oleh Coremap dengan bantuan fasilitator, LPSTK, dan pemerintahan desa. Coremap memberikan bimbingan proses dalam pembentukan pokmas, termasuk persyaratan administrasinya. Apabila persyaratan lengkap, selanjutnya pokmas ditetapkan oleh pemerintah desa dan diusulkan keberadaannya kepada Coremap Kabupaten Selayar. Akan tetapi sebagian besar anggota Pokmas ternyata tidak memahami esensi pembentukan Pokmas dan terkesan ikut-ikutan dengan maksud mendapatkan dana bantuan Coremap. Setelah dana yang ditunggu tidak kunjung datang, peserta Pokmas bubar dan tidak dapat dikoordinasikan lagi.

Pokmas tersebut terbentuk dalam waktu yang cukup lama sebelum dana coremap turun ke desa, sehingga pada waktu dana *village grant* dan *seed fund* sampai ke desa, hampir semua pokmas tidak aktif lagi. Oleh sebab itu penerima dana *seed fund* di dua desa tidak lagi berdasar keberadaan pokmas, tetapi masing-masing desa mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Pada saat pembentukan pokmas anggota pokmas mengharapkan ada bantuan dana dari Coremap, antara lain untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan program Coremap. Akan tetapi, setelah menunggu sampai beberapa tahun, dana tersebut tidak kunjung datang dan masyarakat menjadi tidak perhatian lagi terhadap program coremap. Dengan demikian selama ini tidak ada pokmas yang aktif di kedua desa pulau besar.

Pokmas di dua desa saat ini bisa dikatakan mati suri karena tidak memiliki kegiatan apapun. Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat oleh LKM tidak lagi melalui pokmas, dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat dan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh LKM. Hal itu disebabkan anggota Pokmas maupun LKM pada umumnya tidak mengetahui secara jelas tujuan

dibentuknya pokmas, dan LKM tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hal itu diperparah dengan kurangnya sosialisasi dan pembinaan dari fasilitator terhadap pokmas. Umumnya masyarakat mau menjadi anggota pokmas karena mengharapkan bisa mendapatkan bantuan dana dari Coremap.

3. Pokmaswas

Untuk mengefektifkan kegiatan pengawasan laut, sebetulnya Coremap Kabupaten Selayar menekankan perlunya pengawasan melalui Siswasmas (sistem pengawasan masyarakat), dengan pembentukan Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas). Tujuan utamanya adalah untuk mendukung keberadaan sistem pengelolaan terpadu yang berbasis masyarakat. Pokwasmas sebetulnya bukan murni program Coremap, melainkan merupakan bagian dari siswasmas (sistem pengawasan oleh masyarakat), yaitu program yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2000. Program ini diperlukan karena banyak masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai, sehingga memungkinkan untuk mengawasi lingkungannya setiap saat. Karena itu jika mereka dilibatkan dalam pengawasan, maka terjadinya kerusakan lingkungan dapat diketahui dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dengan demikian bagi Pemerintah Kabupaten Selayar, masyarakat pesisir merupakan potensi besar yang dapat diberdayakan untuk membantu tugas pemerintah dalam mengelola sumberdaya laut.

Walaupun Siswasmas dianggap perlu untuk dilakukan, dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pantai untuk melakukan pengawasan sumberdaya pesisir yang ada di sekitarnya, namun pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, dan masyarakat berhak untuk membentuk atau tidak membentuk pokmaswas, disesuaikan dengan urgensi dan kemampuan desa. Karena pembentukan Pokmaswas itu tidak diwajibkan, maka saat ini di Desa Bonto Baru dan Bonto Bulaeng Pokmaswas itu belum dibentuk. Alasan belum dibentuknya pokmaswas terutama adalah karena terbentur pada anggaran yang harus dibiayai sepenuhnya oleh desa, dan desa belum memiliki kemampuan untuk itu. Selain itu,

alasan lain adalah keberadaan Pokmaswas dianggap belum mendesak, karena tanpa adanya kelompok yang secara khusus melakukan pengawasan perusakan lingkungan ternyata dapat diminimalisasi. Selain itu, dikhawatirkan kalau ada Pokmaswas justru anggota masyarakat lainnya tidak peduli terhadap terjadinya perusakan lingkungan laut, karena sudah ada kelompok khusus yang bertugas mengawasinya.

Kegiatan Coremap di Tingkat Lokasi/Desa

1. Sosialisasi dan Penyadaran Masyarakat

Agar program Coremap dapat berhasil, satu hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang Coremap dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang. Hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa sosialisasi tentang Coremap itu sangat jarang dilakukan oleh pengurus. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, SETO dan fasilitator sering tidak berada di lokasi, sehingga pengurus LPSTK, motivator dan pengurus pokmas “hanya menunggu,” tidak tahu apa yang harus dilakukan berkaitan dengan sosialisasi program Coremap. Apa lagi beberapa pengurus LPSTK justru tidak memiliki latarbelakang yang berkaitan dengan laut, karena matapencahariannya adalah bertani. Kedua, terbatasnya bahan/materi untuk sosialisasi. Pada awal pembentukan LPSTK, kegiatan sosialisasi program Coremap dilakukan sekitar 3-4 kali oleh fasilitator. Kegiatan dilakukan dengan cara tatap muka dengan menggunakan materi tentang tujuan dan sasaran pentingnya penyelamatan terumbu karang.

Sosialisasi program Coremap idealnya dilakukan melalui informasi yang disediakan di pondok informasi, selain dilakukan dengan tatap muka dan menyebarkan informasi melalui pamflet di tempat-tempat berkumpulnya orang (pasar, warung, masjid, sekolah). Akan tetapi, menurut pengakuan pengurus, semua itu selama ini tidak dilakukan, dan informasi hanya diberikan jika kebetulan ada orang yang bertanya. Keberadaan pondok informasi yang ada di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru juga masih sangat kurang dimanfaatkan

oleh masyarakat. Hal itu karena sumber dan materi informasi tentang program Coremap masih sangat kurang. Selain itu, pengurus LPSTK, fasilitator, pengurus pokmas maupun mativator yang dapat memberikan informasi masih sangat terbatas, apa lagi fasilitator sering tidak berada di lokasi (menurut informasi, sejak Januari sampai Juni 2008 fasilitator belum pernah berada di desa yang menjadi lokasi Coremap).

Walaupun kegiatan sosialisasi Coremap kurang dilakukan secara intensif, namun keberadaan Coremap di dua desa ini memberikan dampak yang cukup positif dalam penyadaran masyarakat. Hal itu terbukti pada terjadinya penurunan kegiatan masyarakat dan kenelayanan (nelayan) yang menggunakan obat bius (potassium/sianida) dan bom ikan di kawasan terumbu karang. Informasi larangan penggunaan obat bius dan bom telah menyebar pada sebagian nelayan lokal dan nelayan pendatang (dari daerah lain) sehingga sebagian nelayan yang biasanya menggunakan obat bius dan bom tidak melakukan kegiatannya di lokasi ini. Walaupun masih ada sebagian kecil nelayan, terutama yang berasal dari Sinjai dan Bulukumba yang tetap menggunakan bom (pengeboman) untuk menangkap ikan di luar kawasan ini, namun menurut informasi, jumlahnya sudah jauh berkurang dibandingkan dengan sebelum masuknya program Coremap di daerah ini. Berkurangnya kegiatan pengeboman dan penggunaan potasium, selain karena ada larangan dari Coremap, juga didukung oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Selayar, yaitu adanya Surat Edaran Bupati yang berisi tentang larangan menggunakan pompa kompresor untuk menangkap teripang, kecuali yang sudah memperoleh ijin. Hal itu disebabkan penggunaan kompresor sering disalahgunakan untuk menggunakan potassium sambil menyelam.

Sosialisasi coremap ke masyarakat di Buki dan Bungaiya juga masih minim, karena pengurus lebih banyak menggunakan media formal untuk melakukan sosialisasi. LPSTK di Bungaiya menyatakan bahwa selama awal dipilihnya LPSTK telah dilakukan 4 kali sosialisasi dengan peserta : aparat desa, kadus, dan pokmas. Sosialisasi kepada masyarakat jarang dilakukan mengingat

pengetahuan LPSTK dan pengurus tingkat desa tentang coremap masih sedikit. Hal ini juga ditekankan oleh motivator desa setempat yang menyatakan bahwa pada tahun 2007 ada pertemuan rutin 1 bulan 1 kali yang dihadiri oleh ketua pokmas, sekretaris, dan anggota pokmas. Pertemuan biasanya membahas masalah yang dihadapi oleh pokmas. Pada bulan Desember 2007 pertemuan dihentikan karena belum ada program kerja dari Coremap. Motivator setempat juga mengeluhkan lemahnya koordinasi karena fasilitator desa biasanya hanya datang 1 kali dalam 1 bulan dengan alasan sibuk atau alasan lainnya.

2. Pelatihan dan Edukasi

Selain kegiatan sosialisasi, pelatihan adalah kegiatan penting untuk peningkatan kemampuan pengurus LPSTK maupun pokmas dalam pengelolaan terumbu karang. Walaupun pelatihan itu penting, namun di Pasimasunggu Timur dan Bontomatene belum pernah diadakan pelatihan, baik kepada anggota pokmas maupun masyarakat. Pelatihan yang ada hanyalah yang diberikan kepada ketua LPSTK, yaitu berupa pelatihan manajemen pengelolaan terumbu karang yang diadakan di Benteng, Selayar, oleh PMU Kabupaten Selayar pada tahun 2006.

Kegiatan edukasi (pendidikan) tentang pentingnya penyelamatan dan pelestarian terumbu karang dan biota laut lainnya sudah diberikan kepada para siswa SD (sekolah dasar) dan SLTP sejak tahun 2004. Pentingnya materi ini diberikan kepada para siswa SD dan SLTP karena diharapkan sebagai generasi penerus mengetahui dan menyadari pentingnya menyelamatkan terumbu karang. Buku yang dipakai sebagai acuan merupakan buku yang diterbitkan oleh Coremap. Selain materi tersebut, materi lainnya tentang kelautan ditetapkan menjadi muatan lokal (mulok) siswa SD, SLTP dan SLA Kabupaten Selayar, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten sebagai kawasan yang memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan luas. Sementara tingkat SLTA belum diberikan materi di atas, karena materi mulok disesuaikan dengan lokasi masing-masing SLTA. Di Pasimasunggu Timur materi mulok yang diberikan adalah bidang

pertanian, khususnya tanaman pangan. Pemberian edukasi tentang pentingnya penyelamatan dan pelestarian terumbu karang ini merupakan bagian dari upaya penyadaran pada masyarakat, terutama generasi muda.

3. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan pengawasan merupakan hal yang penting dilakukan, untuk mengetahui dan mencegah terjadinya kerusakan terumbu karang. Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa di desa Bontobulaeng dan Bontobaru, sampai sekarang kegiatan pengawasan belum berjalan, karena tidak adanya prasarana kapal yang dimiliki. Kapal untuk melakukan pengawasan masih dalam tahapan proses penyelesaian (*finishing*), dan diperkirakan baru selesai bulan Agustus. Pengelolaan kapal ini akan dilakukan oleh Unit pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perikanan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Kapal tersebut dapat digunakan oleh Coremap secara bersama-sama untuk kegiatan pengawasan di kawasan terumbu karang maupun di DPL yang telah ditentukan. Akan tetapi, oleh karena satu kapal itu digunakan untuk pengawasan di seluruh wilayah kecamatan, maka pemanfaatan kapal itu tidak hanya digunakan oleh Desa Bonto Baru dan Bonto Bulaeng, melainkan juga oleh desa-desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Hal yang sama terjadi di Buki dan Bungaiya. Kegiatan pengawasan juga belum dapat berjalan karena kelompok pengawas di daerah ini belum terbentuk. Pada tahun 2005 pokmas konservasi memang telah terbentuk, tetapi saat penelitian ini dilakukan tidak ada anggota kelompok yang aktif dan direncanakan akan dibentuk pokmaswas yang baru di kedua desa tersebut. Pengawasan biasanya dilakukan secara manual oleh masyarakat, tetapi kegiatan tersebut cenderung lemah karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan.

4. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha Ekonomi produktif (UEP) merupakan salah satu kegiatan (pekerjaan) alternatif yang dilakukan masyarakat (nelayan) dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi/desa Coremap dan mengurangi kegiatan *illegal fishing* (bom, bius, penambangan batu karang). Kegiatan ini sangat penting karena dapat menjadi faktor utama (kunci) keberhasilan program Coremap. Jika masyarakat hanya dilarang untuk tidak menggunakan peralatan tangkap yang merusak, namun tanpa disertai dengan alternatif kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan, maka sulit untuk dapat menghentikan kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat, khususnya nelayan.

Pokmas UEP di desa Bontobulaeng dan Bontobaru sebetulnya sudah terbentuk sejak tahun 2005, namun sampai sekarang belum ada kegiatan yang dimiliki. Menurut informasi, hal itu terutama disebabkan oleh keberadaan fasilitator yang sering tidak di lokasi Coremap, sehingga tidak ada yang mengarahkan pokmas harus melakukan kegiatan apa; selain kurangnya sosialisasi pengurus LPSTK maupun pokmas kepada anggota tentang kegiatan produktif sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Selain itu, belum turunnya dana bergulir juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan belum aktifnya Pokmas UEP.

Di desa Bontobaru dana bergulir sebesar Rp 25 juta memang sudah diterima oleh LPSTK, dan dikelola oleh LKM (lembaga Keuangan Mikro). Akan tetapi, walaupun yang berhak memperoleh pinjaman dana bergulir adalah anggota Pokmas UEP, namun dalam pelaksanaannya uang pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat perorangan, seperti untuk membeli alat tangkap kenelayanan, usaha warung, bahkan tidap tertutup kemungkinan digunakan untuk kepentingan konsumtif. Dengan kondisi seperti itu sampai saat ini pokmas usaha ekonomi produktif tidak berjalan sesuai dengan rencana Coremap. Sementara dana simpan pinjam di desa Bontobulaeng sampai saat ini belum diterima LPSTK sehingga di desa tersebut tidak ada kegiatan pokmas (kelompok masyarakat).

Di Desa Buki dan Bungaiya Pokmas UEP telah terbentuk sejak tahun 2005, tetapi kelompok tersebut sudah tidak aktif karena selama ini tidak ada kegiatan berkaitan dengan usaha ekonomi produktif. Pada waktu dana *seed fund* turun, LKM yang telah terbentuk pada tahun 2005 kemudian berusaha untuk menyosialisasikan kepada masyarakat perihal dana usaha produktif tersebut. Masing-masing desa mendapatkan *seed fund* sebesar Rp 25 juta dan pemanfaatannya diserahkan kepada pengurus LKM setempat. Pengurus LKM terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan kolektor. Meskipun demikian, pengurus yang aktif di dua desa masih sebatas ketua LKM karena dana yang dikelola terlalu sedikit.

Dana Rp 25 juta yang diterima di Desa Bungaiya oleh pengurus kemudian ditawarkan kepada pokmas yang berminat untuk meminjam. Karena peminat dari pokmas tidak ada, mengingat pokmas sendiri sudah tidak aktif, maka dana ditawarkan kepada warga yang memerlukan, dengan persyaratan tertentu, yaitu: harus membentuk kelompok dan jumlah maksimal yang dapat dipinjam oleh masing-masing anggota Rp 1 juta, serta penanggung jawabnya adalah ketua kelompok. Pinjaman tersebut dikembalikan dalam waktu 10 bulan dengan bunga 2 persen pertahun. Jasa yang diperoleh LKM sebesar 40% akan dimanfaatkan untuk perlengkapan, dan 60 persen untuk pengelola. Dana pertama yang disalurkan kepada masyarakat sebesar 13 juta rupiah untuk 13 orang dan digunakan untuk usaha rumput laut, kue dan berjualan. Selama ini telah dilakukan 3 kali penarikan dan belum ada dana yang macet.

Besar dana *seed fund* yang diterima LKM Buki sama dengan Desa Bungaiya yaitu Rp 25 juta. Tahap pertama dana tersebut dipinjamkan kepada 19 orang, masing-masing Rp 1 juta. Peminjam dapat langsung mengajukan pinjaman kepada ketua LKM karena selama ini pokmas sudah tidak aktif. Persyaratan untuk peminjaman adalah kuitansi dan jaminan (berupa emas 5 gram, motor, atau rumah). Jika selama 3 bulan tidak menyeter, jaminan disita dan ditunggu selama 3 bulan untuk melunasi pinjaman yang belum diseter. Jika dalam waktu tersebut tidak dapat melunasi, maka jaminan dapat dijual untuk melunasi pinjaman. Selisih hasil penjualan akan diberikan

kepada pemilik/peminjam. Peminjam dikenakan jasa sebesar 1 % per bulan. Selama ini peminat untuk meminjam kurang banyak karena sebagian besar masyarakat di desa ini telah berhutang kepada PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat).

Melihat perkembangan dana *seed fund* yang telah berjalan selama 3 bulan, dampak usaha produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tampaknya masih jauh dari kenyataan. Keterbatasan dana yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat tampak nyata pada program tersebut. Dengan dana sebesar Rp 1 juta per KK, usaha yang dapat dibentuk oleh keluarga masih sulit untuk direalisasikan. Dana Coremap sebenarnya cukup tinggi, tetapi sebagian besar dana tersebut habis dialokasikan untuk operasional institusi mulai dari pusat sampai dengan tingkat desa. Dana yang langsung tertuju pada masyarakat sangat kecil dan sangat sulit jika digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.3. Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan COREMAP

3.3.1. Bontomatene dan Buki

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 3.2 terlihat jelas bahwa sebagian besar responden mengetahui tidak hanya kegiatan COREMAP tetapi juga pengetahuan tentang kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang.

Keberhasilan dalam proses sosialisasi pengetahuan tersebut di Kecamatan Bungaiya dan Buki tentunya merupakan hasil yang dicapai COREMAP di daerah tersebut. Proses tersebut diperoleh tidak saja dari kegiatan penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat luas tetapi juga melihat dan membaca tulisan/pamflet tentang COREMAP. Program COREMAP yang masuk ke daerah tersebut telah direspon dengan keingintahuan masyarakat tentang apa itu COREMAP dengan bertanya kepada petugas di daerah tersebut meskipun lebih banyak yang tidak terlibat dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian terumbu karang.

Mereka umumnya juga tahu tentang pentingnya perlindungan dan pengawasan pesisir maupun laut di daerah tersebut, kendati kurang sepertiganya dari mereka tidak terlibat. Hal ini karena tidak semua warga dilibatkan dalam program perlindungan pesisir maupun perlindungan laut. Meskipun mereka mengetahui tentang program COREMAP namun pada waktu ditanyakan apakah mengetahui dan terlibat dalam pembentukan LPSTK, ternyata lebih banyak yang tidak tahu maupun yang tidak terlibat. Pada waktu pembentukan LPSTK baik di Desa Bungaiya maupun di Desa Buki memang tidak melibatkan seluruh warga, namun dipilih secara purposif dalam jumlah yang terbatas.

Tabel 3.2. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kegiatan COREMAP

Variabel	Kategori Jawaban		N
	Ya	Tidak	
COREMAP			
Pengetahuan tentang COREMAP	73,7	26,3	76
Pengetahuan kegiatan penyelamatan terumbu karang	72,4	27,6	76
KEGIATAN PENINGKATAN PENGETAHUAN			
Pengetahuan tentang kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang pelestarian terumbu karang	60,5	39,5	76
Keterlibatan dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang	43,5	56,5	46
PERLINDUNGAN/PENGAWASAN PESISIR DAN LAUT			
Pengetahuan	59,2	40,8	76
Keterlibatan	31,1	68,9	45
PEMBENTUKAN LPSTK			
Pengetahuan	42,1	59,9	76
Keterlibatan	43,7	56,3	32
U E P			
Pengetahuan kegiatan pendampingan	21,0	79,0	76
Terlibat dalam pendampingan	25,0	75,0	16
PENDAMPINGAN UEP			
Pengetahuan kegiatan pendampingan	18,4	81,6	76
Terlibat dalam pendampingan	28,6	71,4	14
RPSTK			
Pengetahuan kegiatan RPSTK	28,9	71,1	76
Terlibat dalam RPSTK	27,3	72,7	22

POKMAS KONSERVASI			
Pengetahuan	31,6	68,4	76
Keterlibatan	29,2	70,8	24
POKMAS UEP			
Pengetahuan kegiatan	38,2	61,8	76
Keterlibatan	20,7	79,3	29
POKMAS WANITA			
Pengetahuan kegiatan	26,3	73,7	76
Keterlibatan	15,0	85,0	20
POKMAS LAIN			
Pengetahuan	8,6	91,4	70
Keterlibatan	16,7	83,3	6

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008.

Pengetahuan tentang usaha ekonomi produktif dan keterlibatan mereka juga masih terbatas. Sekitar seperlima responden yang mengetahui kegiatan pelatihan ekonomi produktif di daerah tersebut. Oleh karena itu pengetahuan tentang kegiatan pendampingan dan keterlibatan mereka juga terbatas. Kenyataan menunjukkan bahwa program UEP baru dilaksanakan 3 bulan terakhir dengan memanfaatkan *seed fund* yang jumlahnya masih terbatas. Mereka yang meminjam uang jumlahnya juga masih terbatas dan pemanfaatannya tergantung masing-masing peminjam. Bagi pengurus dana lebih diutamakan mereka yang dikenal dan diperkirakan dapat mengembalikan uang pinjaman.

Setiap desa COREMAP juga diwajibkan membuat RPSTK yang dimotori oleh fasilitator yang dalam pembentukannya dapat menyerap keinginan warga. Dalam kenyataan pembuatan RPSTK kurang melibatkan warga, oleh karena tidak mengherankan apabila banyak responden yang tidak mengetahui kegiatan RPSTK, apalagi ketelibatan mereka. Demikian pula kebanyakan responden tidak mengetahui tentang Pokmas konservasi di desanya. Pembentukan Pokmas konservasi tidak melibatkan seluruh warga, namun secara selektif bagi mereka yang dianggap mempunyai kompetensi, antara lain mereka yang berstatus nelayan. Oleh karena itu keterlibatan responden dalam Pokmas konservasi juga sangat kecil. Hal yang sama juga terkait dengan Pokmas wanita dan Pokmas UEP. Pokmas UEP dan wanita sudah 2 tahun terbentuk, namun karena dana untuk kegiatan baru terealisasi pada pertengahan tahun 2008, maka Pokmas

yang dibentuk telah tidak berfungsi, dan hanya sebagian kecil yang telah memanfaatkan dana *seed fund*. Oleh karena itu pengetahuan mereka dan keterlibatan dalam UEP dan kegiatan wanita sangat kecil.

3.3.2. Kecamatan Pasimasunggu Timur

Sejak tahun 2005 Coremap mulai diadakan di daerah ini. Dengan sosialisasi yang baik, maka dalam kurun waktu hampir tiga tahun diharapkan sebagian besar warga sudah mengetahui keberadaan Coremap di desanya. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan hal yang sebaliknya. Jumlah yang belum mengetahui masih sangat besar, yaitu mencapai 48,1% (Tabel 3.3.). Itu menunjukkan bahwa sosialisasi tentang keberadaan Coremap masih kurang dilaksanakan di dua desa di Pasimasunggu Timur (Bonto Bulaeng dan Bonto Baru). Menurut informasi, sosialisasi hanya dilaksanakan sambil jalan, hanya pada saat ada orang yang bertanya.

Tabel 3.3. Pengetahuan Adanya COREMAP

No.	Mengetahui	Frekuensi	Jumlah (%)
1	Ya	67	51,9
2	Tidak	62	48,1
Jumlah		129	100

Sumber: Data Primer BME Aspek Sosial Ekonomi, PPK-LIPI, 2008

Kondisi yang sama juga terjadi pada saat ditanyakan tentang kegiatan penyelamatan terumbu karang, yaitu sebagian besar responden (69%) justru belum mengetahuinya (Tabel 2). Hal itu tidak mengherankan karena walaupun Coremap sudah lama diadakan di daerah ini, namun kegiatan penyelamatan terumbu karang masih terbatas pada penentuan DPL (daerah perlindungan laut) dan pembuatan RPTK (rencana pengelolaan terumbu karang). Lokasi DPL yang sudah ditentukan itupun belum ditindak lanjuti dengan pembuatan rambu-rambu untuk DPL, sebagaimana yang disyaratkan dalam DPL. Dengan demikian belum ada tindakan konkret untuk penyelamatan terumbu karang di daerah ini.

Tabel 3.4. Pengetahuan Adanya Kegiatan Penyelamatan Terumbu Karang

No.	Mengetahui	Jumlah	%
1	Ya	40	31
2	Tidak	89	69
Jumlah		129	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Untuk memperkenalkan program Coremap yang sudah beberapa tahun dijalankan di daerah ini, maka sosialisasi kepada warga perlu dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian terumbu karang itu masih sangat kurang dilaksanakan. Hal itu terbukti dengan sedikitnya jumlah responden (17,1%) yang mengaku mengetahui adanya kegiatan sosialisasi tersebut. Sedangkan sebagian besar (82,9%) justru mengaku belum mengetahuinya. Hal itu menunjukkan bahwa pengurus LPSTK masih kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk dalam hal ini adalah motivator, fasilitator maupun Seto (*senior fasilitator*) kecamatan. Hal itu terjadi karena motivator maupun seto jarang ada di desa binaan, sedangkan fasilitator maupun pengurus lainnya kurang punya inisiatif untuk melakukan sosialisasi. Akibatnya kegiatan sosialisasi tidak dilakukan secara terencana dan terarah.

Tabel 3.5. Pengetahuan tentang Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pentingnya Pelestarian Terumbu Karang

No.	Mengetahui	Jumlah	%
1	Ya	22	17,1
2	Tidak	107	82,9
Jumlah		129	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Responden yang mengetahui adanya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang, pada saat ditanyakan tentang keterlibatannya dalam kegiatan tersebut,

jumlah yang menjawab terlibat dalam kegiatan justru lebih kecil, yaitu hanya 45,5%. Selebihnya (54,5%) justru mengaku tidak terlibat. Itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam sosialisasi tentang pentingnya upaya pelestarian terumbu karang masih kecil.

Hal yang sama juga terjadi pada saat responden ditanyakan apakah mereka mengetahui adanya kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir dan laut. Prosentase yang menjawab sangat kecil, yaitu hanya 15,5%. Sebagian besar menjawab tidak mengetahui adanya kegiatan perlindungan pengawasan pesisir dan laut. Banyaknya responden yang tidak mengetahui itu bisa dipahami karena belum ada kegiatan konkret untuk perlindungan/pengawasan pesisir dan laut, kecuali baru terbatas penentuan DPL dan pembuatan RPTK.

Tabel 3.6. Keterlibatan Masyarakat dalam Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Pelestarian Terumbu Karang

<i>No.</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Jumlah</i>	<i>%</i>
1	Ya	10	45,5
2	Tidak	12	54,5
Jumlah		22	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Begitu pula pada saat ditanyakan tentang keterlibatan mereka yang mengetahui adanya kegiatan tersebut, maka yang mengaku terlibat hanya sebesar 35%, dan selebihnya (65%) mengaku tidak terlibat. Ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut belum melibatkan masyarakat secara luas. Menurut informasi, kegiatan penentuan DPL dan pembuatan RPTK hanya dilakukan secara terbatas oleh pengurus LPSTK bersama dengan motivator. Memang ada beberapa warga yang dilibatkan, namun itu hanyalah beberapa orang yang dianggap tokoh masyarakat yang ditunjuk.

Tabel 3.7. Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Perlindungan/Pengawasan Pesisir dan Laut

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	20	15,5	7	35
2	Tidak	109	84,5	13	65
Jumlah		129	100	20	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Pada saat ini LPSTK (Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang) sudah terbentuk, yang pembentukannya dilakukan akhir tahun 2005. Terkait dengan itu, hanya 14% yang mengaku mengetahui kegiatan pembentukan LPSTK, sedangkan 86% mengaku tidak mengetahuinya. Hal itu disebabkan walaupun pembentukan LPSTK telah melibatkan masyarakat, namun hanya beberapa orang saja yang dilibatkan, yaitu hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk.

Sebagai lembaga pengelolaan yang berbasis masyarakat, idealnya pembentukan LPSTK juga melibatkan semua unsur masyarakat. Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 responden yang mengetahui adanya kegiatan pembentukan LPSTK, hanya 11,1% responden yang mengaku terlibat dalam kegiatan tersebut, sedangkan 88,9% mengaku tidak terlibat. Itu menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan LPSTK masih sangat minim.

Tabel 3.8. Pengetahuan dan Keterlibatan Masyarakat pada Kegiatan Pembentukan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK)

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	18	14	2	11,1
2	Tidak	111	86	16	88,9
Jumlah		129	100	18	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Untuk menunjang upaya penyelamatan terumbu karang, salah satu kegiatan Coremap adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif. Terkait dengan itu, hanya sebesar 8,5% responden yang mengaku sudah mengetahui adanya kegiatan usaha tersebut, dan sebagian besar (91,5%) mengaku tidak mengetahuinya. Minimnya mereka yang mengaku mengetahui hal tersebut selain menunjukkan bahwa sosialisasi tentang usaha ekonomi produktif untuk menunjang kegiatan Coremap itu belum jalan, juga karena dana untuk peningkatan ekonomi produktif itu baru saja turun, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahuinya. Dari 11 responden yang mengetahui kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif, hanya 36,4% yang mengaku terlibat. Itu menunjukkan bahwa sebagian besar yang mengetahui kegiatan tersebut (63,6%) tidak terlibat di dalamnya.

Tabel 3.9. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	11	8,5	4	36,4
2	Tidak	118	91,5	7	63,6
Jumlah		129	100	11	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Untuk kelancaran program Coremap, di setiap desa Coremap dilakukan pendampingan oleh motivator dan Seto. Tujuan pendampingan ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan program Coremap dan untuk memotivasi masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam kegiatan Coremap. Berkaitan dengan kegiatan pendampingan ini, ternyata hanya 8,5% yang mengetahuinya, sedangkan 91,5% tidak mengetahuinya. Hal itu sangat mengecewakan karena selayaknya semua lapisan masyarakat mengetahuinya. Kondisi tersebut terjadi karena pelaksanaan pendampingan sangat minim. Petugas yang harus melakukan pendampingan, baik motivator maupun Seto sangat jarang di lokasi, dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja kalau ada permasalahan yang harus dibahas mereka tinggal di desa

Coremap yang menjadi wilayah binaannya. Dengan kondisi seperti itu maka sangat wajar jika kegiatan mereka tidak diketahui oleh sebagian masyarakat. Adapun mereka yang tahu adanya kegiatan pendampingan ini, juga hanya sebagian kecil (36,4%) yang mengaku terlibat. Selebihnya justru mengaku tidak terlibat.

Tabel 3.10. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pendampingan

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	11	8,5	4	36,4
2	Tidak	118	91,5	7	63,6
Jumlah		129	100	11	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Untuk pelaksanaan program Coremap, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelestarian terumbu karang, di wilayah ini sudah diadakan kegiatan penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK). Terkait dengan itu, sebagian besar responden (91,5%) mengaku tidak mengetahuinya, dan yang mengaku mengetahui kegiatan tersebut hanya 8,5%. Ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Bagi mereka yang mengetahui kegiatan tersebut, yang mengaku terlibat dalam kegiatan juga sangat kecil, yaitu hanya 9,1%. Itu semua menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat karena pelaksanaan penyusunan RPTK itu hanya dilakukan oleh pengurus LPSTK, motivator dan Seto. Memang ada sebagian masyarakat yang dilibatkan, namun itu terbatas pada orang-orang tertentu yang ditunjuk, yaitu mereka yang dianggap tokoh masyarakat.

Tabel 3.11. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Penyusunan Rencana Pemanfaatan dan Pelestarian Terumbu Karang

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	11	8,5	1	9,1
2	Tidak	118	91,5	10	90,9
Jumlah		129	100	11	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Untuk menyelamatkan terumbu karang, di desa ini juga dibentuk Pokmas Konservasi, yang kegiatannya adalah melakukan pengawasan terhadap terumbu karang, agar terhindar dari kegiatan yang merusak. Berkaitan dengan kegiatan pokmas tersebut, prosentase yang tidak mengetahuinya juga sangat besar, yaitu 88,4%, dan hanya sebaian kecil (11,6%) yang mengetahuinya. Adapun yang mengaku mengetahui kegiatan tersebut, yang terlibat di dalam kegiatan Pokmas konservasi cukup besar, yaitu 53,3%. Meskipun demikian ketika ditanya bentuk keterlibatannya, umumnya keterlibatan mereka bersifat pasif, yaitu hanya sekedar menjadi anggota Pokmas, dan jarang sekali ada pertemuan di antara anggota Pokmas tersebut.

Tabel 3.12. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Konservasi

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	15	11,6	8	53,3
2	Tidak	114	88,4	7	46,7
Jumlah		129	100	15	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Begitu pula dengan pokmas usaha ekonomi produktif. Sebagian besar responden (81,4%) juga menyatakan tidak mengetahui kegiatan Pokmas ini, dan hanya 18,6% yang mengetahuinya. Meskipun

demikian, dari mereka yang mengaku mengetahui kegiatan Pokmas tersebut, ketika ditanyakan tentang keterlibatannya dalam kegiatan pokmas, mereka yang mengaku terlibat dan yang tidak jumlahnya seimbang, yaitu masing-masing sebesar 50%. Akan tetapi, keterlibatan mereka dalam kegiatan Pokmas ekonomi produktif itu patut dipertanyakan, karena ternyata sampai saat penelitian dilakukan yang disebut Pokmas usaha ekonomi produktif itu sama sekali belum ada kegiatannya. Satu-satunya kegiatan, itupun kalau bisa disebut kegiatan, hanyalah terbatas pada penyaluran dana simpan pinjam kepada anggota yang berjumlah Rp 25 juta, atau Rp 1 juta untuk setiap peminjam. Dengan demikian yang disebut terlibat sebetulnya adalah kegiatan perorangan, yang kebetulan orang itu telah mendapatkan pinjaman dana bergulir dari Coremap.

Tabel 3.13. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	24	18,6	12	50
2	Tidak	105	81,4	12	50
	Jumlah	129	100	24	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Salah satu pokmas yang ada di bawah LPSTK adalah pokmas wanita/jender, yang tujuannya untuk meningkatkan ketrampilan perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berkaitan dengan kegiatan pokmas ini, sebagian besar responden (88,4%) juga tidak mengetahuinya. Hal itu bisa dipahami karena Pokmas wanita yang sudah dibentuk itu ternyata tidak pernah ada kegiatannya. Memang dari mereka yang mengetahui kegiatan Pokmas ini ada yang mengaku terlibat dalam kegiatan tersebut, namun jumlahnya sangat kecil yaitu hanya 6,7%. Itupun sebetulnya yang dilakukan bukan kegiatan Pokmas yang dibentuk oleh Coremap, melainkan kegiatan kelompok perempuan yang ada di desa.

Tabel 3.14. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Wanita/Jender

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	15	11,6	1	6,7
2	Tidak	114	88,4	14	93,3
	Jumlah	129	100	15	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Kegiatan pokmas yang lain di desa ini adalah pokmas pertanian. Akan tetapi, pokmas ini sebetulnya bukan bentukan Coremap tetapi merupakan pokmas yang ada sebelum masuknya Coremap. Berkaitan dengan kegiatan pokmas tersebut sebagian besar responden (98,4%) juga tidak mengetahuinya. Karena itu sangat wajar jika dari mereka yang mengetahui kegiatan Pokmas tersebut, seluruhnya tidak ada yang teribat di dalamnya.

Tabel 3.15. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pokmas Lainnya

No.	Jawaban	Mengetahui		Terlibat	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	2	1,6	-	-
2	Tidak	127	98,4	2	100
	Jumlah	129	100	2	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Melihat aspirasi masyarakat tentang jenis kegiatan yang ingin diikuti, maka tampak bahwa tidak ada jenis kegiatan yang konkret yang diinginkan oleh masyarakat. Mereka sebagian besar menyatakan bahwa kegiatan itu bisa apa saja, yang penting bisa berguna dan sedikit membantu masyarakat. Jumlah yang menjawab demikian sangat besar, yaitu 91,5%. Selebihnya jawaban mereka tersebar, yaitu: apa saja yang penting bermanfaat, kegiatan konservasi, pengembangan usaha simpan pinjam, penyelamatan terumbu karang, pengembangan ekonomi rakyat melalui bantuan Coremap dan pengembangan ekonomi produktif.

Tabel 3.16. Jenis Kegiatan yang ingin Diikuti

No.	Jawaban	Jumlah	(%)
1	Apa saja yang bisa berguna dan sedikit membantu	118	91,5
2	Lainnya	11	8,5
Jumlah		129	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Untuk melakukan penyelamatan terhadap terumbu karang, Coremap diharapkan melakukan pemilihan jenis-jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, bersama dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, sebanyak 88,4% mengaku tidak mengetahuinya dan hanya 11,6% yang mengaku mengetahui. Adapun yang mengaku mengetahui kegiatan tersebut, yang mengaku terlibat hanya satu orang (6,7%). Menurut orang itu, keterlibatannya dalam kegiatan pemilihan jenis usaha yang tidak merusak tersebut sangat bermanfaat, karena orang merasa bisa ikut melestarikan potensi sumberdaya perikanan di daerahnya.

Tabel 3.17. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pemilihan Jenis Usaha yang Tidak Merusak Terumbu Karang, serta Manfaatnya

No.	Jawaban	Mengetahui		Keterlibatan		Manfaat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	15	11,6	1	6,7	1	100
2	Tidak	114	88,4	14	93,3	-	-
Jumlah		129	100	15	100	1	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Bagi yang mengetahui kegiatan pemilihan jenis usaha yang tidak merusak terumbu karang, mayoritas (60%) mengaku mendapatkan informasi itu dari fasilitator/motivator/pengurus Coremap. Selebihnya mengaku mengetahuinya dari anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Coremap.

Tabel 3.18. Sumber Informasi tentang Pengetahuan mengenai Kegiatan Pemilihan Jenis Usaha yang Tidak Merusak Terumbu Karang

No.	Mengetahui	Jumlah	(%)
1	Fasilitator/Motivator/pengurus Coremap	9	60
2	Anggota masyarakat yang terlibat Coremap	6	40
Jumlah		15	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Coremap memberikan dana bergulir untuk mengembangkan usaha. Berkaitan dengan itu, sebagian besar responden (83,7%) juga mengaku tidak mengetahuinya, dan hanya 16,3% yang mengaku mengetahui. Adapun yang mengaku mengetahui kegiatan tersebut, hanya 33,3% yang mengaku terlibat, dan sebagian besar (66,7%) mengaku tidak terlibat. Alasan tidak terlibat terutama adalah karena tidak kebagian, walaupun sebetulnya menginginkan. Adapun keterlibatan kegiatan tersebut umumnya dalam bentuk sebagai penerima dana bergulir. Bagi yang mengaku terlibat, sebagian besar mengaku bermanfaat, yaitu 85,7%, karena bisa menambah modal usaha mereka.

Tabel 3.19. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pemberian Dana Bergulir/Kredit untuk Mengembangkan Usaha, serta Manfaatnya

No.	Jawaban	Mengetahui		Keterlibatan		Manfaat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	21	16,3	7	33,3	6	85,7
2	Tidak	108	83,7	14	66,7	1	14,3
Jumlah		129	100	21	100	7	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Pada umumnya masyarakat mengetahui informasi tentang pemberian dana bergulir itu dari fasilitator/motivator atau pengurus Coremap lainnya (61,9%). Selain itu banyak juga yang mengetahuinya dari anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Coremap, yaitu

sebesar 28,6%. Selebihnya informasi itu diperoleh dari aparat desa/dusun/kampong/RT/RW dan dari anggota masyarakat lainnya, yaitu masing-masing sebesar 4,8%.

Tabel 3.20. Sumber Informasi Pengetahuan tentang Pemberian Dana Bergulir/Kredit untuk Mengembangkan Usaha

No.	Mengetahui	Jumlah	(%)
1	Fasilitator/Motivator/pengurus	13	61,9
2	Coremap Kepala/aparat desa/dusun/kampong/RT/RW	1	4,8
3	Anggota masyarakat yang terlibat Coremap	6	28,6
4	Anggota masyarakat lainnya	1	4,8
Jumlah		21	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Dalam kaitannya dengan kegiatan pelatihan dan bimbingan ketrampilan yang diberikan kepada anggota pokmas, hampir seluruh responden (99,2%) mengaku tidak mengetahuinya, dan tidak ada yang terlibat dalam kegiatan itu. Hal ini bisa dipahami karena di dua desa Coremap ini memang belum pernah ada kegiatan pelatihan dan bimbingan ketrampilan yang diberikan kepada anggota pokmas.

Tabel 3.21. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan tentang Ketrampilan

No.	Jawaban	Mengetahui		Keterlibatan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	1	0,8	-	-
2	Tidak	128	99,2	1	100
Jumlah		129	100	1	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa ada satu orang yang mengaku mengetahui kegiatan pelatihan tersebut. Meskipun demikian, ternyata pengetahuan itu baru sebatas informasi tentang rencana kegiatan yang belum tahu kapan akan diadakan, dan itu diperoleh dari motivator.

Tabel 3.22. Pengetahuan dan Keterlibatan pada Jenis Usaha Perdagangan Warung

No.	Jawaban	Mengetahui		Keterlibatan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	1	4	-	-
2	Tidak	24	96	1	100
Jumlah		25	100	1	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Dari responden yang sudah tergabung dalam kelompok Pokmas, sebagian besar (96%) tidak mengetahui adanya jenis usaha perdagangan warung yang dikembangkan oleh pokmas. Hal itu karena tidak ada usaha perdagangan warung yang sudah diusahakan oleh Coremap di wilayah ini. Memang ada satu responden yang mengaku mengetahui ada usaha perdagangan warung, namun ternyata warung yang dimaksud merupakan warung yang bukan usaha Coremap.

Begitu pula dengan jenis usaha budidaya. Karena di dua desa yang diteliti tidak ada usaha budidaya yang dikembangkan oleh Coremap, maka hampir semua responden (96%) tidak mengetahui adanya usaha tersebut.

Tabel 3.23. Pengetahuan dan Keterlibatan pada Jenis Usaha Budidaya

No.	Jawaban	Mengetahui		Keterlibatan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	1	4	-	-
2	Tidak	24	96	1	100
Jumlah		25	100	1	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Sama halnya dengan jenis usaha perikanan tangkap. Di wilayah penelitian memang banyak usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi, tidak ada satupun kegiatan perikanan tangkap yang diusahakan oleh Coremap. Karena itulah maka tidak ada responden yang mengaku mengetahui adanya usaha tersebut.

Tabel 3.24. Pengetahuan tentang Jenis Usaha Perikanan Tangkap

No.	Jawaban	Mengetahui	
		Jumlah	%
1	Ya	-	-
2	Tidak	25	100
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Coremap juga tidak melakukan jenis usaha ternak ayam/bebek/kambing dan sebagainya. Memang di dua desa ini ada beberapa warga yang memiliki ayam/bebek/kambing dan sebagainya, namun bisa dipastikan bahwa semua itu bukan usaha yang dikembangkan oleh Coremap. Karena itulah maka tidak ada satu orangpun responden anggota pokmas yang mengaku mengetahui adanya usaha tersebut.

Tabel 3.25. Pengetahuan tentang Jenis Usaha Ternak Ayam/Bebek/Kambing dll.

No.	Jawaban	Mengetahui	
		Jumlah	%
1	Ya	-	-
2	Tidak	25	100
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Begitu pula jenis usaha pembuatan makanan/kue/minyak kelapa, juga tidak dikembangkan oleh Coremap, walaupun ada beberapa orang yang membuatnya untuk dijual. Karena itu 100% responden menyatakan tidak mengetahui adanya usaha tersebut.

Tabel 3.26. Pengetahuan tentang Jenis Usaha Kegiatan Pembuatan Makanan/Kue/Minyak Kelapa

No.	Jawaban	Mengetahui	
		Jumlah	%
1	Ya	-	-
2	Tidak	25	100
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Jenis usaha pengelolaan hasil laut/ikan asin juga tidak dikembangkan oleh Coremap di daerah ini, walaupun ada beberapa orang yang melakukannya. Karena itu sebagian besar responden (96%) juga menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Memang ada satu orang yang mengaku mengetahuinya, namun ternyata yang diketahui itu merupakan pengolahan hasil laut/ikan asin yang dikembangkan oleh perorangan.

Tabel 3.27. Pengetahuan dan Keterlibatan pada Jenis Usaha Pengolahan Hasil Laut/Ikan asin

No.	Jawaban	Mengetahui		Keterlibatan	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	1	4	-	-
2	Tidak	24	96	1	100
Jumlah		25	100	1	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Begitu pula dengan jenis usaha kerajinan/souvenir, juga tidak dilakukan oleh pokmas. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satupun warga di daerah ini yang mengembangkan usaha kerajinan/souvenir. Karena itu dari semua responden anggota pokmas yang diinterview (100%), seluruhnya menyatakan tidak mengetahui adanya usaha kerajinan/souvenir itu.

Tabel 3.28. Pengetahuan tentang Jenis Usaha Kerajinan/Souvenir

No.	Jawaban	Mengetahui	
		Jumlah	%
1	Ya	-	-
2	Tidak	25	100
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Berkaitan dengan jenis usaha lainnya yang dilakukan oleh Pokmas, sebagian besar responden anggota Pokmas (52%) menyatakan mengetahuinya, dan sebesar 48% yang tidak mengetahui. Selain itu, dari yang mengetahui adanya jenis usaha lain yang dilakukan oleh Pokmas, sebanyak 46,2% mengaku terlibat dalam kegiatan itu, dan 83,3% nya mengaku bahwa keterlibatan itu bermanfaat bagi dirinya. Akan tetapi, mengingat sampai pada saat penelitian di kedua desa di Pasimasunggu Timur itu belum ada kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pokmas, walaupun Pokmas-Pokmas itu sudah dibentuk cukup lama, maka apa yang mereka anggap sebagai kegiatan Pokmas itu adalah kegiatan usaha lain yang sifatnya perorangan, atau kelompok tetapi tidak dilakukan oleh Pokmas.

Tabel 3.29. Jenis Usaha Lainnya

No.	Jawaban	Mengetahui		Keterlibatan		Manfaat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Ya	13	52	6	46,2	5	83,3
2	Tidak	12	48	7	53,8	1	16,7
Jumlah		25	100	13	100	6	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Program Coremap selain bertujuan untuk melestarikan dan merehabilitasi terumbu karang juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mereka yang selama ini kehidupannya sangat tergantung dari hasil laut. Dengan masyarakat yang sejahtera, diharapkan perusakan lingkungan laut tidak terjadi. Terkait dengan hal itu, sebagian besar responden (64%) menyatakan bahwa kondisi

ekonomi mereka pada saat ini sama saja jika dibandingkan sebelum adanya Coremap. Mereka yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga lebih baik dibandingkan sebelum adanya program Coremap sangat kecil, hanya 32%. Itupun bisa dipastikan bahwa peningkatan ekonomi mereka bukan karena program Coremap, karena sampai saat penelitian belum ada program Coremap yang dijalankan untuk peningkatan ekonomi, kecuali pembagian kredit bergulir yang baru saja berlangsung.

Tabel 3.30. Keadaan Ekonomi Keluarga dibandingkan Sebelum adanya Coremap Di Desa Bonto Bulaeng dan Bonto Baru

<i>No.</i>	<i>Jawaban</i>	<i>Jumlah</i>	<i>%</i>
1	Lebih baik	8	32
2	Sama saja	16	64
3	Lebih buruk	1	4
Jumlah		25	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

Ada beberapa alasan mengapa mereka menjawab bahwa kondisi ekonomi mereka sama saja atau lebih buruk dibandingkan dengan sebelum adanya Coremap. Satu alasan yang dominan adalah karena bantuan yang diterima (melalui kredit bergulir) itu terlalu kecil, yaitu maksimum hanya Rp 1 juta per KK. Jumlah ini terlalu kecil jika digunakan untuk permodalan, sedangkan untuk membeli peralatan perikanan juga tidak cukup. Mereka yang beralasan demikian jumlahnya sangat besar, yaitu 88,4%. Selebihnya alasan yang dikemukakan oleh para responden adalah karena belum ada kegiatan yang berarti, belum memperoleh bantuan dari Coremap dan tidak memperhatikan hal-hal seperti itu.

Walaupun sebagian besar responden menyatakan bahwa kondisi ekonominya tidak mengalami perbaikan dengan adanya Coremap, namun sebagian besar dari mereka (54,3%) tetap menginginkan supaya kegiatan ekonomi Coremap dilanjutkan. Hal itu dengan pertimbangan bahwa saat ini kegiatan ekonomi di daerah itu memang bisa dikatakan belum tersentuh. Meskipun demikian, sebagian yang lain (45,7%) menyatakan tidak tahu apakah kegiatan Coremap perlu

dilanjutkan atau tidak. Hal itu menunjukkan keragu-raguan mereka tentang manfaat Coremap bagi masyarakat.

Tabel 3.31. Perlu/tidaknya Kegiatan Ekonomi Coremap Dilanjutkan

<i>No.</i>	<i>Mengetahui</i>	<i>Jumlah</i>	<i>(%)</i>
1	Ya	70	54,3
2	Tidak	-	-
3	Tidak tahu	59	45,7
Jumlah		129	100

Sumber: Data Primer Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008

BAB IV

PENDAPATAN PENDUDUK DAN PERUBAHANNYA

Bab ini berisi uraian tentang pendapatan yang terdiri dari pendapatan daerah regional bruto (PDRB) Kabupaten Selayar dan perkembangan pendapatan penduduk selama dua tahun terakhir (tahun 2006-2008) di lokasi penelitian. PDRB Kabupaten digunakan sebagai indikator untuk mengetahui perkembangan perekonomian secara makro. Uraian tentang PDRB kabupaten dilihat dari perkembangan PDRB kabupaten serta peran masing-masing sektor.

Pendapatan penduduk dalam tulisan ini diuraikan menurut lokasi yaitu kawasan daratan (pulau besar) dan kawasan pulau kecil. Sumber data berdasarkan hasil survei PPK-LIPI 2006 dan 2008. Atas dasar data tersebut pendapatan penduduk diuraikan menurut statistik perkembangan pendapatan perkapita dan rumah tangga, perkembangan pendapatan rumah tangga menurut lapangan pekerjaan kepala rumah tangga, serta distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan. Secara khusus pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan dilihat berdasar statistik pendapatan menurut musim serta distribusi rumah tangga menurut kelompok pendapatan serta musim.

4.1. PDRB Kabupaten Selayar

Perkembangan PDRB Kabupaten Selayar atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yaitu sekitar 12,82 persen pada tahun 2004-2005. Pertumbuhan positif terjadi di semua sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Selayar. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor angkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 23,32 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Struktur PDRB di Kabupaten Selayar tidak mengalami perubahan yang signifikan selama dua tahun terakhir. Empat sektor yang memberikan sumbangan cukup tinggi terhadap PDRB adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, dan sektor angkutan dan komunikasi. Diantara sektor-sektor tersebut, pertanian memberikan sumbangan paling besar (46,98 persen) dan menjadi sumber utama perekonomian di Kabupaten Selayar. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar penduduk di Selayar bekerja sebagai petani (87,16 persen). Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten ini relatif stabil dari tahun 2000-2005 (sekitar 46 persen).

Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB didukung tiga subsektor yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Keempat subsektor tersebut mempunyai peran penting dalam PDRB dan memiliki perkembangan yang berbeda selama dua tahun terakhir. Sumbangan subsektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB rata-rata sekitar 7,80 persen dari tahun 2000-2004, sementara subsektor tanaman perkebunan menyumbang sekitar 21,12 persen dari total PDRB pada tahun 2004. Sumbangan sub sektor ini mengalami peningkatan dari tahun 2000-2004, terutama berasal dari tanaman kelapa dan kemiri. Untuk mengetahui sumbangan setiap sub sektor pada sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Sebagai daerah yang sebagian besar berupa lautan, sub sektor perikanan mempunyai sumbangan yang cukup tinggi terhadap PDRB kabupaten (17,40 persen), hampir sama dengan sumbangan sektor pertanian dalam PDRB. Sub sektor Perikanan di kabupaten ini mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikembangkan, dengan produksi ikannya mencapai 12.643,50 ton pada tahun 2004. Potensi sumber daya perikanan saat ini belum dikelola secara optimal karena karena keterbatasan sarana dan prasarana nelayan setempat.

Tabel 4.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Selayar Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001-2005 (jutaan rupiah)

No	Lapngan Usaha	TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	148.523,70 (46,84)	169.333,42 (47,15)	186.310,90 (46,85)	207.689,17 (46,98)	231.085,33 (46,33)
2	Pertambangan dan penggalan	1.568,83 (0,49)	1.712,01 (0,48)	1.795,44 (0,45)	2.133,02 (0,48)	2.245,68 (0,45)
3	Industri pengolahan	18.281,71 (5,77)	19.918,42 (5,55)	20.186,81 (5,08)	20.941,23 (4,74)	22.105,97 (4,43)
4	Listrik, gas dan air bersih	1.194,88 (0,38)	1.544,81 (0,43)	1.773,92 (0,45)	1.974,45 (0,45)	2.362,13 (0,47)
5	Bangunan	20.587,41 (6,49)	23.520,54 (6,55)	25.453,57 (6,65)	30.092,17 (6,81)	33.641,43 (6,74)
6	Perdagangan, hotel dan restoran	45.554,41 (14,37)	51.493,92 (14,34)	57.559,73 (14,47)	62.468,23 (14,13)	69.086,76 (13,85)
7	Angkutan dan komunikasi	28.802,47 (9,08)	33.296,61 (9,27)	40.758,64 (10,25)	47.800,68 (10,81)	58.947,44 (11,82)
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	9.372,56 (2,96)	10.569,59 (2,94)	11.218,15 (2,82)	13.402,63 (3,03)	13.691,78 (2,75)
9	Jasa-jasa	43.195,00 (13,62)	47.743,89 (13,29)	51.654,25 (12,99)	55.600,54 (12,58)	65.608,45 (13,15)
	Total	317.080,97 (100)	359.133,21 (100)	397.711,52 (100)	442.102,12 (100)	498.774,96 (100)

Sumber : BPS Kabupaten Selayar, 2006/2007

Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memberikan sumbangan PDRB yang cukup besar sekitar 15 persen per tahun. Kegiatan perekonomian di kabupaten ini masih dipengaruhi sektor perdagangan sebagai sarana untuk menyalurkan produk barang dan jasa yang dihasilkan penduduk. Perdagangan besar dan eceran mempunyai sumbangan yang cukup signifikan dan selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Sementara hotel dan restoran memberikan sumbangan yang tidak stabil, tergantung kondisi pariwisata setempat.

Sektor angkutan dan komunikasi memberikan sumbangan PDRB rata-rata 10,81 persen (2002 – 2005). Perkembangan angkutan laut dengan kehadiran dua kapal cepat cukup signifikan di daerah ini, mengingat kabupaten ini dikelilingi oleh lautan. Selain itu keberadaan bandar udara Aeropala juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah. Perkembangan sektor angkutan dan komunikasi pada tahun 2004 cukup baik, hal ini ditandai dengan penambahan beberapa armada pengangkutan di laut dan semakin berfungsinya pelabuhan di Selayar.

4.2. Pendapatan Penduduk Di Lokasi Studi

Pendapatan rumah tangga dan perkapita merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan coremap. Pelaksanaan program diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduk yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan perkapita. Secara eksplisit disebutkan salah satu indicator coremap adalah pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif lainnya mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2010). Indikator lain adalah paling sedikit 70 persen dari masyarakat nelayan (*beneficiary*) merasakan dampak positif program coremap terhadap tingkat kesejahteraan dan status ekonomi mereka.

Perubahan pendapatan penduduk dalam bagian ini dilihat dari perubahan secara umum, kemudian terfokus pada perubahan pendapatan dari kegiatan kenelayanan. Perubahan pendapatan secara umum belum dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan coremap karena ada sebagian penduduk yang bekerja di luar pekerjaan berbasis terumbu karang. Penilaian tingkat keberhasilan coremap dapat dilihat dari perkembangan pendapatan menurut lapangan pekerjaan maupun pendapatan khusus dari kegiatan kenelayanan. Penghitungan pendapatan dalam penelitian ini masih berdasarkan harga yang berlaku, sehingga penjelasan tentang perubahan pendapatan penduduk perlu dihubungkan dengan laju inflasi, maupun tingkat upah di daerah setempat.

4.2.1. Pendapatan di Kawasan Daratan Pulau Besar

Secara umum selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 17,81 persen di Desa Buki dan Bungaiya (table 4.2). Peningkatan pendapatan ini lebih tinggi dari laju inflasi di daerah yaitu 7,81 persen tahun 2006 dan 5,64 persen tahun 2007, sehingga secara riil terjadi peningkatan pendapatan di lokasi studi. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terendah,

sehingga terdapat problem pemerataan pendapatan penduduk. Selain itu peningkatan pendapatan perkapita ini lebih disebabkan oleh kegiatan ekonomi di luar coremap seperti perdagangan dan peternakan. Berdasar informasi di lapangan, kegiatan coremap belum memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat termasuk peningkatan pendapatan. Dana *seed fund* dari coremap baru turun dalam 3 bulan terakhir sehingga manfaat bagi pengguna belum dapat dirasakan.

Peningkatan pendapatan penduduk di Buki dan Bungaiya semakin besar jika didasarkan pada pendapatan perkapita yang meningkat sebesar 26,38 persen selama dua tahun terakhir. Meskipun mengalami peningkatan, sebagian besar penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena jika dibandingkan dengan garis kemiskinan 1\$ US, pendapatan perkapita masih berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi jika digunakan garis kemiskinan sebesar 1,35 \$ US dan 2 \$ US, pendapatan perkapita penduduk masih jauh berada di bawah garis kemiskinan, artinya sebagian besar penduduk masih hidup kurang layak secara ekonomi.

Hasil survei sosial ekonomi tahun 2006 menunjukkan terdapat 58 persen rumah tangga di Buki dan Bungaiya yang mempunyai pendapatan di bawah pendapatan rata-rata (798 ribu rupiah), yang secara relatif merupakan keluarga miskin. Tahun 2008 proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah pendapatan rata-rata (940 ribu rupiah) meningkat menjadi 64,2 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa secara relatif terjadi peningkatan kemiskinan di daerah penelitian yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Rumah tangga yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata terdapat di beberapa lapangan pekerjaan baik perikanan tangkap, pertanian tanaman pangan maupun lapangan pekerjaan yang lain.

Disparitas antara pendapatan rumah tangga terendah dengan terbesar di Desa Buki dan Bungaiya tahun 2008 terlihat sangat mencolok (79 ribu dibanding dengan 5,55 juta), artinya pendapatan rumah tangga terbesar mencapai 70 kali pendapatan rumah tangga terendah. Perbedaan pendapatan yang tinggi antara rumah tangga kaya

dan miskin memberikan fenomena yang sama dengan pendapatan penduduk tahun 2006. Terdapat ketimpangan pendapatan yang sangat menonjol antara si kaya dengan si miskin, karena perbedaan akses informasi dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pekerjaan penduduk di Desa Buki dan Bungaiya tidak mengalami pergeseran dari tahun 2006 ke 2008 yang sebagian besar bekerja di sektor perikanan, pertanian tanaman pangan, jasa dan perdagangan yang merupakan mata pencaharian tergantung pada alam.

Tabel 4.2. Statistik Pendapatan di Desa Buki dan Bungaiya, Kabupaten Selayar, Tahun 2006 dan 2008

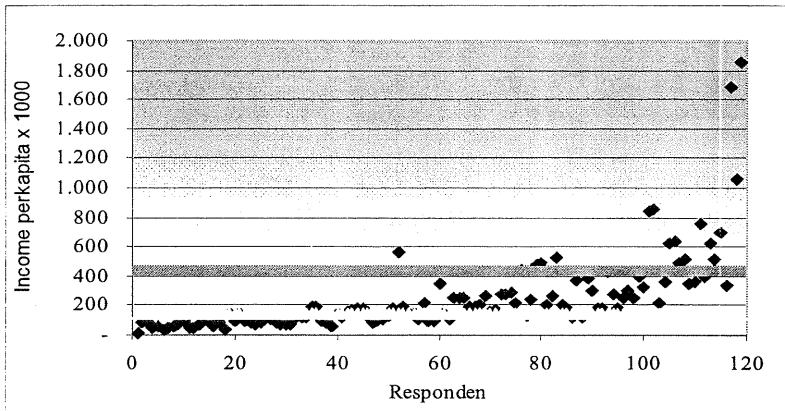
No	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)		Perkembangan
		2006	2008	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendapatan per kapita/ bulan	203.948,00	257.750,00	26,38
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/ bulan	797.958,00	940.085,00	17,81
3	Median	623.750,00	700.000,00	12,22
4	Pendapatan rumah tangga minimum/ bulan	16.666,00	79.166,00	375,02
5	Pendapatan rumah tangga maksimum/ bulan	2.650.000,00	5.550.000,00	109,43

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 1,35 \$ US per hari dan garis kemiskinan kabupaten dapat dilihat pada grafik 3. Berdasarkan garis kemiskinan tingkat kabupaten tahun 2006, proporsi penduduk miskin di Selayar sebesar 41,7 persen. Proporsi penduduk miskin menjadi semakin besar jika digunakan garis kemiskinan 1,35 \$US per hari yaitu sebesar 83,3 persen termasuk miskin. Proporsi penduduk miskin ini lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan tingkat kabupaten (20,82 persen) pada tahun 2006. Tingginya angka kemiskinan juga dapat dilihat dari perubahan distribusi pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2006 terdapat 32 persen rumah tangga mempunyai pendapatan di bawah Rp 500 ribu,

sedangkan pada tahun 2008 persentase tersebut meningkat menjadi 35 persen (Tabel 4.5). Proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi (>2 juta rupiah) juga mengalami peningkatan dari 5 persen pada tahun 2006 menjadi 10,9 persen pada tahun 2008.

Grafik 4.1. Pendapatan Perkapita Desa Buki dan Bungaiya, dan Garis Kemiskinan



Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2008.

Perkembangan pendapatan penduduk di Buki dan Bungaiya secara lebih rinci dapat dilihat dari pendapatan menurut lapangan pekerjaan (Tabel 4.3). Pendapatan rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di perikanan laut menunjukkan perkembangan sebesar 14,02 persen dari tahun 2006-2008. Berdasar inflasi di daerah selama dua tahun terakhir (13,45 persen), maka secara umum perekonomian penduduk yang bekerja di sektor perikanan cenderung tidak mengalami perubahan. Hal ini berhubungan dengan tidak adanya perubahan teknologi penangkapan ikan, areal penangkapan dan jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan selama dua tahun terakhir. Nelayan di Kecamatan Buki dan Bontomatene secara umum tidak mengalami pergeseran sebagai nelayan mandiri yang menggunakan teknologi sederhana dalam penangkapan ikan di laut. Hasil melaut hanya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga bahkan kurang.

Pendapatan rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di budidaya rumput laut mengalami penurunan sebesar 12 persen. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan produktivitas rumput laut, bahkan beberapa warga telah meninggalkan budidaya ini karena kurang menguntungkan. Kegagalan budidaya rumput laut terutama terjadi di Buki, sehingga saat ini sudah tidak ada warga yang melakukan budidaya rumput laut. Berkaitan dengan rumput laut ini pada tahun 2005 di Kecamatan Bontomatene terdapat produksi 26,5 ton dalam luasan 75 unit areal penanaman. Sasaran areal penanaman rumput laut di kecamatan ini sebanyak 682 unit areal dan 100 persen dapat direalisasikan. Di tingkat kabupaten pada tahun yang sama terdapat luas usaha rumput laut 379,5 ha, dengan produksi 500,05 ton. Budidaya ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1067 jiwa.

Pendapatan rumah tangga di sector pertanian tanaman pangan mengalami peningkatan sebesar 68 persen dibandingkan dengan pendapatan tahun 2006. Peningkatan ini dapat terjadi karena meningkatnya pendapatan sampingan di luar sector pertanian. Hal ini disebabkan pola dan jenis tanaman yang ditanam petani tidak berbeda dibandingkan dengan tahun 2006, sehingga pendapatan dari sector pertanian cenderung tidak berubah. Perubahan pendapatan rumah tangga yang bekerja di sector ini lebih dipengaruhi oleh pendapatan dari luar sector pertanian atau adanya tambahan anggota rumah tangga yang bekerja. Rumah tangga yang bekerja di sector pertanian ini hampir semua tidak terpengaruh langsung oleh program coremap. Mengingat tanaman pangan rata-rata hanya dipanen sekali dalam setahun, maka petani tanaman pangan biasanya mempunyai pekerjaan sampingan seperti beternak kambing dan/ataupun sapi.

Kecamatan Buki dan Bontomatene merupakan kecamatan dengan kondisi tanah berbatu yang kurang mendukung untuk bercocok tanam. Jenis tanaman pangan yang biasa ditanam di daerah ini adalah jagung, dan sayuran (tomat, cabe dan kacang hijau). Meskipun kondisi tanah kurang subur tetapi masih ada sebagian kepala keluarga yang bekerja sebagai petani tanaman pangan dan keras. Sistem pertanian tanaman pangan yang dilakukan penduduk

masih sama dengan yang dilakukan pada tahun 2006 yaitu sistem pertanian dengan berpindah-pindah lahan (nomadik).

Tabel 4.3. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan KRT, di Desa Buki dan Bungaiya Kabupaten Selayar, 2006 dan 2008

No	Lapangan Pekerjaan	Pendapatan		Perkembangan (%)
		2006	2008	
1	Perikanan tangkap	812.140,00	925.985,00	14,02
2	Perikanan budidaya	1.416.666,00	1.246.666,00	-12,00
			0	
3	Pertanian pangan	393.935,00	661.892,00	68,02
4	Pertanian tanaman keras	348.750,00	1.255.555,00	260,02
			0	
5	Perdagangan	494.166,00	919.380,00	86,05
6	Jasa	1.053.817,00	1.562.976,00	48,32
			0	
7	Bangunan	1.261.166,00	796.083,00	-36,88
8	Peternakan	757.083,00	412.738,00	-45,48
9	Pertambangan	956.547,00	573.667,00	-40,03
10	Tidak bekerja	925.000,00	1.035.897,00	11,99
			0	
Total		797.958,00	940.085,00	17,81

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Peningkatan pendapatan yang lebih tinggi terjadi pada sector pertanian tanaman keras. Peningkatan pendapatan ini cukup signifikan, dan terjadi karena meningkatkan pendapatan rumah tangga dari pekerjaan sampingan. Sama halnya dengan pertanian tanaman pangan, pola dan hasil tanam tanaman keras tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2006 sehingga pendapatan dari sector ini relative sama. Tanaman keras yang umum ditanam di Kecamatan Bontomatene adalah jambu mete dan kelapa. Luas tanah yang digunakan untuk perkebunan jambu mete pada tahun 2001 adalah 689 ha, dengan produksi 276 ton. Berdasar data Kabupaten Selayar dalam angka tahun 2004, produksi jambu mete di kecamatan Bontomatene paling tinggi dibanding dengan kecamatan yang lain. Kelapa (dalam dan hibrida) menjadi produk unggulan kedua dengan luas lahan mencapai 4.301 ha dan produksi 3.623,7 ton.

Pendapatan rumah tangga yang kepala keluarganya bekerja di sektor perdagangan meningkat cukup tinggi (86,05 persen).

Peningkatan pendapatan di sektor ini kemungkinan disebabkan oleh penambahan anggota rumah tangga yang bekerja. Hal ini disebabkan secara riil sektor perdagangan di Buki dan Bungaiya tidak mengalami perubahan yang mencolok dari tahun 2006-2008. Konsumen, volume perdagangan dan barang dagangan yang diperdagangkan tidak mengalami perubahan. Oleh sebab itu, kondisi perdagangan masih mengalami stagnasi dan tidak ada pergerakan ke arah perbaikan. Di desa tersebut memang terdapat beberapa program pengentasan kemiskinan seperti PNPM dan coremap, tetapi dampak terhadap masyarakat belum terlihat dan dirasakan. Penduduk yang bekerja di sektor perdagangan meliputi pedagang ikan, sembako, dan lainnya. Modal dan keterbatasan jumlah barang yang diproduksi penduduk tampaknya menjadi faktor utama bagi pedagang dengan pendapatan yang rendah. Sebagian besar pedagang juga mempunyai ternak untuk membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Pendapatan penduduk yang bekerja di sektor bangunan mengalami penurunan sekitar 17 persen. Secara umum penduduk yang bekerja di bangunan masih sedikit hampir sama dengan tahun 2006. Penurunan pendapatan mungkin berhubungan dengan tidak adanya order yang diterima pada bulan-bulan akhir mendekati survey. Hal ini memberikan ilustrasi bahwa pendapatan di bangunan juga berfluktuasi, tergantung pada permintaan yang ada. Pada waktu tidak mendapatkan order, tukang biasanya bekerja di sektor lain yang memungkinkan untuk menambah pendapatan harian. Pekerjaan sebagai tukang memerlukan keahlian khusus yang tidak diwariskan oleh generasi sebelumnya, sehingga tukang bangunan biasanya memperoleh keahlian pada waktu merantau ke luar desa. Karena kebutuhan penduduk terhadap tukang bangunan cukup tinggi, sementara tenaga kerja bangunan masih terbatas, maka pekerjaan ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan rata-rata penduduk di sektor ini yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor yang lain.

Pendapatan penduduk di sektor peternakan mengalami penurunan sekitar 45,48 persen dari tahun 2006-2008. Penurunan pendapatan dapat terjadi karena berkurangnya jumlah ternak yang

dimiliki atau berkurangnya pendapatan sampingan. Peternakan umum yang dimiliki oleh masyarakat adalah sapi dan kambing. Jumlah ternak yang dimiliki berkaitan langsung dengan besarnya pendapatan peternak. Peternak kecil biasa memelihara sapi kurang dari 10 ekor, sementara peternak sedang mempunyai ternak lebih dari 50 ekor. Rata-rata pendapatan peternak di daerah ini sebesar Rp 757 ribu dengan variasi pendapatan yang cukup mencolok antara peternak sedang dengan kecil. Sebagian penduduk membiarkan ternaknya hidup bebas meskipun sebenarnya ternak tersebut mengganggu kepentingan umum. Kadang ternak yang hidup bebas membuat kotoran di tempat yang biasa digunakan untuk fasilitas umum seperti lapangan, pasar dan jalan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa dana *village fund* digunakan untuk pembangunan pagar pasar di desa Bungaiya. Peternakan sebenarnya merupakan salah satu alternatif pekerjaan yang cukup potensial di daerah ini, mengingat hutan yang biasa digunakan ternak untuk mencari makan masih cukup luas.

Pendapatan rumah tangga di sektor pertambangan mengalami penurunan 40,03 persen selama dua tahun terakhir disebabkan oleh berkurangnya order atau volume penjualan. Sektor pertambangan yang ada di Kecamatan Bontomatene terbatas pada penggalian batu karang di gunung. Batuan ini digunakan sebagai bahan dasar untuk fondasi rumah dan permintaan terbesar berasal dari pelabuhan Pamatata-Selayar yang sedang dalam tahap pengembangan selama beberapa tahun terakhir. Saat ini permintaan tersebut sudah menurun sehingga terjadi penurunan pendapatan penduduk yang bekerja sebagai penggali batu. Pendapatan yang diperoleh para penggali batu tergantung pada volume galian yang dihasilkannya, sementara volume galian berhubungan dengan kemampuan tenaga dan luas lahan yang dimiliki penduduk. Penduduk yang sudah tua dan luas lahan untuk penambangannya relatif sempit hanya memperoleh Rp 480 ribu perbulan, berasal dari penjualan batu sebanyak dua minggu sekali dan masing-masing sebesar satu mobil bak terbuka. Mereka yang masih kuat tenaganya dan memiliki lahan cukup luas biasanya juga menggunakan tenaga orang lain untuk penggalian batu.

Pendapatan di sektor jasa selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 48,2 persen. Peningkatan ini tidak ada hubungannya dengan program coremap, karena kegiatan coremap lebih ditujukan untuk para nelayan. Jenis pekerjaan jasa yang ada di Bontomatene dapat berupa jasa publik (pemerintahan) dan swasta. Jasa pemerintahan yang ada di kedua desa ini meliputi PNS di kecamatan, guru, TNI, dan aparat desa. Pendapatan yang diterima penduduk yang bekerja di jasa publik bervariasi sesuai dengan jabatan yang dimiliki serta pekerjaan tambahan yang dimiliki.

Tabel 4.4. Distribusi pendapatan rumah tangga di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2006 dan 2008

No	Pendapatan	2006	2008
1	< 500.000	32,0	35,0
2	500.000 – 999.999	41,0	30,8
3	1.000.000 – 1.499.999	16,0	13,3
4	1.500.000 – 1.999.999	6,0	10,0
5	2.000.000 – 2.499.999	3,0	5,0
6	> 2.500.000	2,0	5,9
N		100	120

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Sama halnya dengan tahun 2006, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan pada dasarnya bersifat fluktuatif karena dipengaruhi oleh kondisi musim (barat dan timur). Secara umum terjadi penurunan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan selama 2 tahun terakhir sebesar 2,51 persen. Penurunan ini memang masih relatif kecil, tetapi jika ditambah dengan inflasi selama 2 tahun terakhir yang mencapai lebih dari 11 persen maka penurunan tersebut menjadi sangat berarti. Secara lebih rinci, data penelitian menunjukkan bahwa penurunan pendapatan yang tertinggi terjadi pada waktu gelombang tenang/banyak ikan. Hal yang berbeda terjadi pada waktu musim gelombang kuat dan pancaroba, data penelitian menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan pada dua musim tersebut. Meskipun demikian, secara keseluruhan terjadi penurunan pendapatan, karena kegiatan kenelayan yang paling menonjol terdapat pada musim tenang.

Tabel 4.5. Rata-rata Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Buki dan Bungaiya, Tahun 2006 dan 2008

No	Jenis gelombang	Pendapatan		Perkembangan (%)
		2006	2008	
1	Gelombang Kuat	475.645,00	577.321,43	21,38
2	Pancaroba	479.735,00	696.463,00	45,18
3	Gelombang Tenang	1.085.784,00	796.098,00	-26,68
Gabungan		556.798,00	542.801,00	-2,51

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Nelayan Desa Buki melaut dalam satu wilayah penangkapan yang berdekatan dengan permukiman penduduk, sehingga dalam satu tahun mereka hanya melaut pada waktu musim banyak ikan/tenang dan pancaroba. Kondisi berbeda terdapat di Bungaiya dimana pada waktu musim gelombang kuat sebagian dari mereka dapat berpindah di perairan laut bagian utara. Perubahan gelombang menyebabkan ada sebagian nelayan yang tidak mempunyai pendapatan dari melaut, karena mereka memang tidak melaut atau melaut tetapi tidak ada hasil yang didapatkan. Pada waktu gelombang kuat, beberapa sarana tangkap seperti sero bahkan rusak dan tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut.

4.2.2. Deskripsi Pendapatan di Kawasan Daratan Pulau Kecil

Pendapatan dan pengeluaran merupakan dua hal yang saling terkait, yang dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga pada umumnya dipengaruhi besar kecilnya pendapatan rumah tangga, dimana semakin tinggi pendapatan rumah tangga, proporsi pengeluaran semakin tinggi dan bervariasi diantaranya untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Sebaliknya rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah, biasanya sebagian besar dibelanjakan

untuk memenuhi kebutuhan pokok (beras dan lauk pauk) dan untuk biaya sekolah anak dan kesehatan. Pendapatan masyarakat kawasan pulau-pulau kecil (Kecamatan Pasimasunggu Timur) sangat tergantung dari sumber daya laut, lahan pertanian dan perkebunan. Pendapatan rumah tangga dalam uraian ini merupakan pendapatan seluruh anggota rumah tangga dari pekerjaan utama dan tambahan.

Tabel 4.6. Statistik Pendapatan Rumah tangga di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Selayar, Tahun 2006 dan 2008

No	Pendapatan	Nilai (Rp)		Perkembangan (%)
		2006	2008	
1	Pendapatan per kapita /bulan	126.380,06	194.818	54,10
2	Rata-rata pendapatan rumah tangga/ bulan	507.122,50	724.881	42,9
3	Median/ Nilai Tengah	125.000,00	535.833	328,6
4	Pendapatan Rumah Tangga Minimum/ bulan	30.000,00	45.833	52,7
5	Pendapatan Rumah tangga Maksimum/bulan	2.600.000,00	3.116.666	19,8

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan ini pada tahun 2008 memperlihatkan kenaikan sebesar 42,9 persen dibandingkan dengan tahun 2006. Begitu pula pendapatan perkapita juga naik 54 persen pada tahun yang sama. Kenaikan pendapatan rumah tangga tahun 2008, karena pada saat ini hasil panen dan harga padi yang cukup baik, adanya kenaikan harga ikan baik hasil laut maupun hasil budidaya (tambak). Pendapatan minimum dan maximum rumah tangga per bulan naik masing-masing 52 persen dan hampir 20 persen sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.6.

Data di atas memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara pendapatan minimum dibandingkan dengan pendapatan maximum rumah tangga tahun 2006 dan 2008. Rumah tangga yang memiliki

pendapatan tinggi pada umumnya mempunyai beberapa sumber pendapatan antara lain dari perikanan, pertanian/ perkebunan, perikanan budidaya (tambak), dan menjadi tukang kayu atau sebagai guru (PNS). Selain itu diantara mereka memiliki usaha perdagangan (warung/toko sembako) sehingga secara absolut pendapatannya menjadi besar. Perbedaan pendapatan yang cukup mencolok¹ terjadi antara rumah tangga satu dengan yang lain, antara rumah tangga kaya dan miskin tidak dapat dihindarkan, hal tersebut karena perbedaan terhadap akses informasi, modal dan kepemilikan jenis alat serta teknologi penangkapan. Kecilnya pendapatan rumah tangga, mereka (nelayan) menggunakan alat tangkap yang sangat sederhana seperti misalnya pancing, jaring atau berasal dari sero. Selain itu, rumah tangga kemungkinan tidak memiliki aset lain seperti lahan pertanian dan perkebunan. Faktor lain kemungkinan tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja, sehingga tidak mempunyai pendapatan tambahan, misalnya buruh tani/perkebunan, anak buah kapal (ABK) atau usaha perdagangan.

Nelayan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, seperti halnya nelayan di Kecamatan Bontomantene merupakan nelayan yang bekerja mandiri, tidak tergantung pada pemilik modal (bos) sehingga mereka dapat menjual hasil tangkapan ikannya secara bebas kepada penduduk atau pedagang/pengumpul dan dijual di pasar. Pemilikan alat tangkap dan penggunaan teknologi penangkapan demikian sederhana dan kemampuan melaut (*fishing ground*) yang relatif terbatas dengan rata-rata 2-4 jam sehari sehingga hasil tangkapan yang diperoleh juga sangat kecil sehingga penghasilan mereka juga terbatas..

Penangkapan ikan dengan memasang sero yang terbuat dari jaring biasanya dilakukan pada waktu akan menggunakan sero (awal musim). Setelah sero selesai dipasang nelayan akan mengontrol dan mengambil ikan yang dilakukan setiap pagi hari dan pada setiap hari pasar. Ikan yang diambil dari sero selain untuk konsumsi sendiri, dijual kepada tetangga, di jual di pasar atau pedagang dan dijual ke desa lain pada saat hari pasar. Hasil tangkapan laut yang tidak terjual dalam bentuk segar biasanya dikonsumsi sendiri atau diberikan

kepada tetangga, karena saat ini belum banyak penduduk yang mengolah ikan menjadi ikan asin.

Pendapatan rata-rata rumah tangga di kawasan pulau-pulau kecil (Desa Bontobulaeng dan Bontobaru) dalam satu bulan sebesar Rp.126.380,-(2006) dan Rp 194.818,- (2008). Pendapatan tersebut relatif kecil bila dibandingkan batas kemiskinan yang dikeluarkan PBB sebesar 1 dollar per hari atau Rp. 300.000,- per bulan, sementara Bank Dunia menetapkan sebesar 2 dollar per hari, atau sebesar Rp.600.000 per bulan. Dengan rata-rata pendapatan per bulan tersebut dibandingkan dengan batas kemiskinan yang dikeluarkan PBB dan Bank Dunia menunjukkan proporsi penduduk miskin di Kecamatan Pasimasunggu Timur (Desa Bontobulaeng dan Bontobaru) masih sangat tinggi mencapai sekitar 80 persen sehingga kondisinya sangat miskin, masih jauh dari tingkat kesejahteraan yang mereka inginkan.

Kecilnya rata-rata pendapatan rumah tangga pada tahun 2006 dan 2008 tersebut kemungkinan rendahnya tingkat ketrampilan dan sulitnya memperoleh pekerjaan yang memadai serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Selain itu, rumah tangga mengalami kesulitan dalam pemasaran berbagai hasil laut (ikan), tambak dan pertanian (beras, sayuran). Komoditas tersebut hanya dapat mereka jual pada hari pasaran, yang berlangsung tiga kali dalam satu minggu yaitu pada hari minggu, selasa dan Jum'at yang berbeda hari antara desa satu dengan lainnya. Pada hari-hari tersebut rumah tangga baru memperoleh pendapatan (uang) sehingga tidak setiap saat rumah tangga memperoleh pendapatan.

Pendapatan rumah tangga dapat dilihat menurut lapangan pekerjaan. Hal tersebut sangat menarik karena terdapat perbedaan rata-rata pendapatan menurut lapangan pekerjaan yang cukup besar antara lapangan pekerjaan satu dengan lainnya. Dalam hal ini terdapat disparitas/perbedaan pendapatan menurut lapangan pekerjaan seperti yang terlihat dalam Tabel 4.7 di bawah

Tabel 4.7. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Lapangan Pekerjaan KRT di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru Kabupaten Selayar 2006 dan 2008

No	Lapangan Pekerjaan	Rata-rata Pendapatan		Perkembangan (%)
		2006	2008	
1	Perikanan Laut	455.826,00	576.321	26,43
2	Tanaman Pangan	387.822,08	640.846	65,2
3	Tanaman Keras	228.116,66	467.500	104,9
4	Perdagangan	109.270,00	912.541	732.10
5	Jasa (Guru, Staf Desa)	1.300.000,00	1.122.314	-13,66
6	Bangunan	1.023.750,00	1.222.916	19,45
7	Pertambangan	620.000,00	---	-
8	Lainnya	677.500,00	977.750	44,30

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Perkembangan pendapatan penduduk di Bontobaru dan Bontobulaeng dapat dilihat dari pendapatan menurut lapangan pekerjaan (Tabel 4.7). Pendapatan rumah tangga yang kepala rumah tangganya bekerja di perikanan laut memperlihatkan kenaikan sebesar 26,43 persen dari tahun 2006-2008. Kenaikan tersebut karena inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM pada tahun 2007, sehingga dengan adanya inflasi tersebut secara umum pendapatan penduduk yang bekerja di sektor perikanan laut tidak mengalami perubahan. Hal tersebut karena tidak adanya perubahan alat tangkap dan teknologi penangkapan ikan. Selain itu lokasi area (fishing ground) penangkapan dan jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan relatif sama. Sehingga hasil melaut hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.

Pendapatan rumah tangga di sektor pertanian tanaman pangan pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 65,2 persen dibandingkan dengan pendapatan tahun 2006. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena meningkatnya hasil pertanian berupa padi, bahkan padi tersebut dijual keluar pulau untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk pulau lain. Pendapatan di luar sektor pertanian. Perubahan pendapatan rumah tangga yang bekerja di sektor ini tidak dipengaruhi secara langsung oleh program coremap, tetapi lebih dipengaruhi oleh pendapatan dari kepemilikan aset lahan

pertanian atau perkebunan serta adanya anggota rumah tangga yang bekerja. Tanaman pangan terutama padi di Pasimasunggu Timur merupakan pertanian dengan sistem tadah hujan yang rata-rata hanya dipanen sekali dalam setahun. Selain padi, jenis tanaman lain yang biasa ditanam penduduk di daerah ini sayuran berupa sawi, kol, tomat, dan cabe.

Peningkatan pendapatan yang lebih tinggi terjadi pada sektor pertanian tanaman keras. Peningkatan pendapatan ini cukup signifikan sebesar 104,9 persen pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2006. Peningkatan pendapatan rumah tangga produksi dan hasil penjualan jambu mete dan kelapa (kopra) lebih baik dibandingkan dengan tahun 2006 sehingga pendapatan dari sektor ini relative meningkat. Berdasar data Kabupaten Selayar dalam angka tahun 2004, produksi jambu mete dan kelapa di kecamatan Pasimasunggu Timur cukup baik dan menjadi produk unggulan di kawasan ini. Luas lahan tanaman keras di Kecamatan Pasimasunggu Timur mencapai 965 ha dan tanaman pangan (padi) memiliki luas sekitar 1000 Ha.

Pendapatan rumah tangga yang kepala keluarganya bekerja di sektor perdagangan pada tahun 2008 meningkat sangat tinggi mencapai 732,10 persen. Peningkatan pendapatan di sektor ini kemungkinan disebabkan oleh penambahan jumlah komoditas yang dijual pemilik usaha perdagangan dan bertambahnya jumlah hari pasar yang semula satu kali dalam satu minggu pada tahun 2006 menjadi 3 kali dalam satu minggu pada tahun 2008. Perubahan peningkatan pendapatan yang terjadi antara tahun 2006-2008 karena konsumen semakin banyak yang berasal dari pulau-pulau sekitar yang datang untuk berbelanja dan menjual dagangan pada hari pasar. Selain itu, volume perdagangan dan barang dagangan yang diperdagangkan semakin bervariasi dan semakin banyak sehingga cenderung pendapatan menjadi lebih baik. Penduduk yang memiliki usaha perdagangan meliputi pedagang ikan, sembako, bahan bangunan, usaha perbengkelan dan usaha rumah tangga (kue) dan lainnya. Berdasarkan pengamatan, sebagian kecil pedagang juga memiliki ternak sebagai simpanan yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk membantu memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat mendesak.

Pendapatan penduduk yang bekerja di sektor bangunan mengalami sedikit peningkatan sekitar 19,45 persen. Secara umum penduduk yang bekerja di bangunan jumlahnya tidak jauh berbeda dengan tahun 2006. Peningkatan pendapatan mungkin berhubungan dengan adanya order pembangunan/perbaikan rumah warga dan pembangunan sarana umum yang dibangun pada beberapa bulan sebelum penelitian dilaksanakan, seperti pembangunan MCK dan sanitasi lingkungan bantuan Coremap di desa Bontobulaeng dan Bontobaru. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa pendapatan pekerja bangunan sangat berfluktuasi, tergantung pada permintaan dan adanya proyek yang terdapat di wilayah tersebut. Berdasarkan pengamatan, tukang bangunan pada waktu tidak memperoleh order biasanya bekerja di sektor lain, seperti nelayan, petani yang memungkinkan untuk mendapat penghasilan harian. Pekerjaan sebagai tukang bangunan memerlukan keahlian khusus yang tidak diwariskan oleh generasi sebelumnya, tukang bangunan biasanya memperoleh keahlian pada waktu merantau ke luar desa. Karena butuhan penduduk terhadap tukang bangunan cukup tinggi, sementara tenaga kerja bangunan jumlahnya masih terbatas, maka pekerjaan ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan rata-rata penduduk di sektor ini yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor yang lain.

Pendapatan penduduk di sektor peternakan dari tahun 2006-2008 tidak terlihat secara jelas karena pendapatan penduduk dari usaha ternak merupakan bagian dari lainnya. Pada umumnya penduduk memiliki ternak antara lain sapi, kambing dan kambing yang jumlahnya relatif kecil satu atau lima ekor. Pada umumnya penduduk membiarkan ternaknya hidup bebas di lapangan sekitar rumahnya untuk mencari rumput, kadang-kadang masuk halaman dan lahan orang lain, memakan tanaman sehingga mengganggu kepentingan umum. Usaha ternak sebenarnya merupakan salah satu alternatif sebagai aset yang sewaktu-waktu dapat dijual untuk memperoleh uang tunai guna memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti bayar uang sekolah atau biaya rumah sakit. Pendapatan peternak berdasarkan observasi dan pengamatan di daerah ini tidak

menentu tergantung jenis ternah dan jumlah ternak yang dimiliki peternak.

Sedangkan rumah tangga yang mempunyai pekerjaan di bidang pertambangan (penggalian batu karang) pada tahun 2006 memiliki pendapatan yang cukup baik sebesar Rp. 620.000,- yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan di sektor pertanian maupun perikanan. Tingginya pendapatan ini karena permintaan akan batu karang untuk konstruksi pembangunan rumah dan pembangunan sarana ekonomi dan perkantoran cukup tinggi yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan sehingga pendapatan yang mereka terima juga semakin tinggi.

Pendapatan rumah tangga di sektor pertambangan dalam dua tahun terakhir tidak dapat tercover sehingga terlihat sampai sejauh mana adanya perubahan pendapatan penduduk yang bekerja di sektor pertambangan. Hal ini kemungkinan penduduk yang pada tahun 2006 bekerja di pertambangan mengalihkan pekerjaannya di sektor lain yang lebih menguntungkan dengan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Permintaan batu karang yang digunakan sebagai bahan dasar untuk fondasi rumah dan pembangunan perkantoran mulai berkurang, karena pembangunan proyek pemerintah pada tahapan penyelesaian sehingga volume permintaan batu galian juga semakin berkurang.

Sementara itu jenis pekerjaan jasa yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur pada umumnya merupakan jenis pekerjaan jasa publik (pemerintahan). Jasa pemerintahan yang ada di ke dua desa ini meliputi PNS (pegawai kantor kecamatan/desa, guru, dan TNI/Polri) Pendapatan yang diterima rumah tangga yang bekerja di jasa publik sangat bervariasi sesuai dengan jabatan, pangkat, lama bekerja dan pekerjaan tambahan yang dimiliki. Pegawai tersebut pada mempunyai pendapatan yang cukup baik, karena setiap bulan memperoleh penghasilan yang konsisten.

Namun demikian pendapatan di sektor jasa pada tahun 2008 mengalami penurunan (-13,66 persen) dibandingkan pada tahun 2006. Penyebab penurunan pendapatan sektor jasa ini belum dapat diketahui

secara pasti, kemungkinan sebagaimana mereka (terutama) guru telah memasuki masa pensiun sehingga pendapatan yang mereka terima menjadi berkurang. Pendapatan berdasarkan jenis dan lapangan pekerjaan memperlihatkan adanya disparitas yang cukup mencolok sehingga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi penduduk setempat. Besar kecilnya pendapatan rumah tangga juga dapat terlihat dari distribusi pendapatan rumah tangga (lihat tabel 4.8).

Tabel 4.8. Distribusi Rumah Tangga Menurut Tingkat Pendapatan di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Kabupaten Selayar Tahun 2006 dan 2008

No	Besaran Pendapatan	2006		2008	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1	< 500.000	68	68	58	45,0
2	500.000 – 999.999	16	16	42	32,6
3	1.000.000 – 1.499.999	10	10	16	12,4
4	1.500.000 - 1.999.999	4	4	7	5,4
5	2.000.000 – 2.499.999	1	1	3	2,3
6	2.500.000 – 2.999.999	1	1	1	0,8
7	> 3jt	0	0	2	1,6
	Total	100	100	129	100,0

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Tingginya angka kemiskinan juga dapat dilihat dari perubahan distribusi pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2006 terdapat 68 persen rumah tangga mempunyai pendapatan di bawah Rp 500 ribu, sedangkan pada tahun 2008 persentase tersebut menurun menjadi 45 persen. Penurunan proporsi rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 500 ribu belum dapat dikatakan sebagai semakin membaiknya kesejahteraan penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur. Hal ini memperlihatkan bahwa baik pada tahun 2006 maupun 2008 sebagian besar rumah tangga ini masih hidup di bawah garis kemiskinan apabila dilihat dengan batas kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia sebesar 2 dollar per hari atau sekitar atau sekitar Rp 600.000,- per bulan. Sementara proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan tinggi di atas Rp 2 juta rupiah mengalami peningkatan yang semula 2 persen pada tahun 2006 menjadi 4,7 persen pada tahun 2008.

Rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi tersebut kemungkinan adalah rumah tangga yang memiliki sumber pendapatan utama dan pendapatan tambahan seperti usaha perdagangan (warung). Sebagai contoh seorang memiliki pekerjaan utama sebagai PNS (guru, pegawai pemerintah) biasanya juga sebagian memiliki pekerjaan tambahan yang berasal dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, budidaya perikanan (tambak) dan memiliki ternak sapi, kambing atau ayam. Beberapa rumah tangga yang memiliki pendapatan tinggi tersebut, kemungkinan rumah tangga tersebut memiliki anggota rumah tangga yang bekerja yang memberi sumbangan pendapatan dalam rumah tangga.

Sementara itu rumah tangga yang memiliki pendapatan antara Rp.500.000 – 999.999 memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan yang mencapai dua kali, dari 16 persen menjadi 32,6 persen. Begitu pula rumah tangga yang memiliki pendapatan Rp.1.000.000,- - Rp.1.999.999,- juga memperlihatkan kenaikan dari tahun 2006-2008. Kenaikan tersebut kemungkinan karena kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tambahan, diluar pekerjaan utama dan adanya anggota rumah tangga yang bekerja untuk membantu penghasilan rumah tangga.

Melihat gambaran di atas menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagian besar masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan bahkan masih jauh dari sejahtera, sesuai dengan ukuran yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, dan hanya sebagian kecil penduduk yang menunjukkan tingkat kesejahteraannya. Hal ini juga memperkuat beberapa hasil penelitian selama ini bahwa masyarakat petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang tergolong masyarakat miskin.

Pendapatan rumah tangga kenelayan pada dasarnya memiliki pendapatan yang tidak menentu (tidak stabil) Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pemilikan sarana perikanan, alat tangkap, wilayah tangkapan dan keadaan musim barat-timur serta banyak hari nelayan melaut. Nelayan di desa Bontobulaeng dan Bontobaru pada umumnya dapat melaut pada saat gelombang tenang dan musim pancaroba, sedangkan pada musim angin kencang mereka tidak melaut sehingga

berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Untuk mengetahui pendapatan nelayan berdasarkan musim (gelombang kuat, pancaroba dan gelombang lemah).

Tabel 4.9. Statistik Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan di Desa Bontobulaeng dan Bontobaru, Tahun 2006 dan 2008

Musim	2006	2008	Perkembangan
Gel. Kuat	135.500	144.634,00	6,70
Pancaroba	258.661	280.833,00	8,57
Gel. Lemah	463.852	685.581,00	47,80

Sumber : Data primer, Survei Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, 2006 dan 2008.

Tabel 4.9 di atas memperlihatkan rata-rata pendapatan kenelayanan yang sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh musim (gelombang lemah, pancaroba dan gelombang kuat). Pendapatan nelayan pada saat musim gelombang tenang sebesar Rp. 463.852,- (2006) meningkat menjadi Rp. 685,581 pada tahun 2008 atau meningkat sekitar 48 persen. Pendapatan ini lebih baik dibandingkan dengan pendapatan pada musim pancaroba dan pada saat gelombang kuat. Pada musim gelombang tenang/lemah nelayan mempunyai jumlah hari melaut relative panjang rata-rata 15 hari melaut, jumlah perolehan ikan banyak sehingga pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan pada musim lain.

Sementara itu terjadi perbedaan yang mencolok pendapatan antara musim gelombang tenang dibandingkan dengan gelombang kuat, meskipun pendapatannya meningkat. Pendapatan pada saat gelombang kuat pada tahun 2006 sebesar Rp. 135.500 meningkat menjadi Rp. 144.643,- atau meningkat sekitar 6,7 persen. Pada saat gelombang kuat sebenarnya ikan relative banyak, permintaan ikan tinggi, tetapi hasil tangkapan terbatas karena kemampuan nelayan melaut sangat terbatas, rata-rata hari nelayan melaut hanya satu sampai dua kali bahkan ada yang tidak melaut karena gelombang besar dan angin kencang sehingga perolehan ikan sedikit yang selanjutnya berdampak pada pendapatan nelayan. Sedangkan pada

musim pancaroba pendapatan nelayan 2006-2008 juga memperlihatkan kenaikan sebesar 8,57 persen.

Pada musim gelombang kuat harga berbagai jenis ikan satu ikat (6-8 ekor) sangat mahal dapat mencapai harga Rp 15 ribu- Rp 20 ribu. Hal sama terjadi pada musim pancaroba kemampuan melaut nelayan masih terbatas (masa transisi), perolehan ikan juga masih relatif sedikit sehingga harga ikan juga masih relatif tinggi satu ikat antara Rp.8000,-- Rp. 10.000,-, lebih rendah dibandingkan pada musim gelombang kuat. Pada saat musim gelombang tenang jumlah ikan relatif banyak, kemampuan melaut relatif lama dan daya jangkauan jelajah (*fishing ground*) juga jauh sehingga terjadi over (kelebihan) produksi. Kelebihan produksi tersebut selanjutnya menyebabkan harga ikan menjadi rendah, dengan rata-rata harga ikan pada kisaran Rp. 3000,- sampai Rp. 6.000,- setiap ikat sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga baik pada tahun 2006 maupun 2008.

Pendapatan tersebut di atas selain dipengaruhi musim, juga dipengaruhi oleh kepemilikan sarana dan jenis alat tangkap nelayan. Begitu pula jumlah hari melaut nelayan yang berbeda pada setiap musim gelombang akan berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Rata-rata hari melaut pada saat gelombang kuat sekitar 2 hari, sementara pada gelombang lemah jumlah hari melaut nelayan dapat mencapai 15 hari, bahkan satu turo (istilah lokal) penuh selama 20-23 hari setiap bulan. Selain itu, kepemilikan alat tangkap ikan akan berpengaruh pada jumlah perolehan ikan. Pendapatan rumah tangga nelayan pada tahun 2006 dan 2008 menurut musim memperlihatkan perbedaan pendapatan yang cukup besar antara rumah tangga yang satu dengan yang lain pada saat musim yang berbeda.

4.3. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan

Analisis terhadap pendapatan penduduk di kedua kawasan (daratan dan pulau kecil) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga dan perkapita di kedua kawasan. Pendapatan rumah tangga di Bontomatene dan Buki selama dua tahun

terakhir meningkat sebesar 17,81 persen sedangkan di Pasimasunggu timur sebesar 42,9 persen. Meskipun terjadi peningkatan cukup tinggi, tetapi sebagian besar penduduk di kedua kawasan masih hidup di bawah garis kemiskinan kabupaten. Tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi jika diukur dari batasan garis kemiskinan 1,35 \$ US per hari. Distribusi pendapatan rumah tangga juga memperlihatkan jumlah rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan rendah cukup besar. Peningkatan pendapatan ini juga lebih rendah dari peningkatan PDRB kabupaten tahun sebelumnya yang meningkat 12,83 persen per tahun⁵.

Meskipun peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan Pulau Kecil lebih besar dibandingkan dengan pulau besar, tetapi rata-rata pendapatan perkapita dan pendapatan rumah tangga di kawasan daratan tetap lebih besar dibandingkan kawasan pulau kecil. Pendapatan perkapita di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil pada tahun 2008 masing-masing sebesar 276 ribu rupiah dan 195 ribu rupiah. Adapun rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan daratan pulau besar 940 ribu rupiah dan di pulau kecil 725 ribu rupiah. Distribusi pendapatan di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kedua kawasan mempunyai pendapatan rendah yaitu di bawah Rp 500 ribu. Peningkatan pendapatan penduduk di kedua kawasan berkaitan dengan berbagai faktor sebagai berikut :

- **Teknologi Penangkapan Ikan**

Pendapatan rumah tangga di Buki dan Bungaiya yang kepala rumah tangganya bekerja di perikanan laut menunjukkan

⁵ Berdasar perkembangan PDRB Kabupaten Selayar tahun 2003-2005 (12,83 persen pertahun), maka peningkatan pendapatan sebesar 17,81 persen selama dua tahun terakhir di Buki dan Bontomantene justru lebih rendah dari perkembangan PDRB Kabupaten sebelum mendapatkan program coremap. Perkembangan PDRB sebelum ada program juga menunjukkan bahwa target pertumbuhan penduduk sebesar 2 persen pertahun di lokasi coremap sebenarnya tidak logis sebab tanpa program pun perkembangan PDRB sudah jauh berada di atas 2 persen per tahun.

perkembangan sebesar 14,02 persen dari tahun 2006-2008, sedangkan di Pasimasunggu Timur sekitar 26 persen. Berdasar inflasi di daerah selama dua tahun terakhir (13,45 persen), maka secara umum perekonomian penduduk yang bekerja di sektor perikanan di Bontomatene cenderung tidak mengalami perubahan. Hal ini berhubungan dengan tidak adanya perubahan teknologi penangkapan ikan, areal penangkapan dan jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di Bontomatene selama dua tahun terakhir. Nelayan di Kecamatan Buki dan Bontomatene secara umum tidak mengalami pergeseran sebagai nelayan mandiri yang menggunakan teknologi sederhana dalam penangkapan ikan di laut. Hasil melaut hanya bisa digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga bahkan kurang. Beberapa alat tangkap seperti sero bahkan telah ditinggalkan di Buki karena tidak lagi memberikan hasil yang diharapkan. Modal yang diperlukan untuk pembuatan sero sekitar 7,5 juta rupiah, tetapi hasil yang didapatkan tidak dapat menutup modal tersebut.

Peningkatan pendapatan nelayan di Pasimasunggu Timur salah satunya berkaitan dengan adanya kegiatan penangkapan ikan sunu dan perluasan areal penangkapan ikan sebagian nelayan. Perluasan areal penangkapan ini berkaitan dengan adanya bantuan motor katingting. Motor *katingting* memungkinkan mereka untuk dapat memancing ikan sunu di daerah karang, sehingga hasil tangkapannya lebih banyak. Penjualan ikan sunu juga tidak mengalami kendala karena telah ada penampung ikan hidup (sunu dan kerapu) yang ada di desa tersebut. Hal itu berbeda dengan tahun 2006, yaitu mereka tidak dapat menangkap ikan sunu hidup karena tidak adanya penampung yang siap membeli ikan yang mereka tangkap.

- **COREMAP**

Pada saat penelitian dilakukan, program bantuan dari Coremap yang sudah turun adalah program untuk pengembangan fisik (*village grant*), yang berjumlah Rp 50 juta per desa. Adapun program untuk pemberdayaan masyarakat melalui kredit bergulir baru turun di Desa Bonto Baru, itupun baru separuhnya, yang berjumlah Rp 25 juta. Sedangkan di Desa Bonto Bulaeng program kredit bergulir itu justru

sama sekali belum turun, karena terlambat pengajuan proposalnya. Akibat dari kondisi tersebut, maka pemberdayaan masyarakat yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan ekonomi belum dilakukan di daerah ini.

Memang benar bahwa di Desa Bonto Baru kredit bergulir sudah turun dan dibagikan kepada anggota pokmas yang meminjam, namun karena pelaksanaannya baru satu bulan, maka dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat belum terwujud. Keberadaan dana bergulir juga ditanggapi secara pesimis oleh masyarakat, karena jumlah pinjaman kredit yang diberikan yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar Rp 1 juta per peminjam. Dengan jumlah dana sebesar itu maka dianggap tidak signifikan untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut maka program Coremap sampai dengan dilaksanakannya penelitian ini sama sekali belum berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua desa.

Dana village grand di Buki dan Bungaiya telah turun masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Dana di Bungaiya digunakan pembangunan 1 unit pagar desa dan 5 unit WC umum. Pagar pasar desa dimaksudkan untuk melindungi pasar dari hewan ternak yang dilepas oleh masyarakat setempat. Secara umum manfaat pagar bagi warga sebenarnya kurang besar, tetapi usulan tersebut tetap dilakukan karena sudah menjadi kesepakatan masyarakat. Perlindungan pada ternak semestinya juga melibatkan peternak sebagai pemilik sehingga tidak merugikan orang lain.

Dana village grand di Buki digunakan untuk pembuatan 1 unit kapal joloro, rehap 4 unit masjid dan 20 unit WC keluarga. Rumah tangga yang mendapat bantuan pembuatan WC sebanyak 40 KK, masing-masing 500 ribu rupiah yang diberikan dalam bentuk material (3 sak semen, 0,5 kubik pasir dan 100 batako). Masing-masing KK diwajibkan melengkapi bahan-bahan yang masing kurang sesuai dengan WC yang diinginkan. Saat ini 90 persen penerima telah menyelesaikan pembuatan WC tersebut. Bantuan akan dipindahkan ke warga lain jika penerima tidak menyelesaikan pembangunan WC sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Joloro dibuat sendiri oleh tukang

di desa, sehingga kapal tersebut mempunyai kekuatan yang tidak diragukan lagi. Saat penelitian ini sedang dilakukan joloro masih dalam proses pembuatan. Pengurus desa merencanakan untuk menggunakan joloro sebagai salah satu alat pemantauan dan pengawasan penyelamatan terumbu karang.

Dana *seed fund* di Desa Buki dan Bungaiya juga sudah turun sebesar 25 juta rupiah dan sebagian besar telah disalurkan kepada peminjam meskipun tidak melalui pokmas. Dana yang diterima masing-masing orang sekitar 1 juta rupiah dengan aturan pengembalian sesuai dengan ketentuan LKM masing-masing. Namun demikian, dana pinjaman tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya bagi peningkatan pendapatan masyarakat karena jumlahnya relatif kecil dan baru tersalur kurang lebih 2 bulan yang lalu.

• Program Pemerintah yang lain

Program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di dua desa kawasan pulau kecil juga sangat minim. Program pengembangan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) tidak terdapat di wilayah Kabupaten Selayar, sehingga masyarakat di Pasimasunggu Timur juga tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dana dari program PEMP, yang sebetulnya merupakan program dari pemerintah pusat.⁶ Begitu pula program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) juga tidak terdapat di Kecamatan Pasimasunggu Timur. Memang di wilayah ini ada bantuan bibit padi dari Pemda Kabupaten Selayar kepada para petani, namun jumlahnya tidak banyak.

Selain bantuan bibit padi, untuk peningkatan pendapatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Selayar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan motor *katingting* sebagai alat bantu untuk kegiatan kenelayanan, dengan harapan agar mobilitas penangkapan lebih baik. Menurut informasi dari beberapa warga yang

⁶ Menurut informasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Selayar, selama dua tahun (2007 dan 2008) Kabupaten Selayar memang tidak memperoleh bantuan dana PEMP, walaupun sudah mengajukan proposal ke Departemen kelautan.

telah mendapatkan bantuan, dengan adanya motor *katingting* maka memungkinkan mereka untuk dapat memancing ikan sunu di daerah karang, sehingga hasil tangkapannya lebih banyak. Lebih-lebih dengan keberadaan penampung ikan hidup (sunu dan kerapu) yang ada di desa ini, sehingga penjualan ikan sunu tidak mengalami kesulitan lagi.⁷ Hal itu berbeda dengan tahun 2006, yaitu mereka tidak dapat menangkap ikan sunu hidup karena tidak adanya penampung yang siap membeli ikan yang mereka tangkap.

Walaupun bantuan *katingting* dari DKP itu jumlahnya tidak banyak,⁸ dan pemberian bantuan juga belum lama diterima oleh warga, namun hal itu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. sehingga pendapatannya bisa meningkat. Hal itu karena harga ikan sunu di daerah ini cukup mahal, yaitu mencapai Rp 150.000,- per kg untuk kelas super. Sebetulnya beberapa warga juga sudah memiliki *katingting* sendiri, melalui pinjaman dari penampung ikan hidup. Akan tetapi, berbeda dengan *katingting* bantuan dari pemerintah, bantuan *katingting* yang berasal dari pinjaman penampung ikan hidup itu mengakibatkan harga jual ikan sunu dari nelayan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga jika nelayan tidak menggunakan *katingting* "bantuan" dari penampung, ikan sunu yang didapat bisa dibeli dengan harga Rp 150.000,- per kg, maka jika *katingting* yang digunakan merupakan pinjaman dari penampung, harganya di bawah itu.

⁷ Penampung sunu memasarkan sunu yang sudah dibeli dari nelayan ke bos Benteng, Pasimasunggu, dan selanjutnya dari bos di Benteng dibeli oleh bos besar dari Bali, dengan menggunakan kapal yang datang ke Benteng sekitar satu bulan sekali. Sedangkan penampung ikan hidup menjual ikan yang dibeli dari nelayan dengan membawanya ke Makasar.

⁸ Menurut informasi, dari dua desa, nelayan yang sudah memperoleh bantuan *katingting* baru nelayan desa Bonto Baru dengan jumlah 20 *katingting*, sedangkan nelayan Bonto Bulaeng belum memperoleh bantuan; karena terlambat dalam mengajukan proposal. Bantuan *katingting* untuk Desa Bonto Bulaeng diperkirakan baru bisa diberikan akhir tahun 2008 atau awal tahun 2009.

Menurut informasi dari beberapa nelayan, harga sunu yang dibeli oleh penampung dengan harga Rp 150.000,- itu jika di daerah lain bisa dijual lebih mahal lagi, yaitu mencapai Rp 200.000,- per kg. Perbedaan harga yang cukup besar itu disebabkan penampung yang ada di daerah ini merupakan satu-satunya penampung ikan hidup yang ada, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan untuk menjual ke tempat yang lain. Selain itu, karena ada monopoli dalam pembelian ikan sunu hidup, maka penampung juga leluasa membuat peraturan yang merugikan nelayan. Sebagai contoh, jika satu ekor ikan sunu beratnya lebih dari 1 kg, maka oleh penampung hanya dibeli dengan harga sama dengan 1 kg.⁹ Berdasarkan kondisi tersebut maka dikaitkan dengan pendapatan masyarakat, bisa dikatakan bahwa program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan alat tangkap kenelayanan berpengaruh bagi peningkatan pendapatan masyarakat di daerah ini.

Hal yang berbeda terjadi di Desa Buki dan Bungaiya dimana kedua desa tersebut mendapatkan dana dan PNPM. Sebagian masyarakat bahkan tidak dapat meminjam ke LKM bentukan coremap karena masih mempunyai tanggungan pinjaman kepada program-program yang sebelumnya telah ada di kedua desa tersebut. Akan tetapi sebagaimana program pemerintah lain yang selama ini dikembangkan di perdesaan, program-program tersebut belum dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah memberikan bantuan perahu mesin kepada kelompok nelayan di Buki, akan tetapi pemanfaatannya masih kurang bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Kelompok nelayan yang menggunakan perahu tersebut, hanya dibebani biaya sewa bulanan yang relatif murah, tetapi mayoritas masyarakat tidak berani menggunakannya.

⁹ Untuk mengatasi hal tersebut nelayan mengakalinya dengan mematikan ikan sunu yang beratnya mencapai 3 kg, dan dijual dalam bentuk ikan mati. Itu karena ikan sunu mati harganya Rp 55.000,- per kg, sehingga harga jual ikan sunu mati bisa lebih tinggi (Rp 165.000,-) daripada dijual hidup yang hanya dihargai Rp 150.000,-.

Program budidaya rumput laut yang pernah dikembangkan di Buki juga tidak berjalan, karena terserang hama.

Program budidaya rumput laut yang beberapa tahun lalu digalakkan di daerah ini juga kurang berhasil karena areal budidaya kurang sesuai untuk budidaya rumput laut. Pada waktu musim gelombang kuat masyarakat tidak dapat membudidayakan rumput laut tersebut. Selain itu, rumput laut banyak terserang hama yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun depan pemerintah daerah tetap akan menggalakkan budidaya rumput laut di daerah ini dengan mengantisipasi berbagai kendala yang telah ada.

- **Potensi Ekonomi Darat**

Wilayah daratan Pasimasunggu Timur memiliki potensi sumberdaya yang cukup besar, seperti pohon kelapa, kebun jambu mente dan sawah yang bisa ditanami padi.¹⁰ Selain itu, keberadaan budidaya bandeng dan udang juga merupakan potensi yang tidak dapat diabaikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah ini.

Potensi sumberdaya yang cukup besar di desa ini adalah kelapa. Bisa dikatakan bahwa hampir setiap rumah tangga di desa ini memiliki pohon kelapa. Akan tetapi, buah kelapa yang cukup banyak itu kurang bisa memberi nilai tambah bagi pendapatan masyarakat, karena harganya sangat rendah, yaitu hanya sekitar Rp 1000,- per butir. Itupun sudah naik dibanding dua tahun sebelumnya, yang hanya Rp 500,- per butir. Selain itu pemasaran buah kelapa juga sulit, karena setiap rumah sudah memiliki pohon kelapa, dan untuk dijual keluar harganya tidak sebanding dengan biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Akibatnya buah kelapa yang sudah tua banyak yang dibiarkan jatuh.

¹⁰ Menurut informasi, wilayah Pulau Jampea (yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur) merupakan satu-satunya daerah pulau yang ada di kabupaten Selayar yang memiliki sawah untuk bertanam padi.

Pemanfaatan buah kelapa yang dilakukan masyarakat selama ini selain digunakan untuk memasak adalah dibuat kopra. Masyarakat tidak membuat menjadi minyak kelapa, kecuali hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan dibuat kopra itulah hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena harga kopra sekitar Rp 2000,- per kg. Hasil dari kopra itulah yang dirasakan oleh masyarakat cukup membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Akan tetapi, karena penjualan kopra itu sangat tergantung pada penampung yang ada di desa itu, maka harga kopra juga sulit untuk bisa meningkat cukup besar.

Tanaman mente memang banyak ditanam oleh masyarakat, namun selama ini hanya di pekarangan dan tidak dirawat. Karena itu hasilnya juga tidak banyak. Walaupun saat ini sudah ada kebun mente yang ditanam di lereng-lereng hutan, namun karena belum lama maka saat ini juga belum ada hasilnya.

Walaupun wilayah Pasimasunggu Timur merupakan satu-satunya daerah pulau yang menghasilkan beras di wilayah Kabupaten Selayar., namun karena tidak ada irigasi, maka sawah yang ada mengandalkan pada air hujan. Dengan kondisi seperti itu, maka para petani hanya bisa menggarap sawahnya satu kali dalam satu tahun, kecuali jika curah hujan cukup tinggi. Dengan kondisi seperti itu, maka hasil panen padi lebih bersifat subsisten, sehingga tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, karena satu tahun terakhir curah hujan di daerah ini cukup tinggi, sehingga masyarakat bisa panen padi dua kali, dan hasil panennya juga cukup berhasil, maka hal itu oleh masyarakat dirasakan cukup bisa meningkatkan pendapatan mereka. Hal itu diperkuat dengan banyaknya beras yang diekspor dari Pasimasunggu Timur ke pulau-pulau lain di Selayar, terutama di kawasan Takabonerote.

Kondisi yang sama juga terjadi pada tambak bandeng/udang. Karena ketergantungan pada air hujan, maka tambak bandeng/udang juga hanya bisa satu kali panen dalam satu tahun. Oleh karena tambak yang dimiliki oleh masyarakat rata-rata hanya berkisar 0,5 ha, maka hasil panen tambak juga tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun demikian karena harga bandeng

mengalami peningkatan yang cukup bagus,¹¹ yang dipicu oleh inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan BBM pada tahun 2007, maka bisa dipastikan bahwa hasil panen bandeng ini cukup berpengaruh dalam terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat di daerah ini.

Potensi ekonomi yang cukup banyak menghasilkan uang di daerah ini adalah perdagangan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun yang lainnya. Hal itu karena akses daerah ini ke kota sangat jauh, sehingga segala kebutuhan masyarakat sangat tergantung pada pedagang lokal. Karena itulah para pedagang kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Daerah Bontomatene dan Buki juga memiliki potensi darat yang hampir sama dengan pasimasunggu timur, kecuali tanaman padi yang selama ini belum pernah dibudidayakan di daerah ini. Potensi sumberdaya di daratan yang menonjol di Bontomatene dan berbeda dengan Pasimasunggu timur adalah peternakan dan pertambangan. Peternakan di Bungaiya potensial dikembangkan karena luasnya tanah adat dan hutan yang dapat digunakan untuk menggembala ternak terutama sapi. Penduduk setempat sebagian mempunyai kandang sapi di tanah adat yang luasnya lebih dari 500 ha. Sapi tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif karena dapat mencari makanan di alam secara bebas.

• **Potensi Ekonomi Laut**

Walaupun kondisi lingkungan laut di sebagian perairan sudah tidak menjanjikan karena rusaknya terumbu karang akibat pengeboman dan pembusian ikan pada waktu dulu, namun secara umum potensi perikanan di daerah ini masih cukup baik. Bahkan di tempat-tempat tertentu yang kondisi terumbu karangnya masih cukup baik, masyarakat bisa dapat menangkap ikan sunu dengan mudah, padahal ikan ini terkenal dengan harganya yang cukup mahal.

¹¹ Sebagai perbandingan, jika pada tahun 2006 harga bandeng satu tusuk Rp 5.000,- , maka pada tahun 2008 harganya meningkat menjadi Rp 7.500,- , bahkan kadang bias Rp 10.000,-. Dengan demikian terdapat kenaikan harga bandeng antara 50% sampai 100%.

Beberapa jenis ikan masih cukup banyak terdapat di kawasan perairan sekitar pulau Jampea. Akan tetapi, karena keterbatasan sarana penangkapan perikanan yang digunakan, baik peralatan tangkap maupun armada penangkapannya,¹² maka hasil tangkapannya juga sangat minim. Akibat lebih jauh dari itu, nilai penjualan dari hasil penangkapan ikan juga tidak banyak.¹³ Meskipun demikian, karena adanya inflasi karena kenaikan BBM, maka harga-harga ikan di daerah ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jika sebelumnya harga ikan maksimal hanya Rp 5000,- per tusuk, maka pada tahun 2008 bisa mencapai Rp 7.500,- per tusuk. Dengan demikian kenaikannya mencapai 50%.

Masyarakat Buki dan Bungaiya sebenarnya juga berdekatan dengan laut yang mempunyai potensi cukup tinggi. Meskipun demikian, sebagian besar potensi laut terutama laut dalam masih banyak dimanfaatkan oleh nelayan dari luar. Nelayan lokal hanya dapat mencari ikan di wilayah laut dangkal karena keterbatasan teknologi penangkapan.

¹² Umumnya perahu yang dimiliki juga dalam skala kecil, dan sebagian besar masih belum menggunakan motor. Beberapa perahu sudah menggunakan motor, namun motor yang digunakan umumnya juga berskala kecil, yaitu dengan kapasitas sekitar 2 PK. Dengan perahu yang demikian, maka mobilitas penangkapan juga rendah. Selain itu, dalam musim-musim tertentu yang ombaknya cukup besar, masyarakat juga sulit untuk dapat melaut. Kondisi tersebut tentu saja mempengaruhi besarnya hasil tangkapan, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima dari kegiatan kenelayanan.

¹³ Masyarakat bukan tidak memiliki kemauan untuk meningkatkan peralatan tangkapnya. Akan tetapi, untuk keperluan itu mereka dihadapkan pada kendala permodalan untuk pengadaan peralatan tangkap yang lebih eksploitatif. Karena ketiadaan modal itulah maka mereka akhirnya pasrah dengan kondisi alat tangkap yang dimiliki, walaupun hasilnya tidak banyak.

- **Lainnya**

Faktor lain yang sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat di Pasimasunggu Timur adalah kondisi geografis yang berada di pulau dan jauh dari kota, sedangkan sarana transportasi yang tersedia sangat terbatas. Kondisi itu mengakibatkan keterbatasan pasar untuk memasarkan produksi perikanan ataupun produksi hasil darat.

Di Pasimasunggu Timur sendiri sebetulnya terdapat pasar yang beroperasi tiga kali dalam seminggu¹⁴ untuk memasarkan hasil kebun maupun hasil perikanan. Akan tetapi, karena pengunjungnya terbatas, yaitu penduduk lokal dan penduduk dari pulau yang terdekat, maka daya serap pasar untuk berbagai produk pertanian dan perikanan juga sangat terbatas. Keterbatasan daya serap pasar itulah yang menjadi salah satu faktor mengapa penduduk kurang berambisi untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan.

Faktor musim juga sangat berpengaruh terhadap fluktuasi pendapatan masyarakat di daerah ini. Pada saat musim ombak, sekitar bulan Desember sampai Januari, karena ombaknya besar maka masyarakat hampir tidak bisa melaut sama sekali. Pada saat seperti itu maka bisa dikatakan bahwa pendapatan nelayan sangat kecil. Bukan hanya nelayan, bahkan pedagang pendapatannya juga menurun, karena kapal sulit masuk ke daerah ini, sehingga untuk mendatangkan barang dagangan dari Benteng Selayar juga sulit dilakukan. Dengan kondisi seperti itu, maka rata-rata tingkat pendapatan masyarakat dalam satu tahun juga menjadi lebih rendah.

Kondisi lingkungan laut yang semakin memburuk dari tahun ke tahun juga ikut mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama yang bekerja sebagai nelayan. Dengan kerusakan terumbu karang di

¹⁴ Tiga hari beroperasinya pasar adalah hari Minggu, Selasa dan Kamis. Di antara tiga hari pasar itu, yang cukup besar adalah hari Minggu, kemudian disusul hari Kamis. Pada hari Minggu, yang berkunjung ke pasar, baik untuk membeli ataupun berdagang bukan hanya penduduk lokal, tetapi juga yang berasal dari luar pulau. Adapun pada hari Kamis, walaupun ada juga pengunjung dari luar pulau, namun jumlahnya tidak sebanyak pada hari Minggu.

berbagai kawasan perairan, masyarakat merasakan bahwa hasil tangkapan ikan semakin menurun dari tahun ke tahun, yang tentu saja berpengaruh terhadap besarnya pendapatan mereka.

Faktor yang bersifat struktural juga ikut berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat di daerah ini, khususnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Pada saat belum ada keputusan kenaikan BBM, harga solar di daerah ini sudah mencapai Rp 6000,- per liter, dan harga bensin antara Rp 6.500,- sampai Rp 7000,- per liter. Dengan kenaikan BBM yang diberlakukan mulai akhir Mei 2008, dipastikan harga BBM di daerah itu menjadi lebih besar lagi. Kondisi itu tentunya mengakibatkan kondisi masyarakat yang pada dasarnya sudah sulit, dipastikan akan menjadi lebih sulit lagi. Akibat kenaikan BBM tersebut memiliki efek ganda terhadap masyarakat. Di satu sisi harga bahan bakar menjadi mahal, sehingga biaya operasional untuk kegiatan penangkapan menjadi sangat besar. Selain itu, daya beli masyarakat semakin menurun, karena harga kebutuhan sehari-hari juga ikut naik seiring dengan kenaikan harga bahan bakar. Akan tetapi, di sisi lain, walaupun akibat inflasi tersebut pendapatan masyarakat juga ikut meningkat, karena harga jual komoditi yang dihasilkan juga ikut naik, namun peningkatan pendapatan tersebut tidak seimbang dengan laju peningkatan harga kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi seperti itu, akibatnya daya beli masyarakat juga menurun.

Sebetulnya masyarakat bisa meningkatkan pendapatannya lebih tinggi lagi jika ada mata pencaharian alternatif yang bisa dilakukan. Akan tetapi, kegiatan alternatif itu bukan hal yang mudah untuk bisa dilakukan, karena rendahnya kondisi sumberdaya manusia di daerah ini. Memang sebagian masyarakat di daerah ini sudah ada yang lulus SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi, namun selain jumlahnya tidak banyak, umumnya yang sudah berpendidikan tinggi tidak mau kembali ke desa, tetapi mereka lebih memilih untuk bekerja di kota.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten di kawasan Indonesia Timur yang mempunyai sumber daya laut yang potensial, namun kondisi terumbu karangnya telah mengalami degradasi yang serius. Sebagai respons atas permasalahan tersebut pemerintah dengan dibantu oleh Bank Dunia telah membuat program rehabilitasi terumbu karang yang disebut COREMAP. Sebagai lembaga penyanggah dana pinjaman, Bank Dunia telah membuat parameter untuk mengevaluasi kesuksesan program COREMAP II yaitu sebagai berikut : (1) Total pendapatan masyarakat yang didapat dan jumlah pendapatan dari berbagai kegiatan berbasis terumbu karang dan kegiatan alternatif naik sebesar 10 persen pada akhir program (*the end of program* atau EOP) tahun 2009. (2) Sekitar 70 persen nelayan/penerima manfaat di masyarakat pesisir di kabupaten program merasa bahwa COREMAP berdampak positif terhadap kesejahteraan dan status sosial ekonomi mereka pada akhir program. Atas dasar parameter tersebut COREMAP seharusnya mampu mengimplementasikan program-programnya sampai pada tahun 2009. Untuk mengawal jalannya kegiatan COREMAP di Kabupaten Kepulauan Selayar, penelitian evaluatif (T1) ini telah dilakukan pada tahun 2008, dengan beberapa kesimpulan dan rekomendasi.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dalam tulisan ini menekankan pada faktor yang mempengaruhi kinerja program yang terkait dengan manajemen pelaksanaan tentang kelembagaan, SDM pelaksana, dan pendanaan program. Atas dasar hasil penelitian tahun 2008 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ***Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Kepulauan Selayar kurang optimal***

Hal ini tercermin pada terlambatnya dan kurangnya dana pendampingan dari Pemda Kepulauan Selayar. Permasalahan tersebut berawal dari perbedaan persepsi tentang COREMAP di mana COREMAP telah diberlakukan sebagai proyek yang hanya direspons jika ada hasil cepat yang bersifat fisik. Padahal, COREMAP merupakan program jangka panjang yang tidak selalu diikuti oleh hasil (*output*) yang bersifat fisik semata. Dalam kenyataan kegiatan COREMAP dapat berjalan lebih nyata setelah dana turun pada tahun 2007 dan 2008.

- ***Rekrutmen petugas COREMAP antara lain SETO, CF dan MD yang belum efisien.***

Dalam kenyataan SDM pelaksana telah menempatkan pekerjaan COREMAP bukan sebagai pekerjaan pokok tetapi memandang hanya sebagai pekerjaan/kegiatan sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Pada umumnya mereka telah mempunyai kegiatan utama di luar COREMAP.

- ***Begitu pula pelaksanaan COREMAP di tingkat desa masih ada kelemahan.***

Perekrutan pengurus LPSTK dan Pokmas-Pokmas yang ada kurang mencerminkan latar belakang di bidang kelautan, akibatnya mereka kurang memahami apa yang seharusnya dilakukan. Apalagi fasilitator masyarakat dan SETO yang diharapkan dapat memberikan arahan dan bimbingan bagi pelaksanaan program COREMAP jarang berada di lokasi.

- ***Pemahaman masyarakat tentang COREMAP masih rendah.***

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap COREMAP terkait dengan kurangnya proses sosialisasi. Kendati sebagian besar masyarakat di desa COREMAP mengetahui tentang COREMAP, namun hal itu bukan karena hasil proses sosialisasi yang

terencana. Begitu pula partisipasi masyarakat dalam kegiatan COREMAP juga masih rendah, karena ketidakaktifan Pokmas-Pokmas yang ada.

- *Walaupun kegiatan sosialisasi Coremap kurang dilakukan secara intensif, namun keberadaan Coremap di dua desa ini memberikan dampak yang cukup positif dalam penyadaran masyarakat.*

Hal itu terbukti pada terjadinya penurunan kegiatan masyarakat dan kenelayan (nelayan) yang menggunakan obat bius (potassium/sianida) dan bom ikan di kawasan terumbu karang. Informasi larangan penggunaan obat bius dan bom telah menyebar pada sebagian nelayan lokal dan nelayan pendatang (dari daerah lain) sehingga sebagian nelayan yang biasanya menggunakan obat bius dan bom tidak melakukan kegiatannya di lokasi ini.

- *Pendapatan penduduk di kedua kawasan (daratan dan pulau kecil) menunjukkan terjadi peningkatan baik rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita pada kurun waktu 2006-2008.*

Pendapatan rumah tangga di Bontomatene dan Buki meningkat sebesar 17,81 persen dan di Pasimasunggu Timur naik sebesar 42,9 persen. Meskipun terjadi peningkatan pendapatan cukup tinggi, tetapi sebagian besar penduduk di kedua kawasan tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan tingkat kabupaten. Tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi jika diukur dari batasan garis kemiskinan 1,35 \$ US per hari. Distribusi pendapatan rumah tangga juga memperlihatkan jumlah rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan rendah cukup besar.

- *Peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan Pulau Kecil lebih besar dibandingkan dengan pulau besar, tetapi rata-rata pendapatan per kapita dan pendapatan rumah*

tangga di kawasan daratan tetap lebih besar dibandingkan kawasan pulau kecil.

Pendapatan per kapita di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil pada tahun 2008 masing-masing sebesar 276 ribu rupiah dan 195 ribu rupiah. Adapun rata-rata pendapatan rumah tangga di kawasan daratan pulau besar 940 ribu rupiah dan di pulau kecil 725 ribu rupiah. Distribusi pendapatan di kawasan daratan pulau besar dan pulau kecil menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di kedua kawasan mempunyai pendapatan rendah yaitu di bawah Rp 500 ribu. Peningkatan pendapatan penduduk dilokasi COREMAP berkaitan dengan beberapa faktor seperti : pertama, kenaikan harga ikan (baik ikan laut maupun ikan tambak (banding)), karena adanya inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM. Kedua, hasil panen padi yang cukup bagus karena satu tahun terakhir bias panen dua kali, karena adanya curah hujan yang cukup tinggi. Ketiga penangkapan ikan sunu yang harganya cukup tinggi, karena adanya penampung di Bonto Baru. Hal itu didukung dengan kebijakan pemerintah memberi bantuan ketinting, sehingga hasil penangkapan sunu bias lebih baik.

5.2. Rekomendasi

Beberapa masukan rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Perlu penyamaan persepsi antara pelaksana program COREMAP dengan penentu kebijakan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal dapat dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi melalui serangkaian pertemuan formal maupun nonformal. Dengan kesamaan pemahaman diharapkan ada kesamaan persepsi bahwa COREMAP tidak semata-mata diberlakukan sebagai proyek tetapi sebagai program jangka panjang yang didukung Pemda dan DPRD dalam upaya mewujudkan visi daerah.
- Rekrutmen SDM pelaksana antara lain SETO, CF dan MD perlu diperbaiki antara lain dengan mensyaratkan perlunya kerja

yang *full time* dan bukan sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini perlu ditegaskan dalam kontrak kerja yang berprinsip pada hak, kewajiban, *reward* dan *punishment*.

- Demi untuk meningkatkan efisiensi kinerja kegiatan COREMAP, monitoring dan evaluasi terhadap SDM pelaksana antara lain CETO, CF dan MD di lapangan perlu lebih ditingkatkan dengan membuat mekanisme control, tidak cukup dengan pembuatan laporan. Untuk itu antara lain perlu kerjasama dengan Camat dan Kepala Desa.
- Kegiatan sosialisasi COREMAP kepada masyarakat perlu diperbanyak dengan menjadwalkan kegiatan. Selain itu perlu memperbanyak/memperbaiki pemasangan billboard di banyak tempat yang strategis, seperti pelabuhan, pabrik es, dan pertigaan jalan.
- Pencairan anggaran kegiatan COREMAP perlu dipercepat dan sejalan dengan itu kelancaran penggajian petugas COREMAP perlu diutamakan serta proporsi alokasi dana ke masyarakat diperbesar (*seed fund dan village grant*). Pemanfaatan *village grant* sebaiknya diarahkan untuk menunjang aspek kesehatan, pendidikan dan kegiatan ekonomi serta pengawasan terumbu karang. Dana *seed fund* yang terlalu rendah tidak dapat dimanfaatkan untuk pengembangan maupun pembuatan usaha alternatif di perdesaan. Masyarakat cenderung meminjam dana yang sedikit untuk kebutuhan konsumtif.
- Khusus tentang pemanfaatan *seed fund* diarahkan untuk usaha produktif terutama ditujukan bagi anggota Pokmas keluarga nelayan. Idealnya apabila tiap desa COREMAP ada tenaga pendamping khusus yang mampu mengawal usaha ekonomi produktif (UEP) anggota Pokmas.
- Sebaiknya LPSTK diberikan alokasi anggaran karena jika tidak ada dana, maka pengurus LPSTK akan sulit untuk berpartisipasi lebih optimal. Selain itu pengurus LPSTK dan Pokmas lebih diarahkan untuk warga yang mempunyai kegiatan/pekerjaan pokok dibidang kenelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono Suko, Ngadi, Mashyuri Imron dan Toni Soetopo. (2006) *Aspek Sosial Ekonomi Terumbu Karang di Kabupaten Selayar*. Jakarta : P3O-LIPI
- BPS Kabupaten Selayar. 2005. *Kabupaten Selayar Dalam Angka 2004/2005*. Selayar: Kerjasama Bainslada dan BPS
- BPS Kabupaten Selayar. 2003. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Selayar 2003*. Kerjasama BPS dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Selayar.
- BPS. 2006. Survei Pertanian tahun 2004.
- CRITIC-COREMAP-LIPI. (2007). "Monitoring Ekologi Selayar". Jakarta: COREMAP II-LIPI
- Daniel Suryadarma, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, 2006, *Causes of Low Secondary School Enrollment in Indonesia* Lembaga Penelitian Jakarta : SMERU
- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. 2003. "Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan". Kerjasama Coremap dan DFW Indonesia.
- Hardin, G. 1968. "The Tragedy of Commons". Dalam *Science* 162 No. 3855.
- Hidayati Deny. (ed). 2002. *Data dasar Aspek Terumbu Karang Indonesia : Studi Kasus Desa Mola Utara, Kecamatan Wang-Wangi, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: COREMAP-LIPI
- Kompas*, 9 Desember 2006

- Masyhuri Imron . 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Laut secara Terpadu : Industri Pengolahan Hasil Laut*. Jakarta : PMB-LIPI
- Ministry of The People's Welfare. 2002. "Indonesia Country Report Population and Poverty"
- Much, Zulfikar, dkk. 2002. "Penangkapan Ikan Tidak Ramah Lingkungan di Kepulauan Sinjai.". Jakarta: COREMAP-LIPI
- Pedoman Rakyat*. 28 Agustus 2006
- Pemerintah Kabupaten Selayar. 2006. "Peraturan Bupati Selayar Nomor 04 Tahun 2006, Tentang RPJMD 2006-2010".
- Saleh, Nur Alam. 2000. " Legenda Asal Mula Gong Nekara, Jangkar Raksasa dan Meriam Kuno di Daerah Kabupaten Selayar". Dalam *Buletin Bosara* 16(VII).
- Wahyono, Ary dkk. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta Media Pressindo,.
- Widayatun (ed). 2001. *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia (Studi Kasus Kampung Meobekwan, Distrik Waigeo Utara, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua*, COREMAP – LIPI.

